

**PENERAPAN *SYARIAH COMPLIANCE* SEBAGAI PRINSIP *SYARIAH*
GOVERNANCE PADA BANK MUAMALAT INDONESIA TBK
CABANG MAKASSAR**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

**ANGRIANI
NIM: 10800111020**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2015

**PENERAPAN *SYARIAH COMPLIANCE* SEBAGAI PRINSIP *SYARIAH*
GOVERNANCE PADA BANK MUAMALAT INDONESIA TBK
CABANG MAKASSAR**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

**ANGRIANI
NIM: 10800111020**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Angriani
NIM : 10800111020
Tempat/Tgl. Lahir : Tellang / 05 Juli 1993
Jur/Prodi/Konsentrasi : Akuntansi
Fakultas/Program : Ekonomi & Bisnis Islam
Alamat : BTN. Minasa Upa Blok N3, No. 17
Judul : “Penerapan *Syariah Compliance* Sebagai *Prinsip Syariah Governance* Pada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 16 November 2015
Penyusun,

ANGRIANI
10800111020

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Penerapan Syariah Compliance Sebagai Prinsip Syariah Governance Pada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar"**, yang disusun oleh **Angriani**, NIM: **10800111020**, mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan hari Kamis, 20 Agustus 2015 M, dinyatakan telah dapat menerima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi, dengan beberapa perbaikan.

Makassar, 16 November 2015 M

DEWAN PENGUJI

Ketua Majelis	: Prof. Dr. H. Mushmin Kara, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Abdul Wahab, SE., M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Lince Bulutoding, SE., M.Si, Ak.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, M.Si, Ak.	(.....)
Munaqisy II	: Drs. Urbanus Uma Leu, M.Ag	(.....)

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag
Nip : 19581022 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalmu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, kekuatan, kesabaran dan kemampuan untuk berpikir yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salam dan shalawat juga semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang menjadi panutan sempurna bagi kita semua dalam menjalani kehidupan yang bermartabat.

Skripsi dengan judul : **“Penerapan *Syariah Compliance* Sebagai Prinsip *Syariah Governance* Pada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar”** penulis hadirkan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa memulai hingga mengakhiri proses pembuatan skripsi ini bukanlah hal yang mudah. Ada banyak rintangan, hambatan dan cobaan yang selalu menyertainya. Hanya dengan ketekunan dan kerja keraslah yang menjadi penggerak penulis dalam menyelesaikan segala proses tersebut. Juga karena adanya berbagai bantuan baik berupa moril dan materil dari berbagai pihak yang telah membantu memudahkan langkah penulis.

Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Jamal Kolley dan Ibunda Sahri Bunga yang

telah mempertaruhkan jiwa dan raga untuk kesuksesan anaknya, yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendukung, memotivasi dan tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah SWT. demi kebahagiaan penulis dengan sepenuh hati dalam buaian kasih sayang. Adik-adikku tercinta, Engryarto Abriawan dan Anugrah Hijriyah yang lahir dari rahim yang sama yang selalu mendukung, memotivasi dan menjadi alasan penulis untuk berusaha menjadi teladan yang baik. Dan segenap keluarga besar yang selalu memberikan semangat bagi penulis untuk berbuat lebih baik.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Jamaluddin Majid, S.E, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Bapak Memen Suwandi, SE., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku dosen Pembimbing I dan Ibu Lince Bulutoding, SE., M.Si., A. selaku dosen Pembimbing II yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan, arahan serta motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak. Dan Bapak Drs. Urbanus Uma Leu, M. Ag. selaku dosen penguji yang senantiasa memberikan saran-saran dan nasehat demi perbaikan skripsi ini.

5. Bapak Sumarlin, SE., M. Ak. yang telah membantu dan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian pada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar.
6. Bapak Ridwan Umar, Ibu Nur Qalbi dan Bapak Muhidin selaku informan penulis dalam melakukan penelitian pada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar.
7. Ibu Sitti Aisyah, S.Ag., M.Ag., Bapak Jamaluddin M., SE., M.Si. dan Ibu Lince Bulutoding, SE., M.Si., Ak.selaku dosen penguji komprehensif dan segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan bekal pengetahuan bagi penulis selama menjalani proses perkuliahan.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan layanan dan pelayanan terbaik untuk mahasiswanya.
9. Sahabatku tercinta, Besse Surwanti sekaligus menjadi kakak bagi penulis yang selalu memberikan motivasi, mendukung dan menemani penulis selama kurang lebih 4 tahun terakhir baik suka maupun duka.
10. Teman-teman dan sahabat-sahabatku angkatan 2011 Akuntansi UIN Alauddin Makassar kelas Akuntansi 1,2 khususnya Andi Putri Ayu Lestari, Ervina Mursid, Eni Novitasari, Devika Khan, Bulqis Jauhar, Citra Nur Amaliah, Febriani Setijawan, para Kitty-Kitty (Asnidar Akib, A. Ira Andriani dan kawan-kawan) dan Abdul Rahim serta teman-teman yang tidak disebutkan

satu persatu yang selama ini memberikan banyak motivasi, bantuan dan telah menjadi teman diskusi yang baik bagi penulis.

11. Seluruh mahasiswa jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar, kakak-kakak dan adik-adik yang tercinta atas segala bantuan dan persaudaraan yang terus dijaga.
12. Teman-teman KKN Profesi Angkatan V Tahun 2015 UIN Alauddin Makassar khususnya yang berlokasi di Dusun Tanete, Desa Romanglasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, yang telah banyak mengajarkan arti persaudaraan dan pentingnya bersosialisasi.
13. Semua pihak yang memberikan motivasi dan telah membantu penulis dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi penulis.

Semoga skripsi yang penulis persembahkan ini dapat bermanfaat. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Saran dan kritik yang membangun tentunya sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan skripsi ini.

Penulis,

ANGRIANI
10800111020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1-20
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	9
C. Rumusan Masalah	13
D. Kajian Pustaka	15
E. Tujuan Penelitian.....	17
F. Manfaat Penelitian.....	17
BAB II : TINJAUAN TEORETIS	21-63
A. Teori Kepatuhan.....	21
B. Konsep <i>Maslahah</i>	23
C. Tujuan Laporan Keuangan Menciptakan <i>Maqashid</i> <i>Syariah</i>	29
D. <i>Syariah Governance</i> dan <i>Good Corporate Governance</i>	34
E. <i>Syariah Compliance</i> Sebagai Prinsip Utama <i>Syariah</i> <i>Governance</i>	38
F. Prinsip Syariah Pada Pengelolaan Bank Syariah Berlandaskan Sumber Hukum Islam	40
G. Prinsip-Prinsip Syariah Sebagai Asas Transaksi Syariah Pada Bank Syariah.....	44

H. Karakteristik Kegiatan Penyaluran Dana Bank Syariah Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)	53
I. Rerangka Konseptual	62
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	65-75
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	65
B. Pendekatan Penelitian.....	66
C. Subjek Penelitian.....	68
D. Sumber Data Penelitian	69
E. Metode Pengumpulan Data	71
F. Instrumen Penelitian.....	71
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	72
H. Pengujian Keabsahan Data.....	73
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	76-123
A. PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.....	76
1. Gambaran Umum	79
2. Visi dan Misi	80
3. Struktur Organisasi	80
4. Letak Kantor	82
B. Skema Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Ijarah	83
C. Penerapan Prinsip Syariah Pada Bank Muamalat Cabang Makassar Terkait Penyusunan Laporan Keuangan.	87
1. Prinsip <i>Ukhuwah</i> dalam Pendapatan dari Aktivitas Pembiayaan.....	87
2. Prinsip <i>Tawazun</i> , <i>Universalisme</i> dan <i>Maslahah</i> Untuk Akuntansi Syariah.....	92
3. Prinsip <i>Adl</i> (Keadilan) Terkait Konsep Dasar Akuntansi.....	100
a. Unsur Riba dalam Pembayaran Tangguhan Pembiayaan Murabahah	101
b. Unsur <i>Gharar</i> Dalam Pengakuan Pendapatan Pembiayaan Mudharabah	107
c. Unsur <i>Maysir</i> Dalam Penilaian Aset Tetap Untuk Pembayaran Zakat	112
d. Unsur Kezaliman Dalam Penanggungan Biaya	

Perbaikan Pembiayaan Ijarah	115
BAB V : PENUTUP.....	124-128
A. Kesimpulan.....	124
B. Implikasi Penelitian.....	126
DAFTAR PUSTAKA	129-133
LAMPIRAN-LAMPIRAN	134-159
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	160

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Rerangka Konseptual	64
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Bank Muamalat Cabang Makassar	80
Gambar 4.2 : Skema Pembiayaan Mudharabah	83
Gambar 4.3 : Skema Pembiayaan Murabahah	84
Gambar 4.4 : Skema Pembiayaan Ijarah	85
Gambar 4.5 : Skema Mudharabah (Antara Bank dan Koperasi)	110

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Laporan Nilai Tambah (<i>Value Added Statement</i>)	98
Tabel 4.2 : Angsuran Pembayaran Tangguhan Pembiayaan Murabahah	103

ABSTRAK

Nama : Angriani
Nim : 10800111020
Judul : Penerapan *Syariah Compliance* Sebagai Prinsip *Syariah Governance* Pada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip syariah dalam hal ini *syariah compliance* pada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar terkait penyusunan laporan keuangan. Prinsip-prinsip syariah tersebut diantaranya prinsip *ukhuwah, adl, tawazun, universalisme* dan *masalahah*. Label syariah pada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar mewajibkan bank untuk menerapkan prinsip syariah/nilai-nilai Islam dalam segala aspek pengelolaannya termasuk transaksi-transaksi yang terjadi pada pembiayaan bank dan kegiatan sosial yang mempengaruhi penyusunan laporan keuangan bank. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma interpretatif dan menggunakan pendekatan *hermeneutika-fenomenologi*. Dimana pendekatan ini menggunakan tiga tahap analisis *Paul Ricoeur* yaitu melalui level semantik, level refleksi dan level eksistensial untuk memahami makna yang terkandung dari bahasa yang tertuang dalam teks wawancara, sehingga dapat terlihat apakah Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar benar-benar menerapkan atau masih menyalahi prinsip-prinsip syariah tersebut. Menurut teori kepatuhan bahwa bank yang berbasis syariah wajib menerapkan/patuh terhadap prinsip-prinsip syariah, yang tujuan sejalan dengan konsep *masalahah* yaitu untuk mencapai kebaikan bersama atau untuk memperoleh manfaat bersama. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan keseluruhan prinsip-prinsip syariah tersebut akan mewujudkan laporan keuangan dengan penyajian laba yang tidak hanya memihak pada bank saja atau sifatnya material tetapi juga memiliki nilai spritual, selain itu *zakat-oriented* menyeimbangkan karakter *egoistik* dan *alturistik*, karakter *materialistik* dan *spiritualistik* dan karakter *kualitatif* dan *kuantitatif* pada laporan keuangan dan penelitian ini juga menunjukkan bahwa *time value of money, historical cost, accrual basic* dan *substance over form* tidak sesuai dengan prinsip syariah/nilai-nilai Islam. Implikasi penelitian ini adalah perlunya bank syariah khususnya Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaannya guna mewujudkan nilai-nilai Islam dalam proses akuntansi khususnya penyusunan laporan keuangan.

Kata Kunci : Syariah compliance, Syariah Governance, konsep masalahah, zakat-oriented, time value of money, historical cost, accrual basic dan substance over form.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awal 1990-an, 54 bank syariah telah didirikan di 26 negara-negara Islam dan non-Islam. Prinsip-prinsip Islam awalnya banyak berkembang pada negara-negara Islam. Perkembangan perbankan di negara-negara Islam maupun non-Islam pada dasarnya dipicu oleh perkembangan bisnis yang begitu pesat. Utamanya di Indonesia, berdasarkan data statistik perbankan syariah Bank Indonesia, dapat diketahui bahwa aset bank syariah pada tahun 2006 sampai dengan 2009 mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Hal itu tentunya memicu munculnya lembaga-lembaga syariah utamanya perbankan syariah. Terbukti dari indeks keuangan Islam tahun 2011 yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara tertinggi keempat pada indeks keuangan Islam.¹ Pada dasarnya operasional bank Islam berbeda dengan bank non-Islam, namun dalam pelaksanaannya bank Islam direkomendasikan untuk mengadopsi standar akuntansi bank non-Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.² Hal ini berarti perusahaan atau perbankan syariah harus melakukan harmonisasi terhadap standar bank non-Islam. Masalah utama dalam akuntansi dan operasi bank syariah adalah kurangnya presisi dalam penerapan prinsip-prinsip

¹ Halim Alamsyah, "Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015", Ikatan Ahli Ekonomi Islam, <http://www.bi.go.id>.

² Kamel Naser, "The Influence Of Islamic On Bank Financial Reporting", *Emerald* Vol. 7 No. 2, (1997): h. 57.

syariah di perbankan syariah. Secara makro tujuan akuntansi syariah yaitu (1) merupakan dasar dalam perhitungan zakat, (2) memberikan dasar dalam pembagian keuntungan, distribusi kesejahteraan dan pengungkapan terhadap kejadian dan nilai-nilai dan (3) untuk meyakinkan bahwa usaha yang dilakukan perusahaan bersifat islami dan laba yang diperoleh tidak merugikan masyarakat.³ Hal tersebut menegaskan bahwa organisasi bisnis tidak lagi berorientasi *profit-oriented* atau *stockholders-oriented*, tetapi berorientasi *zakat-oriented* dan *environment* serta *stakeholders-oriented*.⁴ Dengan berorientasi zakat, berarti perusahaan berusaha mencapai angka optimum untuk pembayaran zakat serta menjadi ukuran kinerja perusahaan bukan laba bersih.⁵

Berkembangnya dunia bisnis sebagai tanda diperlukannya perbankan yang bisa menimbulkan dan menjaga kepercayaan dan akuntabilitasnya terhadap para nasabahnya. Termasuk perusahaan yang menyimpan aset akibat semakin berkembangnya dunia bisnis. Perusahaan yang menyimpan aset pada perbankan yang memiliki akuntabilitas tinggi akan memunculkan kepercayaan bagi para calon nasabah atau masyarakat yang berada dalam negara tersebut maupun yang berada di luar dari negara tempat perusahaan tersebut berdiri. Hal ini mengindikasikan kegagalan dalam penerapan prinsip syariah akan membuat nasabah pindah ke bank

³ Hameed, (2000,17) dalam Ery Wibowo, “Dimensi Keadilan dan Epistemologi Akuntansi Syariah”, *Value Added*, Vol. 3, No. 2, (2007): h. 20.

⁴ Iwan Triyuwono, *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, (2009), h. 348.

⁵ *Ibid.*

lain atau mengurangi kepercayaan nasabah, karena dalam perbankan syariah pengelolaan utamanya dari aktivitas yang memengaruhi proses akuntansi harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁶ Berarti dalam hal ini, kepercayaan nasabah merupakan faktor penting bagi berkembangnya suatu perbankan.

Adanya kebutuhan atas perbankan yang memiliki akuntabilitas tinggi maka perbankan syariah telah hadir dengan membawa nilai-nilai Islam atau prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan operasinya. Alasan mendasar dalam penelitian ini merujuk pada penerapan prinsip syariah pada perbankan syariah yang merupakan hal terpenting yang membedakan dengan bank konvensional. Utamanya pada akuntansi yang berdampak pada laporan keuangan. Hal ini didukung oleh pernyataan IAI (2002) bahwa karakteristik bank syariah terkandung dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah, yaitu dalam hal penerapan prinsip syariah.⁷ Karena pada dasarnya ada dua tujuan utama akuntansi syariah.⁸ Pertama sebagai instrumen pertanggungjawaban memenuhi kewajiban kepada Allah (*hablun min'allah*), individu dan lingkungan masyarakat (*hablun min'an-nas*). Kedua, sebagai instrumen membantu terciptanya keadilan sosial-ekonomi (*al-falah*).

⁶ Siti Maria Wardayati, "Implikasi Syariah Governance Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah", *Walisono*, Vol. 19 No. 1, (2011): h. 4.

⁷ Ery Wibowo Agung Santoso, "Faktor Relegiusitas Dalam Perbankan Syari'ah", <http://jurnal.unimus.ac.id>, h. 6.

⁸ Asrori, "Pengungkapan Syariah Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 3, No. 1, (2011): h 1.

Simbol agama yang melekat pada bisnis syariah atau perbankan syariah tidak akan selalu menjamin sebuah lembaga menjadi bersih dari perilaku korupsi.⁹ Hal ini karena konteks muamalah syariah yang berlaku saat ini masih didasarkan pada konsep-konsep konvensionalisme. Bukan hanya pada pengelolaan transaksinya tetapi konsep dasar penyusunan laporan keuangan dalam memperlakukan transaksi pun masih menganut konsep-konsep konvensionalisme. Akibatnya masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan syariah merasa bahwa kegiatan operasi perbankan syariah tidak berbeda dengan perbankan konvensional. Pada teorinya perbankan syariah harus memenuhi prinsip Islam/syariah. Konsep dasar akuntansi yang dipilih akan menentukan perlakuan terhadap transaksi-transaksi tersebut. Sehingga laporan keuangan akan tersusun sesuai dengan konsep dasar tersebut. Hal ini menegaskan bahwa betapa pentingnya konsep dasar yang digunakan oleh perbankan syariah bukan hanya dari segi transaksinya tetapi konsep dasar yang menjadi landasan penyusunan laporan keuangan yang dipilih harus sesuai dengan nilai-nilai syariah. Namun pada kenyataannya perbankan syariah belum dapat memenuhi semua prinsip tersebut. Seperti penelitian yang dilakukan Ramadhani bahwa bank syariah belum sepenuhnya menjalankan prinsip syariah terbukti dalam penelitiannya bahwa BPR Syariah di Kota Mojokerto belum melaksanakan prinsip *An Taraddin Minkum*, yang berarti BPR

⁹ Agustianto dalam Andik S. Dwi Saputro, "Penguatan Sharia Governance Melalui Reformasi Akuntansi", Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto, (2010): h. 2.

Syariah tersebut masih melakukan transaksi yang haram.¹⁰ Tentunya ketidakpatuhan tersebut berdampak pada laporan keuangan bank syariah yang tidak sepenuhnya memenuhi prinsip syariah. Hal tersebut menyebabkan perbankan syariah harus bekerja keras untuk menjaga akuntabilitas dan memunculkan kepercayaan dari para nasabahnya dengan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam.

Dalam prakteknya *syariah compliance* menjadi bagian penting dalam mengetahui kinerja lembaga-lembaga syariah. Penelitian sebelumnya yang menemukan hubungan positif antara kinerja perusahaan ataupun perbankan dengan tata kelola perusahaan.¹¹ Pada dasarnya, praktek perbankan syariah harus mengandung prinsip syariah. Sebagaimana dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 pada pasal 2 ayat 3 dijelaskan bahwa pemenuhan prinsip Syariah harus dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*) dan *universalisme* (alamiyah) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan *objek haram*. Salah satunya nilai terpenting dalam prinsip syariah yang juga menjadi tujuan dari prinsip syariah (*Maqashid Syari'ah*) yaitu, nilai *maslahah*. Dimana nilai *maslahah* yang berarti segala aktivitas operasi perusahaan harus memberi manfaat untuk semua pihak bukan hanya sepihak. Prinsip *maslahah* merupakan cara untuk

¹⁰ Kiki Priscilia Ramadhani, "Analisis Kesyariahan Penerapan Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah xxx Di Kota Mojokerto)", *jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/957*. (2014): h. 19.

¹¹ Sulaiman Abdullah Saif Alnasser dan Jorah Muhammad, "Introduction To Corporate Governance From Islamic Perspective", *Emerald* Vol. 28 No. 3, (2012): h. 226.

pengambilan keputusan.¹² Nilai inilah yang harus dikembangkan oleh perbankan syariah ataupun perusahaan berbasis syariah lainnya. Namun adanya ketidakpercayaan dari masyarakat memberikaa indikasi bahwa perbankan syariah kurang menerapkan nilai *maslahah*. Untuk lembaga-lembaga syariah kasus antara kinerja dan tata kelola perusahaan perlu ditinjau dengan perspektif Islam dalam sebuah pertimbangan. Perusahaan atau lembaga keuangan syariah harus menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip syariah agar dapat memenuhi *syariah compliance* sebagai prinsip utama *syariah governance*.

Perbankan syariah merupakan induk dari lembaga syariah, tanggung jawab atas kepatuhan terhadap aturan Syariah dalam hal produk, instrumen, operasi, praktek dan manajemen. Hal ini mendukung bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah akan dicapai dengan memiliki kerangka tata kelola Syariah yang tepat. Kepatuhan terhadap Syariah dan penerapan tata kelola syariah didorong oleh lembaga-lembaga internasional seperti regulasi Akuntansi dan Organisasi Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI) dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB).¹³ Isu yang berkembang saat ini bahwa beberapa pengamat mengkritik moralitas lembaga

¹² Asyraf Wajdi Dusuki and Nurdianawati Irwani Abdullah, "Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility", *The American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 24, No. 1, h. 32.

¹³ Catherine Soke Fun Ho, "Syariah accounting And Compliant Screening Practices", *Emerald* Vol. 4 No. 2/3, (2012): h. 241.

keuangan Islam dan mengutuk ketidakpatuhan beberapa produk dan operasi Islam.¹⁴ Bahkan, kegagalan untuk memenuhi prinsip-prinsip yang mendasari pembiayaan Islam akan menimbulkan resiko Syariah dan merusak kredibilitas dan reputasi industri perbankan syariah. Kredibilitas Bank syariah terkait dengan pengaruh *Syariah Board* (SB) dalam pengambilan keputusan perbankan dan konsistensi dalam interpretasi Syariah. Dengan berperannya *Syariah Board* pada penetapan keputusan dan tanggung jawab perbankan syariah maka adanya ketidakpatuhan dapat dikaitkan dengan peran pasif dari *Syariah Board* dalam skema pemerintahan Syariah.

Beberapa negara mengembangkan tata kelola Syariah melalui penguatan regulasi dan pengawasan *Syariah Board*. Tata kelola perbankan syariah tidak terlepas dari produk-produk yang ada pada perbankan syariah. Saat ini produk-produk yang ada pada perbankan syariah terbagi atas produk penghimpunan dana dan penyaluran dana. Namun produk-produk yang utama dijalankan oleh perbankan syariah adalah produk-produk pembiayaan atau penyaluran dana. Dimana produk-produk tersebut terbagi menurut prinsipnya, yaitu bagi hasil, sewa dan jual beli. Mudharabah merupakan produk bagi hasil (profit-sharing) produk yang paling disukai dalam hukum Islam dan paling umum digunakan.¹⁵ Sedangkan murabahah merupakan produk/pembiayaan yang banyak digunakan oleh bank syariah, karena mark-up pada produk murabahah bisa diatur sedemikian rupa, sehingga membuat bank Islam

¹⁴ Hichem Hamza, "Sharia Governance in Islamic Banks: Effectiveness And Supervision Model", *Emerald* Vol. 6 No. 3, (2013): h. 226.

¹⁵ Saiful Muchlis, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, Alauddin Press, Makassar, (2011), h. 6.

memiliki keuntungan yang sebanding dengan bank yang berbasis bunga yang menjadi saingan dari bank Islam.¹⁶

Akuntansi untuk perbankan syariah dan secara umum bisnis syariah tidak lagi diorientasikan pada fungsi *to provide* (menyediakan) informasi bagi stakeholders, tetapi harus dioreintasikan pada fungsi penjagaan hak Tuhan dan *stakeholders*.¹⁷ Hal ini tentu mengindikasikan bahwa seharusnya perusahaan yang menjalankan bisnis baik itu perbankan harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang merupakan pemiliki utama sumber daya yang dikelola oleh perusahaan ataupun perbankan syariah. Dengan kata lain pertanggungjawaban bukan hanya pada stakeholder semata yaitu manusia sebagai pemilik modal tetapi juga kepada Tuhan yang diwujudkan dalam pertanggungjawaban kepada masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan atau perbankan syariah. Utamanya lembaga yang menjalankan bisnisnya berdasarkan syariah pada hakekatnya mendasarkan pada filosofi dasar Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁸

Syariah compliance memang telah menjadi salah satu prinsip bagi terwujudnya *Syariah Governance*. Sedangkan, prinsip-prinsip lain yang berlaku dalam bisnis konvensional merupakan prinsip yang sama dalam bisnis ataupun perbankan syariah. Kepatuhan syariah sendiri dapat dilihat dari kemampuan

¹⁶ Kiki Pricilia Ramadhani, “Analisis Kesyarlahan Penerapan Pembiayaan Murabahah(Studi Kasus Pt.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Xxx Di Kota Mojokerto), <http://download.portalgaruda.org>, (2014).

¹⁷ Andik S. Dwi Saputro, *Loc. Cit.*, h. 12.

¹⁸ Ahmad dalam Nadia Rahma, “Analisis Penerapan Islamic Social Reporting Index dalam Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Indonesia”, *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, (2012): h. 3.

perusahaan untuk menerapkan ketentuan/prinsip syariah. Tentunya laporan keuangan yang ada pada bisnis konvensional berbeda dengan laporan keuangan yang ada pada bisnis syariah. Dimana laporan keuangan bisnis syariah bukan lagi menjadi suatu informasi bagi penggunanya melainkan laporan keuangan itu sendiri sebagai penjaga hak-hak para penggunanya.¹⁹ Laporan keuangan syariah memang harus mengandung nilai-nilai yang syar'i, yaitu bebas dari ketidakjelasan (keragu-raguan). Atas dasar latar belakang tersebut di atas, penyusunan usulan penelitian ini diberi judul : **Penerapan Syariah Compliance Sebagai Prinsip Syariah Governance Pada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar.**

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian ini adalah penerapan prinsip syariah pada pengelolaan bank syariah melalui produk-produknya yaitu melihat unsur bunga dengan adanya *time value of money* dalam pembayaran tangguh pada produk *murabahah* (jual beli), unsur ketidakjelasan dengan adanya konsep *accrual basic* dalam pengakuan pendapatan pada produk *mudharabah* (bagi hasil), unsur zalim dengan adanya *substance over form* pada penagggungan biaya perbaikan pada produk ijarah (sewa) dan unsur spekulatif dengan adanya *historical cost* pada dasar penilaian aset tetap (taah dan bangunan) untuk pembayaran zakat serta yang terkait dengan zakat. Adapun dokumen lain (bukti dari keterangan informan dan jurnal/referensi lainnya) yang diperoleh dalam penelitian dijadikan sebagai data pendukung dan panduan untuk

¹⁹ *Ibid.*

menghasilkan informasi yang lebih akurat. Penelitian ini dilakukan pada salah satu bank syariah yang ada di Makassar yaitu Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar. Dipilihnya Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar karena merupakan bank umum pertama yang ada di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah yang didirikan pada tahun 1991 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Sehingga keberadaannya dianggap sebagai perbankan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Sehingga perbankan ini dianggap perlu membangun *syariah compliance* sebagai prinsip utama *syariah governance* dalam operasionalnya. Dimana penelitian ini bermaksud untuk melakukan kajian secara mendalam, bukan untuk generalisasi.

Syariah compliance merupakan bentuk kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip syariah. *Syariah compliance* merupakan bentuk penjabaran pertanggungjawaban perbankan syariah kepada Allah SWT sebagai pemilik utama sumber daya yang digunakan oleh perbankan syariah. Syariah compliance adalah prinsip yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional pada penerapan GCG, yang mana dalam konsep GCG yang dikeluarkan IFSB (*Islamic Financial Service Board*) yang sering disebut dengan *Syariah Governance*. Untuk melihat syariah compliance atau kepatuhan syariah Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar maka penelitian ini dilakukan dengan meneliti penerapan prinsip-prinsip syariah pada bank tersebut.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007) syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai

amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (*al-falah*). Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salah aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik (*good governance*) dan disiplin pasar (*market discipline*) yang baik. Prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan bank syariah yang menjadi karakteristik khususnya pada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar harus terangkum dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dimana pengelolaan yang dimaksud adalah jasa yang diberikan bank syariah pada nasabahnya seperti pengimpunan dan penyaluran dana. Untuk melakukan jasa tersebut maka bank syariah membentuk produk-produk bank syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip bank syariah. Yang mana karakteristik pada masing-masing produk telah termuat pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Prinsip-prinsip syariah yang akan diteliti pada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar, yaitu prinsip *ukhuwah* (persaudaraan), *adl* (keadilan), kemaslahatan (masalah), *tawazun* (keseimbangan) dan universalisme (*syumuliyah*).

1. *Ukhuwah* (persaudaraan) yaitu transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat.
2. *Adl* yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.

3. *Tawazun* adalah keseimbangan yang meliputi aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial serta keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.
4. *Maslahah* adalah segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (thoyib) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.
5. *Alamiyah* adalah sesuatu yang dapat dilakukan dan diterima oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).
6. *Gharar* adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
7. *Maysir* yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti untung dan ruginya.
8. *Riba* adalah pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhil*), atau dalam transaksi pinjam–meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan

dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasiah*).

9. *Zalim* adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

C. Rumusan Masalah

Prinsip utama dalam *syariah governance* yaitu *syariah compliance* yang merupakan bentuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Di mana nilai terpenting dalam syariah yaitu kemaslahatan. Bank syariah pada dasarnya harus menganut prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaannya, namun tidak menutup kemungkinan masih ada perbankan syariah yang tidak sepenuhnya menjalankan prinsip-prinsip syariah. Hal ini tentunya mengindikasikan bahwa kata syariah hanya dijadikan sebagai slogan untuk menarik naabahnya. Dalam hal ini tujuan akuntansi syariah dapat terpenuhi melalui penerapan *syariah compliance*. Syariah compliance atau kepatuhan syariah dapat terpenuhi ketika perbankan syariah menerapkan prinsip syariah secara utuh dalam pengelolaannya yang tentunya akan berdampak pada laporan keuangan perbankan syariah.

Pelanggaran *syariah compliance* akan merusak citra dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada perbankan syariah. Implementasi *Syariah Governance* yang lemah dipengaruhi oleh rendahnya implementasi *syariah compliance* yang dilakukan oleh perbankan syariah. Hal ini di dukung oleh hasil penelitian Ousama *et, al*, bahwa

pengungkapan yang dilakukan oleh perbankan syariah masih sangat rendah.²⁰ Ahmad menjelaskan bahwa lembaga yang menjalankan bisnisnya berdasarkan syariah pada hakekatnya mendasarkan pada filosofi dasar Al-Qur'an dan Sunnah.²¹

Dari pemaparan munculnya masalah di atas terkait dengan masalah kepatuhan bank syariah pada prinsip-prinsip syariah dalam hal ini syariah compliance, maka dapat ditarik rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana penerapan prinsip syariah dalam hal ini *syariah compliance* pada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar terkait penyusunan laporan keuangan?
2. Bagaimana realitas prinsip *ukhuwah, tawazun, universalisme* dan *masalah* dalam mewujudkan tujuan akuntansi syariah dan menyeimbangkan karakteristik laporan keuangan?
3. Bagaimana realitas prinsip *adl* (keadilan) dalam mengungkap konsep dasar yang sesuai dan tidak sesuai dengan akuntansi syariah terkait dengan pembayaran tangguhan pada produk murabahah, pengakuan pendapatan pada produk mudharabah, penilaian aset (tanah dan bangunan) untuk zakat dan pihak penanggung biaya perbaikan pada produk ijarah?

²⁰ Ousama dan Fatima, "Voluntary disclosure by Syariah approved companies: an exploratory study," *Journal of Financial Reporting and Accounting* Vol. 8 No. 1, (2010): h. 45.

²¹ Ahmad dalam Nadia Rahma, *Loc. Cit.*, h. 3.

D. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah dari segi pengelolaan dalam produk-produknya. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Atik Emilia Sula (2010) dengan judul “Reformulasi Akad Pembiayaan Murabahah Dengan Sistem Musyarakah Sebagai Inovasi Produk Perbankan Syariah” menemukan bahwa akad mudharabah yang dilakukan oleh BMT Nuur Ummah Surakarta tidak bertentangan dengan syariah dan mampu memberikan jaminan saling ridho antara keduanya sebab transaksi tidak melalui pihak ketiga.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nur Azizah (2009) dengan judul “Evaluasi Penerapan Prinsip Syariah Pada Praktik Pembiayaan Mudharabah Atau Revenue Sharing (Studi Kasus di kjks BMT Nuur Ummah Surakarta)” menemukan bahwa Rukun, syarat dan ketentuan pembiayaan mudharabah yang diterapkan di BMT Nuur Ummah Surakarta dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Syariah. Selain itu penentuan besar nisbah bagi hasil yang diterapkan telah sesuai dengan Prinsip Syariah karena ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak (shahibul maal dan mudharib) namun nisbah yang terlalu besar memberatkan mudharib yang berpendapatan kecil. Dan alur penyelenggaraan pembiayaan mudharabah yang diterapkan telah sesuai dengan Prinsip Syariah yaitu dilaksanakan sesuai akad (ijab qabul) yang disepakati.

Penelitian yang dilakukan oleh Budi Sukardi dengan judul “Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia” menemukan bahwa inovasi produk yang dilakukan perbankan Islam, harus memiliki keunikan dan

perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Biaya administrasi harus disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat (tidak mahal), memberikan kemudahan bagi masyarakat serta dapat membantu sektor riil (usaha), memberikan kenyamanan bagi stakeholders, produk harus memiliki nilai manfaat serta fasilitas dalam akses teknologi dan informasi untuk lebih memudahkan masyarakat dalam transaksi.

Penelitian yang dilakukan oleh Banindita (2013) dengan judul “Analisis Penerapan Psak 102 Pada Produk Kepemilikan Emas dan Psak 107 Pada Produk Gadai Emas Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank BNI Syariah Yogyakarta)” menemukan bahwa pada produk ijarah, Bank BNI Syariah menerima angsuran pembayaran sewa pada saat manfaat atas aset telah diterima oleh nasabah, manfaat atas aset dalam hal ini adalah jasa penitipan emas yang diberikan bank kepada nasabah. Hal ini sejalan dengan karakteristik ijarah pada PSAK 107.

Penelitian yang dilakukan oleh Rita Andini (2011) dengan judul “Evaluasi Pengakuan Dan Pengukuran Transaksi Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Dalam Konsep Akuntansi Perbankan Syari’ah (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Semarang)” menemukan bahwa prinsip perlakuan pelaksanaan transaksi pembiayaan bagi hasil pada implementasi yang ada pada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Semarang dengan PSAK No.59 tentang Akuntansi Perbankan Syari’ah sudah sesuai, hal ini dapat ditemukan dalam perbandingan-perbandingan yang ada tetapi ada beberapa transaksi yang tercantum dalam PSAK No.59 tidak terdapat dalam pelaksanaan di Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Semarang.

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas adapun tujuan dari penelitian, yaitu untuk

1. mengetahui penerapan prinsip syariah dalam hal ini *syariah compliance* pada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar terkait penyusunan laporan keuangan.
2. mengetahui realitas prinsip *ukhuwah, tawazun, universalisme* dan *masalah* dalam mewujudkan tujuan akuntansi syariah dan menyeimbangkan karakteristik laporan keuangan?
3. Mengetahui realitas prinsip *adl* (keadilan) dalam mengungkap konsep dasar yang sesuai dan tidak sesuai dengan akuntansi syariah terkait dengan pembayaran tangguhan pada produk murabahah, pengakuan pendapatan pada produk mudharabah, penilaian aset (tanah dan bangunan) untuk zakat dan pihak penanggung biaya perbaikan pada produk ijarah?

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentunya dilakukan dengan tujuan untuk memberikan manfaat. Dimana penelitian ini dilakukan dengan melihat kepatuhan perbankan syariah terhadap *syariah compliance* melalui kepatuhan bank syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah maka perbankan syariah akan lebih terarah dalam mengimplementasikan *Syariah Governance*. Adapun dari penelitian ini mempunyai manfaat, baik itu kontribusi teoritis, kontribusi praktis maupun kontribusi regulasi, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Perbankan syariah pada saatnya diperlukan keberadaannya oleh masyarakat. Pada perkembangannya, meskipun perbankan syariah telah melekatkan namanya secara Islami. Namun, pada kenyataannya masyarakat masih belum bisa membedakan perbankan konvensional dan perbankan syariah. Penelitian ini telah membuka wawasan mengenai teori yang mendasari akuntansi syariah, utamanya mengenai tujuan Bank Muamalat sebagai bank syariah yaitu sebagai bank syariah, bank Muamalat harus menjadikan zakat sebagai tujuan utamanya (*zakat-oriented*) dan mengungkap terdapat konsep akuntansi yang tidak sesuai dengan beberapa praktek Bank Muamalat (utamanya dalam transaksi) sebagai bank syariah diantaranya *accrual basic*, *historical cost* dan *substance over form* termasuk prinsip *time value of money*.

Penelitian ini juga menjelaskan sebuah konsep *Good Corporate Governance* melalui perspektif Islam yang dikenal dengan nama Syariah Governance seperti yang dikeluarkan oleh IFSB melalui pemenuhan prinsip *Syariah Compliance*. Yang kemudian menjelaskan untuk mencapai *syariah compliance* maka pengelolaan bank syariah yang akan berdampak pada penyusunan laporan keuangan dalam hal ini konsep dasar akuntansi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang didasarkan oleh filosofi Al-Qur'an dan Sunnah yaitu prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), *kemaslahatan (maslahah)* dan *universalisme (alamiyah)* serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan *objek haram*, yang akan tercermin pada laporan keuangan. Dengan adanya penelitian ini maka nilai-nilai konvensional akan

tergeser pada perbankan syariah. Pada dasarnya penelitian ini mendukung teori masalah dimana pihak perbankan syariah sebagai pengelola sumber daya harus memberikan manfaat atau memberikan kesejahteraan kepada semua pihak, baik itu pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perbankan syariah atau dalam hal ini semua *stakeholders*. Karena pemilik sumber daya yang hakiki adalah Allah SWT di mana pertanggungjawaban kepada-Nya hanya dapat dilakukan melalui masyarakat umum dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, maka perbankan syariah dalam pengelolaannya harus sesuai dengan prinsip syariah, karena sebagaimana tujuan dari prinsip syariah atau *maqashid syari'ah* yaitu untuk mencapai kemaslahatan. Penelitian ini juga mendukung teori kepatuhan, bahwa untuk menyatakan perbankan syariah patuh terhadap prinsip-prinsip syariah/islam maka perbankan syariah harus memenuhi unsur-unsur dalam prinsip syariah sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat sesuai dengan prinsip syariah yaitu bebas dari ketidakjelasan.

2. Manfaat Praktisi

Adanya penelitian ini memberi manfaat terhadap praktek perbankan syariah. Yang menegaskan bahwa untuk mencapai *Syariah Governance* perbankan syariah harus menerapkan *syariah compliance*. Hal tersebut terlihat bahwa perbedaan antara prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah dan perbankan konvensional terletak pada *syariah compliance*. Pada dasarnya penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh perbankan syariah harus menerapkan prinsip-prinsip syariah yang mana hal tersebut akan mendukung implementasi *syariah governance*.

Adanya penelitian ini maka pada prakteknya perbankan syariah dapat menyajikan pertanggungjawabannya yang mengandung kejelasan informasi sehingga keputusan yang dipilih pun dapat bermanfaat bagi semua pihak secara adil. Dengan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maka perbankan syariah dapat mendukung implementasi *syariah governance* yang baik.

3. Manfaat Regulasi

Nilai-nilai Islam yang tercermin dalam prinsip-prinsip syariah memanglah harus menjadi dasar penyusunan standar akuntansi syariah. Dengan adanya penelitian ini maka memberi manfaat bagi pembuatan standar akuntansi syariah. Khususnya dalam penentuan konsep dasar yang sesuai untuk menyusun laporan keuangan lembaga keuangan syariah utamanya dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar.

Penelitian ini membuka kesadaran bagi regulator untuk menentukan standar akuntansi syariah khususnya konsep dasar akuntansi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hal ini karena konsep dasar sangat menentukan penyusunan laporan keuangan dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Teori Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata dasar patuh, yang berarti disiplin dan taat. Kepatuhan adalah form dari pengaruh sosial di mana kegiatan atau tindakan individu merupakan respon dari perintah langsung individu lain sebagai figur otoritas.¹ Kepatuhan terjadi saat seseorang yang memiliki otoritas memerintah untuk melakukan sesuatu. Kepatuhan (*obedience*) didefinisikan sebagai perubahan sikap dan tingkah laku seseorang untuk mengikuti permintaan atau perintah orang lain.² Pendapat lain yang menyatakan bahwa kepatuhan adalah menerima perintah-perintah orang lain.³ Kepatuhan terhadap aturan dalam hal ini prinsip-prinsip syariah/Islam memiliki dimensi-dimensi yang mengacu pada dimensi kepatuhan yaitu mempercayai (*belief*), menerima (*accept*) dan melakukan (*act*).

Dalam pandangan Islam kepatuhan adalah keadaan di mana individu mengikuti perintah-perintah dari sesuatu yang dipandang memiliki otoritas secara sukarela ataupun karena terpaksa dengan tidak menunjukkan pengingkaran. Yang artinya semua item yang menjadi standar kepatuhan harus terpenuhi tanpa ada yang

¹ Mc Leod dalam Budi Sukardi, Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia, *Stainmetro.Ac.Id/E-Journal/Index.ph*, h. 1.

² Feldman (2003) dalam Septi Kusumadewi, Tuti Hardjajani dan Aditya Nanda Priyatama, “Hubungan Antara Dukungan Sosial Peer group dan Kontrol Diri dengan Kepatuhan pada Remaja Putri di Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Sukoharjo”, *candrajiwa.psikologi.fk.uns.ac.id*, h. 3.

³ Blas (1999) dalam Septi Kusumadewi, *Ibid*.

dihilangkan. Kepatuhan (*compliance*) memiliki arti mengikuti suatu spesifikasi, standar atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An-Nisa/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang Kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁴

Jika dikaitkan dengan perbankan syariah yang berdasarkan pada nilai-nilai syariah maka perbankan syariah harus menjalankan operasinya sesuai dengan amanah yang terkandung dalam prinsip-prinsip syariah dan memberlakukan aturan/hukum secara adil dalam perbankan syariah. Tentunya perbankankan syariah memiliki landasan untuk menjalankan operasinya sesuai dengan syariah. Maka dari itu prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan pengelolaan bank syariah harus dipatuhi untuk menjamin bahwa laporan keuangan bank syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga ketika prinsip syariah telah terpenuhi maka maqashid syari’ah juga akan tercapai yaitu kemaslahatan.

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. II; Solo: 2011), h. 87.

Kepatuhan dalam prinsip syariah merupakan unsur terpenting dalam laporan keuangan perbankan syariah. Kepatuhan terhadap syari'at Islam yang berarti perbankan syariah wajib memenuhi atau menaati semua unsur yang menunjukkan bahwa bank syariah telah menjalankan syari'at Islam dalam hal ini prinsip syariah.

Kepatuhan perbankan syariah ditunjukkan dengan kepatuhannya memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatan usahanya sebagaimana yang tercantum dalam UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah/Islam dilihat melalui seberapa besar bank syariah mampu dapat melakukan pengelolaan sesuai dengan prinsip syariah. Adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah tentunya akan berdampak pada penyajian laporan keuangannya sehingga membantu perbankan syariah dalam membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada perbankan syariah.

B. Konsep Maslahah

Maqashid al-syariah adalah tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Di mana tujuan dari dirumuskannya hukum-hukum Islam yaitu untuk mencapai suatu kemaslahatan manusia. Kata maslahah yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan maslahat, berasal dari Bahasa Arab yaitu maslahah. Maslahah ini secara bahasa atau secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Teori *maslahah* atau istilahnya pertama

kali diperkenalkan oleh Imam Malik (W. 97 H.).⁵ Masalah merupakan cara untuk pengambilan keputusan.⁶

*“All concerns that promote the subsistence of human life, the completion of man's livelihood and the acquisition of all his physical and intellectual qualities which are required for him.”*⁷

Syari'at pada prinsipnya mengacu kepada kemaslahatan manusia. Tujuan utama syari'at Islam (*maqashid al-syari'ah*) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Qaradhawi menyatakan: “di mana ada kemaslahatan, di sanalah terdapat hukum Allah. Tujuan mencapai kemaslahatan kahidupan yang bernuansa ekologis” adalah sesuatu yang ingin dituju oleh fikih lingkungan, yaitu kehidupan semua makhluk Tuhan.⁸ Hal ini menggambarkan aksiologi fikih lingkungan yang akan mengatur agar semua sepesies makhluk Tuhan dapat hidup dalam *space* alam yang wajar sehingga akan memberikan daya dukung optimum bagi kehidupan bersama yang berprikemakhlukan, *rahmatan lil al-'alamin*.⁹ Dalam hal ini perbankan syariah tidak

⁵ M.Hum Mahmuzar, “Maslahah-Mursalah; Suatu Methode Istinbath Hukum”, http://fush.uin-suska.ac.id/attachments/073_Mahmuzar.pdf, h. 4.

⁶ Asyraf Wajdi Dusuki and Nurdianawati Irwani Abdullah, “Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility”, *The American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 24, No. 1, h. 32.

⁷ Al Shatibi dalam Amir Shahrudin, “Maslahah-Mafsadah Approach in Assessing the Shari'ah Compliance of Islamic Banking Products”, *International Journal of Business and Social Science*. Vol. 1 No. 1, (2010): h. 132.

⁸ Ahmad Thohari, “Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalah”, *Az Zaqqa'*, Vol. 5, No. 2, (2013): h. 147.

⁹ *Ibid.*, h. 150.

hanya menguntungkan shareholder saja tetapi juga menguntungkan semua umat termasuk itu lingkungan. Karena dalam syariat Islam ketika masalah telah dirasakan oleh semua pihak berarti perbankan syariah tidak hanya mementingkan kehidupan di dunia saja melainkan mementingkan kehidupan di akhirat juga. Karena tujuan dari hidup yang sesungguhnya bukan hanya materi di dunia semata, tetapi kebahagiaan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah/2:195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٩٥)

Terjemahan:

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.¹⁰

Dalam surah tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*). Kehadiran manusia seharusnya dapat menjadi manfaat bagi makhluk Allah SWT lainnya (sesamanya). Jika dikaitkan dengan kehadiran perbankan syariah, maka kehadiran perbankan syariah harusnya dapat memberi manfaat baik kepada pihak yang terlibat maupun yang tidak terlibat.

Konsep *maslahah* memberikan gambaran bahwa perusahaan tidak hanya semata-mata berorientasi terhadap keuntungan, melainkan harus berusaha untuk memajukan kesejahteraan sosial dan protektif terhadap kebutuhan masyarakat secara

¹⁰ *Loc. Cit.*, h. 30.

keseluruhan. *Maslahah* merupakan tujuan dari penerapan prinsip-prinsip syariah. Ada 3 kategori masalah berdasarkan tingkatannya, yaitu *essentials (daruriyyat)*, *complementary (hajjiyyat)*, dan *embellishment (tahsiniyyat)*.¹¹ *Maslahah Dharuriyah* adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang bila di tinggalkan, maka rusaklah kehidupan, merajalelalah kerusakan, timbulah fitnah dan kehancuran yang hebat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Maslahah Hajjiyah* ialah, semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada *masalahah dharuriyah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. Sedangkan *Maslahah Tahsiniyah* ialah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak. Namun dalam hal ini masalah yang lebih difokuskan adalah masalah dalam harta/mal (*masalahah daruriyyat*). Namun bukan berarti lingkup masalah lainnya menjadi penting karena ketiga lingkup tersebut sangat diperlukan bagi umat dalam menciptakan kebaikan, seperti halnya *masalahah hajjiyah* dan *masalahah tahsiniyah*.

Kemaslahatan dilihat dari dua sudut pandangan, yaitu (1) *maqasid al-syari'* (tujuan Tuhan), dan (2) *maqasid al-mukallaf* (tujuan mukallaf). Yang berarti bahwa masalah merupakan *maqasid al-syari'* atau tujuan dari ditetapkan prinsip

¹¹ Muslimin Kara, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah", *ASSETS*, Vol. 2, No. 2, (2012), h. 178.

syariah.¹² *Maqashid al-syariah* dalam arti *maqashid al-Syari'*, mengandung empat aspek, yaitu:

1. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syariat sebagai suatu hukum *takfif* yang harus dilakukan, dan
4. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat maqasid al-syari'ah, sedangkan aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa, agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang keempat berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai *mukallaf* di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah (aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu).

Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya lebih sebagai penunjang aspek pertama sebagai aspek inti, namun memiliki keterkaitan dan menjadi rincian dari aspek pertama. Aspek pertama sebagai inti dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif (pembebanan hukum kepada para hamba) sebagai aspek ketiga. *Taklif* tidak dapat dilakukan tanpa memiliki pemahaman, baik dimensi lafal maupun maknawi

¹² Al-Syatibi dalam La Jamaa, "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syari'ah", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 45 No. II, (2011): h. 1256.

sebagaimana aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan *taklif* dapat membawa manusia berada di bawah lindungan hukum Tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu, sebagai aspek keempat. Dalam keterkaitan itulah tujuan diciptakannya syariat, yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, sebagai aspek inti, dapat diwujudkan.

Konsep *maslahah* adalah konsep yang sangat penting dalam kehidupan perbankan syariah ataupun lembaga yang berada di bawah naungan syariah, karena selain pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang terlibat dengan pengelolaan bank, bank syariah juga harus mempertanggungjawabkan pengelolaan bank kepada Allah SWT sebagai pemilik utama sumber daya yang digunakan dalam pengelolaannya dan sebagai pemberi dan yang menetapkan hukum. Yang berarti apa yang diperbuat oleh perusahaan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dengan aktivitas operasi perusahaan, hal ini tentunya sejalan dengan tujuan dari syari'at Islam yaitu kemaslahatan..

Prinsip *maslahah* mencerminkan bagaimana Islam menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan umum daripada kepentingan individual semata.¹³ Penerapan prinsip *maslahah* pada dasarnya adalah sebuah cara untuk memberikan manfaat bagi kepentingan umum atau mencapai kesejahteraan umum dan menghindari bahaya yang dapat memberikan kesulitan untuk kepentingan umum atau pencapaian kesejahteraan.

¹³ Amir Shahrudin, *Loc.Cit.*, h. 133.

C. Tujuan Laporan Keuangan Menciptakan Maqashid Syariah

Akuntansi sebuah proses yang menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan tidak hanya mengandung data-data keuangan saja. Tetapi dibalik penyusunannya ada sebuah cerita atau *history* yang terangkum di dalamnya. Laporan keuangan merupakan hal yang sangat urgent dalam perusahaan. Laporan keuangan menunjukkan bagaimana perusahaan mengelola keuangan mereka. Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang sangat penting dalam menilai perkembangan perusahaan.¹⁴ Laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai prestasi yang dicapai perusahaan pada saat lampau, sekarang dan rencana pada waktu yang akan datang. Hal serupa juga diungkapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 101) bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Sehingga hasil akhir dari laporan keuangan adalah sebagai pertanggungjawaban.

¹⁴ Hendry Andres Maith, “Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pt. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk”, *Jurnal EMBA*, Vol.1 No.3, (2013), h: 620.

Laporan keuangan untuk perbankan syariah adalah laporan keuangan yang menunjukkan kepatuhan pada prinsip syariah. Dimana *Maqashid Syariah* atau tujuan dari penetapan prinsip-prinsip syariah adalah untuk mencapai *kemaslahatan*. Yang artinya laporan keuangan harus mendukung informasi yang dibutuhkan oleh semua pihak yang berkepentingan, baik itu stakeholder maupun shareholder dan laporan keuangan juga harus disusun dan disajikan sesuai dengan penetapan prinsip syariah pada pengelolaannya. Karena pengelolaan pada bank syariah nantinya akan berdampak pada penyusunan dan penyajian laporan keuangan karena sejatinya penerapan prinsip syariah pada bank syariah merupakan karakteristik bank syariah yang nantinya akan berdampak pada laporan keuangan bank syariah. Tujuan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi setiap pengguna. Tujuan tersebut tentunya harus sejalan dengan tujuan penerapan prinsip-prinsip syariah yaitu masalah. Hal ini tentunya mengindikasikan bahwa penyajian laporan keuangan bank syariah harus memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak.

Laporan keuangan adalah laporan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan berupa neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal yang merupakan catatan transaksi perusahaan dan perkembangan perusahaan selama periode tertentu. Dalam hal definisi laporan keuangan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah tentunya memiliki perbedaan, hal ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan dari segi penyajiannya. Laporan keuangan perbankan syariah diidentikkan dengan adanya laporan pertanggungjawaban yang menunjukkan tanggung jawab perbankan kepada masyarakat umum dan lingkungan yang berupa pertanggungjawaban sosial

sebagai pertanggungjawaban perbankan kepada Allah SWT sebagai pemilik utama sumber daya yang digunakan.

Laporan keuangan (*Financial Statement*) perusahaan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan perusahaan pada dasarnya selalu berusaha untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan dan hasil operasi suatu entitas, badan usaha, atau organisasi.¹⁵ Tentu penyajian laporan keuangan harus disesuaikan oleh para penggunanya dan laporan keuangan tidak memihak pada kepentingan salah satu kepentingan saja. Jadi, laporan keuangan adalah output dari proses akuntansi yang berisi informasi untuk para pengguna yang sifatnya tidak memihak (adil) yang dijadikan sebagai alat ukur untuk pengambilan keputusan bagi para penggunanya baik itu stakeholder maupun shareholder.

Dimana laporan keuangan pada bank syariah memiliki standar yang tersendiri yang tentunya berbeda dengan penyajian laporan keuangan bank konvensional, yaitu berdasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 bahwa laporan keuangan untuk lembaga-lembaga syariah termasuk perbankan syariah meliputi 1) Neraca, 2) laporan Laba rugi, 3) laporan perubahan ekuitas, 4) Laporan Arus Kas, 5) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, 6) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan dan 7) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan perbankan syariah menurut PSAK No. 101 harus menyajikan komponen-komponen laporan keuangan secara wajar. Penyajian laporan keuangan menurut

¹⁵ Yuyun Iriani Pujiastuti., “Analisis atas Ketaatan Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka Di Indonesia,” *Jurnal Penelitian*, (2009): h. 3.

PSAK No. 101 tentunya menunjukkan bahwa lembaga syariah termasuk perbankan syariah tidak hanya menunjukkan pertanggungjawabannya kepada shareholder saja tetapi juga kepada stakeholder sebagai pertanggungjawaban kepada Allah SWT sebagai pemilik utama sumber daya yang digunakan.

Transaksi merupakan awal dari siklus akuntansi. Setiap transaksi akan mempunyai dampak tersendiri dalam laporan keuangan. Konsep dasar akuntansi yang dipilih akan menentukan perlakuan terhadap transaksi-transaksi tersebut. Sehingga laporan keuangan akan tersusun sesuai dengan konsep dasar tersebut. Laporan keuangan dalam suatu perbankan syariah menunjukkan pengelolaan dari setiap transaksi-transaksi yang terjadi. Hal ini menegaskan bahwa betapa pentingnya konsep dasar yang digunakan oleh perbankan syariah bukan hanya dari segi transaksinya tetapi konsep dasar yang menjadi landasan penyusunan laporan keuangan yang dipilih harus sesuai dengan nilai-nilai syariah.

1. Satuan Mata Uang (Unit Moneter)

Penggunaan uang sebagai alat perhitungan dalam lingkungan yang memiliki tingkat inflasi tinggi sangat dipertanyakan.¹⁶ Karena inflasi tidak menunjukkan nilai keadilan sebagaimana yang diperintahkan dalam Islam. Hal tersebut memunculkan bahwa emas dan perak merupakan solusi untuk menggantikan satuan mata uang. Penggunaan emas dan perak sebagai alat ukur karena kedua komoditas tersebut memiliki nilai yang konsisten dan penentuan nisab zakat juga menggunakan

¹⁶ Ahmed dalam Sri Nurhayati dan Wasilah, “*Akuntansi Syariah di Indonesia (Edisi 2)*”, Salemba Empat, Jakarta, (2009), h. 103.

komoditas tersebut.¹⁷ AAOIFI menerima konsep ini yang menyatakan bahwa uang seharusnya dinilai pada jumlah uang tanpa melihat perubahan nilai uangnya.

2. Dasar Akrua (Accrual Basic)

Konsep accrual basic atau dasar akrual mengatakan bahwa pengakuan pendapatan dilakukan saat suatu manfaat itu diperoleh, bukan pada saat kas diterima. Hal tersebut tentunya menegaskan sebagaimana Mazhab Maliki bahwa *accrual basic* tidak dapat digunakan sebagai cara menghitung zakat mengingat zakat harus dibayar berdasarkan kekayaan yang telah diterima manfaatnya.¹⁸ Dan menurut mazhab Syafi'i bahwa bagi hasil mudharabah didasarkan atas keuantungan kas yang diterima.¹⁹

3. Substansi Mengungguli Bentuk (*Substance Over Form*)

Konsep ini diadopsi oleh akuntansi bahwa hakekat dari suatu transaksi lebih penting dari bentuk hukum transaksi itu sendiri. Sebagaimana yang diterapkan pada akuntansi konvensional yaitu capital leasing. Ketentuan tersebut menentang syariah karena transaksi didasarkan atas akad dan akad tersebut akan selalu sama antara bunyi akad (dalam bentuk hukum) dengan substansi dari akad itu sendiri.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, h. 105.

¹⁹ *Ibid.*

4. *Historical Cost*

Metode penilaian *historical cost* yang dianggap tidak memberikan informasi yang relevan bagi investor apalagi pada masa inflasi. *Historical cost* secara implisit mengakui adanya *time value of money*.²⁰ Adanya *time value of money* karena adanya *uncertainty condition*. Penolakan akuntansi syariah terhadap *uncertainty condition* dalam konteks *time value of money* atau *interest* karena di dalamnya terkait perilaku *riba* yang disebabkan oleh *gharar*. *Gharar* sendiri merupakan bentukan *riba* paling akut dalam sistem ekonomi dan keuangan, bahkan akuntansi.²¹

D. *Syariah Governance dan Good Corporate Governance*

Corporate Governance sering diartikan sebagai perlindungan terhadap investor. Perlindungan yang dimaksud yaitu jaminan bahwa para penyedia modal akan memperoleh pengembalian atas dana yang tertanam dalam perusahaan. namun sekarang istilah CG sudah berkembang menjadi lebih luas sesuai dengan syariat islam. Bahwa pertanggung jawaban bukan hanya kepada pemegang saham saja, tetapi perusahaan/perbankan syariah juga bertanggung jawab kepada pemilik sumber daya utama sebagai pencipta yaitu Allah SWT (Tuhan Yang Maha Pencipta). *Corporate Governance* (CG) adalah:

²⁰ Ery Wibowo, "Dimensi Keadilan Dalam Epistimologi Akuntansi Syariah", *Value Added*, Vol.3, No.2, (2007), h. 18.

²¹ Aji Dedi Mulawarman, "Menggagas Laporan Arus Kas Syari'ah Berbasis Ma'isyah: Diangkat Dari Habitus Bisnis Muslim Indonesia", *Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makassar*, (2007),h. 3.

*“set of relationships between a company’s management, its board, its shareholders and other stakeholders”.*²²

Dari definisi tersebut dapat dinyatakan bahwa ada hubungan yang saling terkait antara manajemen perusahaan, dewan, pemegang saham dan stakeholder lainnya. Sebagai pihak yang diberi amanah memang manajemen perusahaan mempunyai tanggung jawab yang besar kepada semua pihak-pihak tersebut. Manajemen perusahaan juga harusnya mementingkan masyarakat dan lingkungannya, karena masyarakat dan lingkungan tempat berdirinya perusahaan yang menerima dampak dari operasi perusahaan utamanya jika perusahaan tersebut adalah perusahaan industri.

CG dalam pendekatan Islami, dari fungsi obyektifnya *corporate governance* islami harus membawa konsepsi perlindungan dan hak semua stakeholder ke dalam semua aturan syariah, itu berarti perusahaan harus menempatkan *maqasid syari’ah* sebagai tujuan akhir.²³ *Corporate governance* yang mengandung nilai-nilai Islam tidak lepas dengan prinsip kejujuran dan keadilan terhadap semua *stakeholder*. Untuk lebih menciptakan *good corporate governance* yang islami tentunya perusahaan tidak hanya melihat kepentingan *stakeholder* semata akan tetapi perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan atau akuntabilitasnya kepada seluruh pemegang saham atau dalam hal ini shareholder. Artinya perusahaan tidak boleh memihak

²² Chapra dan Ahmad dalam Racha, Ghayad, “Corporate Governance and The Global Performance of Islamic Banks”, *Humanomics*. Vol. 24, Iss: 3. (2012): h. 209.

²³ Hasan (2009) dalam Bayu Tri Cahya, “Kilas Kebijakan Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. VII, No. 1, (2013): h. 19.

dalam penyampaian informasi untuk mencapai akuntabilitas yang islami atau akuntabilitas islam. Dengan ditegakkannya akuntabilitas Islam dalam perusahaan maka akan mendukung tercapainya kemaslahatan bersama. Hal tersebut menegaskan bahwa tujuan dari corporate governance adalah untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh stakeholder melalui penciptaan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar.²⁴

Konsep GCG yang dikeluarkan oleh *Islamic Financial Service Board (IFSB)* yang sering disebut dengan *syariah governance* sebagian besar memiliki prinsip-prinsip yang sama dengan GCG konvensional.²⁵ Dalam konteks bisnis syariah, pelaksanaan *Good Corporate Governance* merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.²⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33 /PBI/2009 tentang *Syariah Governance* sebenarnya memiliki prinsip yang sama dengan *Corporate Governance*, hanya saja yang membedakan yaitu *syariah compliance* atau kepatuhan syariah. Menurut IFSB *syariah governance* didefinisikan bahwa lembaga keuangan Islam harus memiliki Pengawas Independen atau Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang tugasnya memberikan pengawasan apakah lembaga

²⁴ M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, PT Bumi Aksara, Jakarta Timur, (2008), h. 18.

²⁵ Agustianto (2008) dalam Andik S. Dwi Saputro, *Loc. Cit.* H.6.

²⁶ *Ibid.*, h. 7.

keuangan Islam telah melakukan kegiatan operasinya sesuai dengan kepatuhan syari'ah.

Good Corporate Governance (GCG) adalah pengaturan dan hubungan institusional yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan. Tujuan GCG pada dasarnya memberikan nilai tambah kepada semua pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat umum dan lingkungan. *Corporate governance* merupakan suatu konsep yang tujuannya untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengawasan kerja/kinerja manajemen dan jaminan akuntabilitas manajemen terhadap shareholders dan stakeholders dengan berlandaskan pada peraturan. Oleh karena itu apabila konsep ini diterapkan dengan baik maka kinerja perusahaan akan meningkat sehingga aspek ekonomi pun ikut meningkat sehingga hal tersebut menguntungkan semua pihak, tetapi tanpa melupakan tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT sebagai pemilik utama sumber daya yang ada di dunia ini.

Implementasi *Good Corporate Governance* dan *Syariah Governance* pada dasarnya mengarahkan perusahaan/lembaga untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Hanya saja yang membedakan keduanya yaitu dari prinsipnya. Secara umum prinsip GCG untuk perbankan konvensional, seperti, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran merupakan prinsip yang juga harus ada pada perbankan syariah, yang membedakan yaitu kepatuhan kepada syariah (*syariah compliance*). Dimana tujuan *syariah compliance* yaitu untuk mencapai

kemaslahatan, yang artinya bahwa perbankan syariah harus melakukan pengelolaan secara adil yang memberikan manfaat kepada semua pihak.

E. Syariah Compliance Sebagai Prinsip Utama Syariah Governance

Syariah compliance merupakan salah satu bentuk kepatuhan perusahaan khususnya perbankan syari'ah terhadap prinsip-prinsip syari'ah. Shari'ah compliance adalah indikator *Islamicity Disclosure Index* (IDI) yang relevan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyediaan informasi kepatuhan syariah. Pernyataan tersebut didukung oleh para akuntan dan manajer bank syari'ah.²⁷ *Syariah compliance* memperkuat mekanisme kepatuhan syari'ah dan memastikan bahwa semua peraturan perbankan syariah relevan dipenuhi. *Syariah compliance* merupakan salah satu bentuk pengendalian untuk menuntun apakah lembaga syari'ah telah menjalankan prinsip-prinsip syari'ah. Menurut *Islamic Banking Institutions* (IBI) (2008) *Syariah Compliance* didefinisikan sebagai berikut:

“a system of compliance having special emphasis on Syariah aspects with relevant provisions of existing laws, rules, regulations, policies and procedures related to Islamic Banking need to be embedded in the IBI's processes in such a manner that monitoring and reviewing of issues related to Syariah compliance forms part of internal control structure”.

Syariah Compliance tidak terlepas dengan nilai-nilai Islam. Hal ini berarti pengungkapan yang dilakukan terhadap informasi yang ada pada perusahaan harus berlandaskan dengan prinsip-prinsip Islam. Kepatuhan syariah atau *syariah compliance* berarti mengikuti standar atau hukum yang telah diatur lembaga syariah

²⁷ Asrori, *Loc. Cit.*, h. 6.

yang berwenang menekankan kepatuhan syariah atau kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS az-Zariyat/51: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [٥٦]

Terjemahan:

"Dan Aku tidak menciptakan jin & manusia kecuali untuk menyembah ('ibadah) Ku".²⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia utamanya yang sesuai dengan nilai-nilai syariah pada hakekatnya adalah suatu ibadah kepada Allah SWT. Sama halnya dalam suatu perusahaan ketika perusahaan telah menjalankan aktivitas operasi usahanya sesuai dengan nilai-nilai Islam maka aktivitas tersebut bernilai ibadah kepada Allah SWT selama dilakukan dengan keikhlasan dan ketulusan. Hal ini melahirkan perspektif tersendiri bagi Islam, bahwa Islam ada di tengah-tengah umat manusia sebagai solusi dalam menghadapi berbagai kesulitan/masalah. Islam menjadi solusi dalam sistem kehidupan di mana masalah manusia dapat diatasi dengan perspektif kebenaran yang berbeda dan dengan cara terbaik untuk mengembangkan keadilan yang manusiawi pada berbagai tingkat eksistensi, individu, nasional dan internasional.²⁹

²⁸ *Loc. Cit.*, h. 523.

²⁹ Maududi dalam Eka Widiastuti, "Kepatuhan Syariah dalam Membangun Identifikasi Islamic Brands", *sebi-community.blogspot.com*.

Syariah compliance adalah elemen tata kelola perusahaan (*good corporate governance-GCG*) yang sentral dalam institusi syariah.³⁰ Yang berarti tata kelola yang baik pada perusahaan adalah tata kelola yang menerapkan kepatuhan syari'ah atau syariah compliance khususnya dalam lembaga keuangan syari'ah. Dalam syariah compliance nilai-nilai Islam menjadi karakteristik pada bentuk tata kelola perusahaan yang berbasis Islam.

Syariah compliance sebagai prinsip utama *Syariah Governance* yang merupakan prinsip pembeda dengan lembaga konvensional. Tujuan dari *syariah compliance* (kepatuhan terhadap syariah) atau *Maqashid as-Syariah* itu sendiri adalah kemaslahatan. Untuk mencapai kemaslahatan perbankan syariah harus bertanggung jawab kepada semua pihak yang menunjukkan pertanggungjawaban kepada Allah SWT, melalui penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

F. Prinsip Syariah Pada Pengelolaan Bank Syariah Berlandaskan Sumber Hukum Islam

Al-Qur'an mengandung konsep hukum. Al-Qur'an sebagai hukum Allah SWT tentunya memiliki karakteristik yang ideal dalam mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Begitu juga dengan hadist sebagai penjelas (bayan) terhadap al-Qur'an mengandung aturan-aturan hukum syariah yang pada dasarnya mengarah kepada kepentingan manusia. Syariat Islam adalah ajaran-ajaran Ilahi yang disampaikan kepada manusia lewat wahyu. Hukum-hukum yang dikandung dalam syariat Islam

³⁰ Pramono (2007) dalam Sepkymardian, "Studi Eksplorasi Pengungkapan Penerapan Prinsip Syariah di Bank Syariah", *SEBI Islamic Economics & Finance Journal*, Vol. 04, No.1, (2013)

pada hakikatnya berasal dari Al-Qur'an dan Hadist melalui pemikiran manusia. Hal itu berarti hukum Islam atau prinsip syariah tidak lahir begitu saja dari pemikiran manusia tetapi melalui pemikiran manusia yang berlandaskan pada sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Karena pemikiran manusia maksimal hanya berfungsi memahami kandungan syariat, atau menemukan tafsirannya serta cara penerapannya dalam kehidupan, tetapi syariat itu sendiri berasal dari Allah. Oleh karena itu syariat Islam tidak dapat dilepaskan dari landasan filosofis imani.

Al-Qur'an dan Hadist menjadi poin yang sangat penting dalam kesadaran spiritual dan intelektual muslim.³¹ Bukan hanya karena Al-Qur'an dan hadist menjadi sumber pokok ajaran Islam, tetapi Al-Qur'an dan Hadist juga sebagai tambang informasi bagi pembentukan budaya Islam. Tentunya peranan Hadist menjadi sangat penting, karena merupakan salah satu sumber hukum Islam setelah al-Qur'an. Selain itu, ijtihad juga merupakan sumber hukum karena sebagai alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa sumber utama hukum Islam yang terwujud dalam prinsip-prinsip syariah Islam yang digunakan sebagai dasar bagi pengelolaan yang menjadi karakteristik bank syariah yang akan berdampak pada penyajian laporan keuangan, yaitu

1. Al-Qur'an

³¹ Masiyan Makmun Syam, „Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual Terhadap Sunnah Nabi (Studi Kritis Atas Pemikiran Syaikh Muhammad Al-Ghazali)”, *Jurnal Al Hikmah*, Vol. XV No. 1, hal. 1, (2014); h. 1.

Al Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Salah satu hukum yang diatur dalam *Al-Qur'an* yaitu muamalah. Khususnya dalam hal ini yaitu hukum dalam bidang perekonomian.

Bagi umat Islam yang beriman kepada *Al-Qur'an* tidak pernah meragukan kebenarannya. Kepercayaan umat Islam terhadap kebenaran *Al-Qur'an* sebagai sumber hukum yang utama adalah berdasarkan firman Allah SWT dalam QS al-Baqarah:2.

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (٢)

Terjemahan:

“Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa”.³²

2. *Hadits*

Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah *Al Qur'an*. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam haditsnya. Umat Islam diperintahkan oleh Allah SWT untuk memedomani *as-Sunnah/al-Hadits* adalah berdasarkan firman Allah SWT dalam QS al-Hasyr/59:7 sebagai berikut:

³² *Loc.Cit.*, h. 2.

... بَيْنَ الْأَعْيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)

Terjemahan:

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah SWT amat keras hukuman-Nya”.³³

3. *Ijtihad*

Ijtihad ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapanannya, baik dalam Al Qur'an maupun Hadits, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Oleh karena itu *ijtihad* merupakan sumber hukum Islam yang ketiga. Dasar hukum bagi *ijtihad* sebagai sumber hukum adalah al-Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud sebagaimana di bawah ini:

عَنْ أَنَسٍ مِّنْ أَهْلِ حَمَصٍ مِّنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُؤ. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَدْرَهُ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لَمَّا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ (رواه ابوداود)

Terjemahan:

“Diriwayatkan dari penduduk Homs, sahabat Mu'adz ibn Jabal, bahwa Rasulullah saw. Ketika bermaksud untuk mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bertanya: apabila dihadapkan kepadamu satu kasus hukum, bagaimana kamu memutuskannya? Muadz menjawab: Saya akan memutuskan berdasarkan Al-Qur'an. Nabi bertanya lagi: Jika kasus itu tidak kamu temukan dalam Al-Qur'an? Mu'adz

³³ *Ibid.*, h. 546.

menjawab: Saya akan memutuskannya berdasarkan Sunnah Rasulullah. Lebih lanjut Nabi bertanya: Jika kasusnya tidak terdapat dalam Sunnah Rasul dan Al-Qur'an? Mu'adz menjawab: Saya akan berijtihad dengan seksama. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Mu'adz dengan tangan beliau, seraya berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridloi-Nya." (HR.Abu Dawud)".³⁴

Pengelolaan bank syariah dalam hal ini dimaksudkan yaitu kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/ 16/ PBI/ 2008 pada pasal 2 ayat 2 bahwa "Dalam melaksanakan jasa perbankan melalui kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank, bank wajib memenuhi Prinsip Syariah".³⁵

Sumber hukum baik itu Al-Qur'an, Hadist maupun ijtihad menjadi dasar bagi terbentuknya prinsip-prinsip atau hukum syariah yang harus dijalankan oleh bank syariah. Dimana semua prinsip-prinsip tersebut harus dijalankan oleh bank syariah karena merupakan hukum Allah SWT yang tujuannya untuk mencapai kemaslahatan. Tentunya prinsip syariah yang dijalankan oleh bank syariah akan berdampak pada laporan keuangan bank syariah yang merupakan pertanggungjawaban atas semua aktivitas perekonomian. Oleh karena itu operasional bank syariah harus sesuai dengan Al-Qur'an, Hadist dan ijtihad. Hal itu tentunya terwujud jika bank syariah berpatokan pada prinsip syariah dalam menjalankan perbankan syariah.

³⁴ Sutan Remy Sjahdeini, "*Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*", Jakarta, (2014), h. 13-14.

³⁵ Nur Azizah, "Evaluasi Penerapan Prinsip Syariah Pada Praktik Pembiayaan Mudharabah Atau Revenue Sharing (Studi Kasus Di Kjs Bmt Nuur Ummah Surakarta)", *eprints.uns.ac.id/5757/1/106662710200908231.pdf*, (2009): h. xxxiii.

G. Prinsip-Prinsip Syariah Sebagai Asas Transaksi Syariah Pada Bank Syariah

Prinsip syariah merupakan karakteristik bank syariah yang melekat dan diterapkan pada pengelolaan bank syariah. Karakteristik tersebut akan tercermin dari laporan keuangan bank syariah. Hal ini berarti pengelolaan bank syariah akan berdampak pada penyajian laporan keuangan. Hal itu karena laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari bank syariah atas pengelolaan aktivitas ekonomi bank syariah. Oleh karena itu, penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah harus mencerminkan bahwa bank syariah telah berdasarkan pada karakteristik bank syariah.

Sebagaimana dinyatakan bahwa karakteristik bank syariah harus terangkum dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah dalam hal ini penerapan prinsip syariah melalui pengelolaan bank syariah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/ 16/ PBI/ 2008 pada pasal 2 ayat 3 dijelaskan bahwa pemenuhan Prinsip Syariah harus dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah) dan universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan objek haram. Namun dalam penelitian ini akan difokuskan pada prinsip ukhuwah (persaudaraan), prinsip adl dengan melihat apakah bank syariah telah menghindari unsur riba yang sejalan dengan prinsip ta'awun, unsur zalim, unsur gharar, unsur maysir, sedangkan unsur haram dapat dikategorikan bahwa ketika bank telah menjauhi unsur riba, maysir dan gharar maka unsur haram telah tiada. Hal demikian karena karena prinsip tersebut akan disesuaikan dengan konsep

dasar penyusunan laporan keuangan. Selain itu prinsip tawazun, universalisme dan masalah juga menjadi prinsip yang harus dijalankan perbankan syariah.

1. Prinsip *Ukhuwah* (persaudaraan)

Prinsip tersebut menjelaskan bahwa transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al-Hujurat/49:10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠)

Terjemahan:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”.³⁶

2. Prinsip *Adl* (keadilan)

Esensi dari prinsip adl menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.³⁷ Dalam penelitian ini keadilan dapat tercapai ketika transaksi bank syariah terbebas dari unsur gharar, maysir, riba dan zalim. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al-Maidah/5: 8.

³⁶ *Loc. Cit.*, h. 516.

³⁷ Sutan Remy Sjahdeini, “Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya”, Cetakan ke – 1, 2014, h. 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah SWT, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada Allah SWT Mahateliti apa yang kamu kerjakan”.³⁸

Implementasi keadilan dalam kegiatan bank syariah berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur:

- a. *Riba* (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, atau kepastian penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) yaitu transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan penerima fasilitas pengembalian dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasiah).³⁹ Esensi riba adalah setiap tambahan pada pokok piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam serta derivasinya dan transaksi tidak tunai lainnya, dan setiap tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi pertukaran antar barang-barang ribawi termasuk pertukaran uang (money exchange) yang sejenis secara tunai maupun

³⁸ *Loc. Cit.*, h. 108.

³⁹ Sutan Remy Sjahdeini, “Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya”, Cetakan ke – 1, 2014, h. 130.

tangguh dan yang tidak sejenis secara tidak tunai. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ali Imran/3: 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.⁴⁰

- b. *Kezaliman* (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan) atau transaksi yang akadnya timpang artinya hanya menentukan hak-hak pihak yang berposisi kuat (bank) dan kewajiban bagi pihak yang posisinya lemah (nasabah).⁴¹ Dalam hal penentuan kewajiban bagi pihak penanggung biaya perbaikan dalam produk ijarah bank syariah. Esensi kezaliman (dzulm) adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai posisinya. Kezaliman dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya sebagian, atau membawa kemudharatan bagi salah satu pihak atau pihak-pihak yang melakukan transaksi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Hud/11:18.

⁴⁰ *Loc.Cit.*, h. 66.

⁴¹ *Loc.Cit.*, h. 131.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (١٨)

Terjemahan:

“Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, “Orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka,” Ingatlah, laknat Allah (ditimpahkan) kepada orang yang zalim”.⁴²

- c. *Maysir* (unsur judi dan sikap spekulatif). Esensi masyir adalah setiap transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak berkaitan dengan produktivitas serta bersifat perjudian (gambling).⁴³ Dalam hal ini spekulatif dalam penentuan jumlah pembayaran zakat sebagai kewajiban bank syariah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al-Maidah/5: 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.⁴⁴

- d. *Gharar* (unsur ketidakjelasan). Esensi gharar adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan

⁴² *Ibid.*, h. 223.

⁴³ *Loc.Cit.*, h. 130.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 123.

akad. Artinya ada transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.⁴⁵ Dalam hal ini pengakuan pendapatan pada transaksi mudharabah bisa saja mengandung ketidakjelasan. Sebagaimana dalam QS Luqman/31: 34.

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ
عَدَا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (٣٤)

Terjemahan:

“Sesungguhnya hanya di sisi Allah SWT ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal”.⁴⁶

3. Prinsip *Tawazun*

Esensi dari prinsip *tawazun* meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. keseimbangan tersebut yang berarti pertanggungjawaban bank syariah secara materiil maupun secara spiritual kepada Allah SWT melalui laporan zakat.⁴⁷ Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik

⁴⁵ Sutan Remy Sjahdeini, “Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya”, Cetakan ke – 1, 2014, h. 130.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 414.

⁴⁷ *Loc.Cit.*, h. 130.

(shareholder). sehingga manfaat tidak hanya difokuskan pada pemegang saham saja tetapi juga pada pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al-Qasas/28: 77.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (٧٧)

Terjemahan:

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”.⁴⁸

4. Prinsip *Universalisme* (*Alamiyah* Dalam Hal Memberi Manfaat)

Esensi dari prinsip universalisme yaitu dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakholder) tanpa membedakan suku agama, ras dan golongan, sesuai semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin).⁴⁹ Termasuk dalam hal memberikan manfaat atas aktivitas bank syariah melalui laporan zakat. Karena pada dasarnya semua adalah ciptaan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Anbiya’/21: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (١٠٧)

Terjemahan:

⁴⁸ *Ibid.*, h. 394.

⁴⁹ *Loc.Cit.*, h. 130.

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”.⁵⁰

5. Prinsip *Maslahah*

Esensi dari prinsip kemaslahatan meliputi segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif.⁵¹ Dalam hal ini kebaikan ataupun manfaat yang dimaksud adalah harta (*mal*) atau hasil capaian bank syariah baik dari hasil aktivitas yang menghasilkan uang maupun surat-surat berharga lainnya yang diwujudkan dalam laporan zakat. Kemashlahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (*thayib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. Konsep *maslahah* juga berlandaskan pada prinsip berbagi dengan adil, seperti dalam QS Al-Baqarah/2:254.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ
هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٥٤)

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari reski yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim”.⁵²

⁵⁰ *Ibid.*, h.331.

⁵¹ *Loc.Cit.*, h. 130.

⁵² *Ibid.*, h. 42.

Dengan merujuk dari ayat-ayat tersebut maka dapat ditegaskan bahwa penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dimana prinsip-prinsip tersebut yaitu prinsip keadilan yang dilaksanakan dengan menjauhi unsur riba, zalim, gharar dan maysir. Unsur-unsur tersebut harus dihilangkan dalam transaksi bank syariah yang akan berdampak pada laporan keuangan. Unsur-unsur tersebut tentunya juga harus dihilangkan dari segi konsep dasar penyusunan laporan keuangan. Karena sebagai perbankan syariah dasar penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, utamanya prinsip keadilan. Sedangkan prinsip tawazun, universalime dan masalah menegaskan bahwa sebagai perbankan yang melekatkan namanya pada hukum Islam/syariah yang berarti bahwa perbankan syariah tidak hanya berfokus kepada kepentingan sepihak atau berfokus pada pencapaian laba saja tetapi perbankan syariah sejatinya mengutamakan semua kepentingan stakeholder dan berfokus pada pengeluaran zakat. Karena pengukuran kinerja untuk perbankan syariah tidak hanya pada *profit-oriented* tetapi lebih kepada *zakat-oriented*. Yang berarti sebagai perbankan yang menjalankan operasinya berdasarkan syariat Islam harus mampu menciptakan manfaat bagi semua pihak baik pihak yang berhubungan langsung maupun pihak yang tidak berhubungan langsung.

H. Karakteristik Kegiatan Penyaluran Dana Bank Syariah Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Sesuai dengan pernyataan IAI (2002) bahwa karakteristik bank syariah harus terangkum dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank

syari'ah dalam hal ini prinsip syariah.⁵³ Untuk mewujudkan hal tersebut maka dari itu IAI menyusun sepuluh acuan dasar dalam akuntansi syariah namun yang disahkan oleh DSS (Dewan Standar Syariah) hanya Sembilan. kesemuanya itu terdapat pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yakni PSAK 101 sampai PSAK 109, tetapi yang termasuk dalam penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah yaitu terkait dengan PSAK 102, 103, 104, 105, 106, dan 107. Adapun karakteristik yang terangkum dalam PSAK yang mengatur mengenai pengelolaan penyimpanan dan pembiayaan bank syariah, yaitu

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

- a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Dalam prinsip jual beli maka pembiayaan yang termasuk, yaitu murabahah, salam dan istishna. Adapun dalam PSAK yang mengatur dicantumkan karakteristik masing-masing pembiayaan, yaitu

- 1) PSAK 102 akuntansi murabahah

Adapun karakteristik pembiayaan murabahah pada PSAK 102, yaitu:

⁵³ Ery Wibowo Agung Santoso, "Faktor Relegiusitas Dalam Perbankan Syari'ah", *http://jurnal.unimus.ac.id*, hal. 6.

- a) Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.
- b) Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika asset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.
- c) Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
- d) Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.
- e) Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli.

2) PSAK 103 akuntansi salam

Adapun karakteristik pembiayaan salam pada PSAK 103, yaitu:

- a) Entitas dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika entitas bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam, maka hal ini disebut salam paralel.
- b) Salam paralel dapat dilakukan dengan syarat: (a) akad antara entitas (sebagai pembeli) dan produsen (penjual) terpisah dari akad antara entitas (sebagai penjual) dan pembeli akhir; dan (b) kedua akad tidak saling bergantung (ta'alluq).
- c) Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal bertindak sebagai pembeli, entitas dapat meminta jaminan kepada penjual untuk menghindari risiko yang merugikan.
- d) Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat, maka penjual harus bertanggungjawab atas kelalaiannya.
- e) Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa kas, barang, atau manfaat. Pelunasan harus dilakukan pada saat akad disepakati dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang penjual atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain.
- f) Transaksi salam dilakukan karena pembeli berniat memberikan modal kerja terlebih dahulu untuk memungkinkan penjual (produsen) memproduksi barangnya,

barang yang dipesan memiliki spesifikasi khusus, atau pembeli ingin mendapatkan kepastian dari penjual. Transaksi salam diselesaikan pada saat penjual menyerahkan barang kepada pembeli.

3) PSAK 104 akuntansi istishna

Adapun karakteristik pembiayaan istishna pada PSAK 104, yaitu

- a) Berdasarkan akad istishna', pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan (mashnu') sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli, dengan cara pembayaran dimuka atau tangguh.
- b) Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.
- c) Barang pesanan harus memenuhi kriteria: (a) memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati; (b) sesuai dengan spesifikasi pemesan (customized), bukan produk massal; dan (c) harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya.
- d) Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang diserahkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.
- e) Entitas dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi istishna'. Jika entitas bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain (produsen atau kontraktor) untuk membuat barang pesanan juga dengan cara istishna' maka hal ini disebut istishna' paralel.

- f) Istishna' paralel dapat dilakukan dengan syarat akad pertama, antara entitas dan pembeli akhir, tidak bergantung (mu'allaq) dari akad kedua, antara entitas dan pihak lain.
- g) Pada dasarnya istishna' tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi: (a) kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya; atau (b) akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.
- h) Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas: (a) jumlah yang telah dibayarkan; dan (b) penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu.
- b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa. Dalam prinsip sewa maka pembiayaan yang termasuk, yaitu ijarah. Adapun dalam PSAK yang mengatur dicantumkan karakteristik ijarah, yaitu
 - 1) PSAK 107 akuntansi ijarah

Adapun karakteristik pembiayaan ijarah pada PSAK 107, yaitu:

- a) Ijarah merupakan sewa-menyewa obyek ijarah tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa wa'ad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (mu'jir) kepada penyewa (musta'jir) pada saat tertentu.
- b) Perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarkan dari pemilik kepada penyewa, dalam ijarah muntahiyah bittamlik, dilakukan jika seluruh pembayaran sewa atas objek ijarah yang dialihkan telah diselesaikan dan obyek ijarah telah

diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah secara: (a) hibah; (b) penjualan sebelum akad berakhir sebesar sebanding dengan sisa cicilan sewa atau harga yang disepakati; (c) penjualan pada akhir masa ijarah dengan pembayaran tertentu sebagai referensi yang disepakati dalam akad; atau (d) penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

- c) Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindari risiko kerugian.
- d) Jumlah, ukuran, dan jenis obyek ijarah harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.
- c. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. Dalam prinsip bagi hasil maka pembiayaan yang termasuk, yaitu musyarakah dan mudharabah. Adapun dalam PSAK yang mengatur dicantumkan karakteristik masing-masing, yaitu

1) PSAK 106 akuntansi musyarakah

Adapun karakteristik pembiayaan musyarakah pada PSAK 106, yaitu:

- a) Para mitra (syarik) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain.
- b) Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas.

- c) Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja adalah: (a) pelanggaran terhadap akad, antara lain, penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya dan pendapatan operasional; atau (b) pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
- d) Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang.
- e) Keuntungan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset non-kas) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas).
- f) Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad musyarakah maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya.
- g) Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan.

- h) Pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam catatan akuntansi tersendiri.

2) PSAK 105 akuntansi mudharabah

Adapun karakteristik pembiayaan mudharabah pada PSAK 105, yaitu:

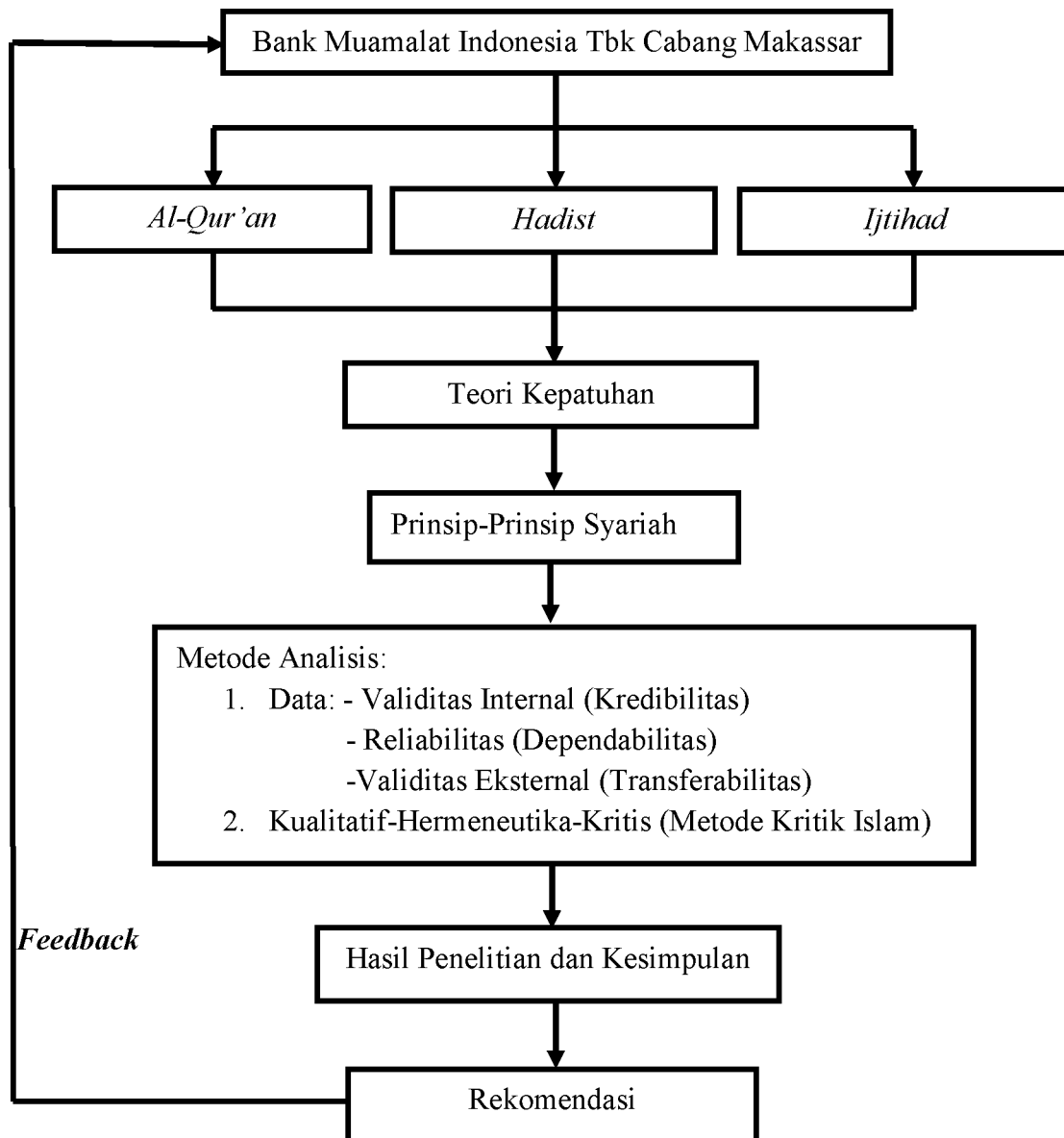
- a) Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana.
- b) Mudharabah terdiri dari mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musytarakah. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana syirkah temporer.
- c) Dalam mudharabah muqayyadah, contoh batasan antara lain: (a) tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya; (b) tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau (c) mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.
- d) Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- e) Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri.
- f) Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan

nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana

I. Rerangka Konseptual

Rerangka konseptual pada penelitian ini memberikan gambaran tentang fenomena kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip *syariah*. Pada dasar karena merupakan bank syariah maka Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar adalah bank yang berlandaskan pada tiga sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Hadist dan Ijtihad. Untuk menjalankan ketiga sumber hukum tersebut maka Bank Muamalat harus menerapkan kepatuhan pada prinsip syariah yang dijalankan oleh bank syariah. Penerapan prinsip syariah ini akan terangkum pada penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah, hal ini sesuai dengan pernyataan IAI (2002). Pengelolaan bank syariah yang sesuai dengan prinsip syariah terdiri atas penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah. Namun dalam penelitian ini berfokus pada penyaluran dana dan kegiatan sosial yang membuktikan bahwa Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar tidak hanya berfokus pada pencapaian laba saja. Dan hasilnya akan diketahui melalui metode penelitian yang disajikan pada hasil penelitian. Dari hasil penelitian akan diperoleh bagaimana penerapan syariah compliance pada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar dalam pengelolaan transaksi pengelolaan dana yang berdampak pada penyusunan laporan keuangan. .

Dengan adanya kerangka konseptual ini akan memberikan kemudahan kepada peneliti dalam memecahkan masalah penelitian dan menjawab pertanyaan-pertanyaan terhadap objek masalah penelitian. Berikut adalah kerangka konseptual yang dibangun dalam memecahkan masalah dalam penelitian.

Gambar 2.1. Rerangka Konseptual

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci. Metode kualitatif merupakan fokus perhatian dengan pendekatan interpretatif, semiotik dan hermeneutika.¹ Cakupan metode kualitatif yakni sebagai kumpulan data empiris, hasil wawancara, teks-teks hasil pengamatan, dan visual yang menggambarkan makna keseharian. Hal tersebut merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial dan sangat tergantung pada pengamatan manusia yang berkaitan dengan orang-orang tertentu yang ada di lingkungannya.²

Penelitian ini dilakukan dan menggunakan sumber data pada salah satu perbankan syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar. Hal ini didasarkan karena Bank Muamalat Indonesia Tbk merupakan bank umum pertama yang ada di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah yang didirikan pada tahun 1991 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah

¹ Fashri, 2007: 9 dalam Yourdan Sidang, "Bab III Methodologi Penelitian Kualitatif", *www.academia.edu*, (2014): h. 1.

² Kirk dan Miller, 1989: 9, *ibid.*, h. 1.

Indonesia. Sehingga keberadaannya dianggap sebagai perbankan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Sehingga perbankan ini dianggap perlu membangun *syariah compliance* sebagai prinsip utama *syariah governance* dalam operasinya.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *hermeneutika-kritis*. Dipilihnya pendekatan tersebut yaitu karena memberikan pemahaman suatu praktik akuntansi dimana ia diterapkan dan sekaligus berusaha untuk menemukan suatu pemecahan ke arah penyempurnaan praktik akuntansi itu sendiri. Dengan memahami suatu praktik akuntansi dimana ia diterapkan dan sekaligus berusaha untuk menemukan suatu pemecahan ke arah penyempurnaan praktik akuntansi itu sendiri. Hermeneutika adalah sebagaimana menafsirkan sebuah teks klasik dan asing menjadi milik kita yang hidup di zaman dan tempat berbeda.³

Hermeneutika adalah proses penguraian yang bertolak dari isi dan makna yang tampak kepada makna yang tersembunyi. Hermeneutika tidak lagi mencari makna obyektif sebuah teks terlepas dari maksud subyektif pengarang atau orang lain. Dalam penelitian ini untuk memahami temuan selama penelitian berlangsung, maka digunakan hermeneutika dengan berelasi dengan berfikir kritis atau yang disebut hermeneutika-kritis. Berfikir kritis sendiri dapat dilakukan dengan konsep

³ Umiarso, 2011: 193 dalam Akhmal Bashori, "Pendekatan Hermeneutika; Sebuah Paradigma Dan Kerangka Metodologi", <http://mamdoh.staff.unimus.ac.id>, (2013): h. 3.

kritik. Sebagaimana dalam Islam, kritik merupakan bentuk upaya tolong menolong dalam kebajikan dan takwa antara sesama muslim dengan jalan saling menasehati sesama muslim. Kitab karya Syaikh Al Madkhali telah menjelaskan metode mengkritik dalam Islam bahwa Al-Qur'an sebagai sumber syari'at Islam memuji sesuatu tanpa menyebutkan kesalahannya dengan tujuan agar jiwa tergerak untuk mengikuti mereka. Begitu juga sebaliknya, Islam mencela sesuatu tanpa menyebutkan kebaikannya dengan tujuan memberikan pelajaran dan peringatan atas kejelekan dan keburukan tersebut agar tidak ada yang mengikuti perbuatan dan jejak keburukan tersebut. Al Madkhali pun menyatakan bahwa sikap *muwazana* (menyebutkan sisi baik dan sisi buruk) akan menjadikan orang yang dinasehati menjadi lebih bingung, kacau bahkan kadang terjadi apa yang bisa membahayakannya sehingga hilanglah tujuan dari nasihat serta faedahnya.⁴ Konsep inilah yang diajarkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya yang memiliki tujuan mulia untuk mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kerusakan yang besar.⁵

Sebagaimana dalam penelitian ini menginterpretasi apa yang dipahami pihak bank tentang pengelolaan produk-produk bank yang berbasis nilai-nilai Islam dengan memfokuskan pada penerapan prinsip-prinsip syariah yang mana untuk mengklasifikasikan implementasinya pada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar maka dibutuhkan pedoman dalam pemaknaannya yang berhubungan

⁴ Andik S. Dwi Saputro, "Penguatan Sharia Governance Melalui Reformasi Akuntansi", *SNA XIII Perwokerto*, (2010), h. 4.

⁵ Ibid.

dengan penyusunan laporan keuangan yaitu ayat Suci Al-Qur'an yang terkait dengan prinsip-prinsip syariah.

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini istilah yang digunakan untuk subjek penelitian adalah informan. Penentuan informan dilakukan secara *purposive* dengan memilih 3 orang informan yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai terhadap objek penelitian untuk tujuan tertentu. Informan yang dipilih dengan kriteria mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang pengelolaan produk-produk Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar, terkait dengan prinsip bagi hasil, sewa-menyewa dan jual-beli. Yang terdiri atas informan utama, yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti dan informan pendukung, yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi social yang sedang diteliti.

1. Informan Utama

Dalam struktur organisasi PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Makassar, informan utama berada pada bagian Sub Branch Manager, yaitu

- a. Bapak Ridwan Umar sebagai Sub Branch Manager (SBM) Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar yang bertempat di kantor cabang pembantu Pettarani.
- b. Ibu Nur Qalbi sebagai Sub Branch Manager (SBM) Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar yang bertempat di kantor cabang pembantu Gowa.

2. Informan Pendukung

Bapak Muhidin sebagai Account Management Financing Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar yang bertempat di kantor cabang pembantu Pettarani.

D. Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan bersumber pada data primer dan data sekunder:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) atau diskusi antara peneliti dengan pihak pertama. Data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui masalah dalam penelitian ini.
2. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa jurnal-jurnal yang menjadi panduan dalam memahami data-data penelitian dan dokumen-dokumen yang menjadi pendukung atau bukti pendukung pada saat penelitian yang diperoleh langsung dari PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Makassar dan data lain yang berhubungan dengan profil PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk menganalisis dan menginterpretasikan data dengan baik, maka diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapat mampu mendeskripsikan situasi objek yang sedang diteliti dengan benar. Dalam tahap pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang akan dijadikan sebagai panduan dalam menganalisis data. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu berupa jurnal-jurnal atau referensi lainnya seperti profil PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. yang digunakan sebagai panduan-referensi terkait dengan topik yang membantu dalam menganalisis data.

2. Dokumentasi

Selain itu dalam penelitian ini metode pengumpulan data sekunder juga dilakukan dengan metode dokumentasi. Dokumentasi dapat dianggap sebagai materi yang tertulis atau sesuatu yang menyediakan informasi tentang subjek. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari pihak Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar. Pada penelitian ini data yang diperoleh melalui teknik dokumentasi yaitu data pembayaran angsuran pembayaran murabahah dan struktur organisasi.

3. Studi Lapangan

Studi lapangan dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data, yaitu dengan melakukan survei (wawancara dengan menggunakan alat perekam) terhadap suatu obyek secara langsung sebagai instrument penelitian. Wawancara yang dilakukan adalah komunikasi secara langsung (tatap muka) antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan secara lisan dengan responden yang menjawab pertanyaan secara langsung.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Penulis menyiapkan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini dan menggunakan alat perekam selama wawancara dilakukan. Pokok permasalahan ini dapat berkembang sehingga penulis menemukan informasi lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan tersebut selama wawancara berlangsung.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode interpretatif-kualitatif dengan model analisis interaksi. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data sampai selesainya pengumpulan data. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan pada saat wawancara. Adapun tahap dalam analisis data kualitatif dengan menggunakan model analisis interaksi (*interactive analysis models*), yaitu

1. Proses Coding Data

Proses pengkodean data atau coding data dilakukan untuk mempermudah proses analisis data, di mana data hasil wawancara akan dikelompokkan berdasarkan tingkat kesamaan data. Pengelompokan didasarkan pada hal-hal yang dapat menunjukkan penerapan prinsip-prinsip syariah yang dibagi menjadi lima prinsip, yaitu *ukhuwah, adl, tawazun, maslahah* dan *universalisme (alamiyah)*.

2. Analisis dengan Pendekatan Hermeneutika-Kritis : Interpretasi Teks

Setelah data tersebut dikelompokkan, tahap selanjutnya adalah proses interpretasi teks. Pada awalnya jawaban para informan yang berupa teks dianalisis, sesuai tiga komponen pokok, yaitu teks, konteks, dan kontekstualisasi. Kemudian dilakukan sebuah interpretasi atas pengelolaan bank oleh para informan yang tentunya berpengaruh pada penyusunan laporan keuangan secara kritis untuk menemukan kesenjangan antara teori dan praktek. Hal ini dilakukan sesuai dengan metode kritik dalam Islam yang akan dilakukan dengan berdasar kepada prinsip-prinsip syariah dengan menghindari sikap *muwazanah*. Jika dikaitkan dengan penelitian ini dimana penelitian ini berupaya untuk menemukan realitas penerapan prinsip-prinsip syariah dalam hal syariah compliance. Bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh pihak bank berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, kemudian dibandingkan dengan yang terjadi semestinya secara faktual. Jadi pada tahap analisis kritis ini berusaha menemukan kesalahan yang ada pada pihak bank dalam melakukan pengelolaan terhadap produk-produknya.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data dianalisis, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data juga akan membantu dalam memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang

telah dipahami tersebut. Penyajian data dalam penelitian ini dipaparkan dengan teks yang bersifat naratif.

4. Kesimpulan/Verifikasi (*Verification*)

Analisis selanjutnya yaitu proses penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan sangat terkait dengan seberapa besar kumpulan catatan lapangan dan pengkodean yang dilakukan oleh peneliti. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan. Dimana kesimpulan akhir dari penelitian yaitu menemukan apakah Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar menjalankan kepatuhan syariah (*syariah compliance*) dalam hal ini menerapkan prinsip-prinsip syariah pada pengelolaannya yaitu penghimpunan dan penyaluran dana.

H. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif dilakukan pengujian keabsahan data dilakukan melalui empat uji, yaitu credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliability) dan confirmability (obyektivitas). Namun dalam penelitian ini pengujian keabsahan data hanya digunakan dalam dua uji yang paling sesuai, yaitu validitas internal (kredibilitas) dan reliabilitas (dependabilitas).

1. Uji validitas internal (kredibilitas)

Uji validitas internal (kredibilitas) data adalah uji kebenaran data. Tingkat kredibilitas yang tinggi dapat dicapai jika para partisipan yang terlibat dalam

penelitian tersebut mengerti benar tentang berbagai hal yang telah diceritakannya.⁶ Dalam penelitian ini uji kredibilitas dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Adapun penelitian ini menggunakan 2 jenis triangulasi, yaitu

- a. Triangulasi sumber data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya melalui sumber data utama yaitu wawancara, peneliti bisa memperoleh sumber data pendukung seperti dokumen yang ditunjukkan informan sebagai bukti sehingga data/keterangan dari informan lebih akurat.
- b. Triangulasi teori, yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi. Informasi yang diperoleh akan dibandingkan dengan teori yang relevan dalam penelitian ini teori kepatuhan dan konsep masalah. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kesimpulan yang sifatnya tidak bias.

2. Uji reliabilitas (dependabilitas)

Uji reliabilitas (dependabilitas) data menjadi pertimbangan dalam menilai keilmiahan suatu temuan penelitian kualitatif. Tingkat dependabilitas yang tinggi dapat dicapai dengan melakukan suatu analisis data yang terstruktur dan berupaya untuk menginterpretasikan hasil penelitian dengan baik sehingga peneliti lain akan dapat membuat kesimpulan yang sama dalam menggunakan perspektif, data mentah

⁶ Guba dan Lincoln (1989) dalam Yati Afiyanti, "Validitas dan Reliabilitas dalam Penelitian Kualitatif" *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 12, No. 2, (2008): h. 138.

dan dokumen analisis penelitian yang sedang dilakukan.⁷ Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut.⁸ Untuk pengujian dependabilitas dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh pembimbing untuk memeriksa keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

3. Uji validitas eksternal (transferabilitas)

Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke objek penelitian lain. Nilai transfer berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain.⁹ Uji ini dilakukan dengan membuat hasil penelitian atau laporan atas penelitian dengan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut ditempat lain.

⁷ Streubert dan Carpenter (2003) dalam Yati Afiyanti, "Validitas dan Reliabilitas dalam Penelitian Kualitatif" *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 12, No. 2, (2008): h. 139.

⁸ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*", Alfabeta, Bandung, (2013), h. 277.

⁹ *Ibid.*, h. 276.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

1. Gambaran Umum

PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat

pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada (i) tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham, (ii) tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak Kru Muamalat sedikitpun, (iii) pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru, (iv) peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja

Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan (v) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa Bank kita, dengan rahmat Allah Rabbul Izzati, ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya.

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 merchant debit. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, bank muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya comply terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai Best Islamic Bank in Indonesia 2009 oleh Islamic Finance News (Kuala Lumpur), sebagai Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009 oleh Global Finance (New York) serta sebagai

The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009 oleh Alpha South East Asia (Hong Kong).

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dan dikagumi di pasar rasional.

b. Misi

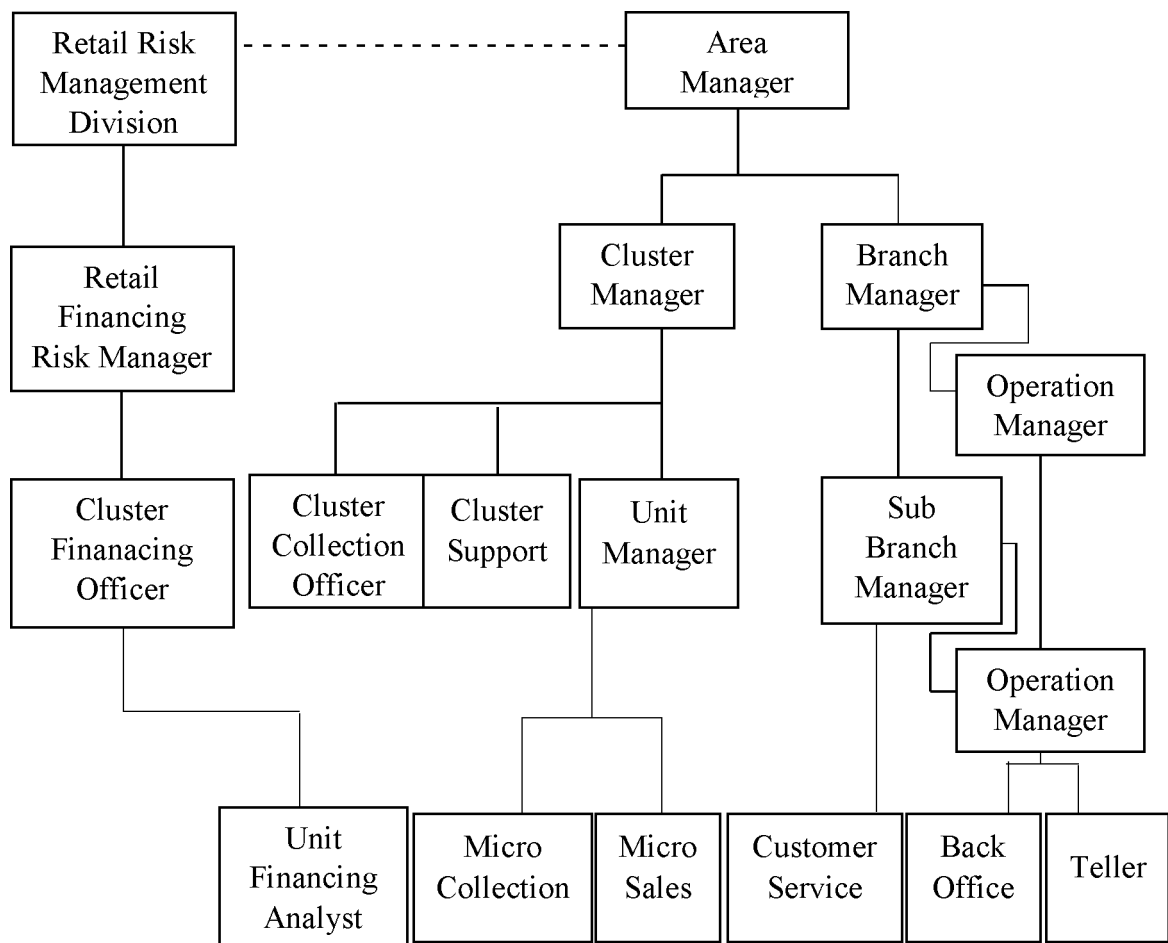
Menjadi role model lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen, dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada stakeholder.

3. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Bank Muamalat Cabang Makassar



Adapun yang menjadi nilai kinerja dari Bank Muamalat Indonesia cabang Makassar diantaranya:

- a. Branch Manager, bertanggung jawab pada setiap fungsi divisi dan memastikan bahwa tujuan semua terpenuhi (Kantor Cabang Utama).
- b. Sub Branch Manager, bertanggung jawab pada fungsi divisi dan memastikan bahwa tujuan semua terpenuhi. (Kantor Cabang Pembantu).
- c. Financing Support Unit – CI, sebagai Credit Investigation: taksasi dan retaksasi atas jaminan Nasabah, membuat laporan taksasi, mengadakan penyelidikan terhadap jaminan nasabah, membuat dan memonitor pelaksanaan Retaksasi minimal 6 bulan sekali, membuat Laporan Rekonsiliasi Pemeringkatan Nasabah (FPN).
- d. Financing Support Unit – Admin, sebagai Administrasi dokumen-dokumen pembiayaan: menerima, menyimpan, mengeluarkan file pembiyaan dan dokumentasi dari Loan Document dan Safe Keeping serta bertanggung-jawab terhadap kelengkapan file tersebut.
- e. Teller, bertanggung Jawab terhadap seluruh transaksi nasabah yang berhubungan dengan teller. Memberikan pelayanan terhadap nasabah secara tepat, cermat dan memuaskan. Melaksanakan seluruh transaksi tunai maupun non tunai yang diinstruksikan oleh nasabah.
- f. Customer Service, bertanggung Jawab terhadap seluruh transaksi nasabah yang berhubungan dengan Customer Service. Melayani nasabah pada waktu pembukaan, penutupan dan perubahan rekening nasabah (giro, tabungan, deposito,

DPLK dan lain-lain), melayani dan menyelesaikan berbagai masalah serta complain nasabah, memelihara file pembukaan dan penutupan rekening.

4. Letak Kantor

Adapun alamat kantor cabang Bank Muamalat dan nomor telepon yang berada di daeran sekitar Makassar dan Gowa;

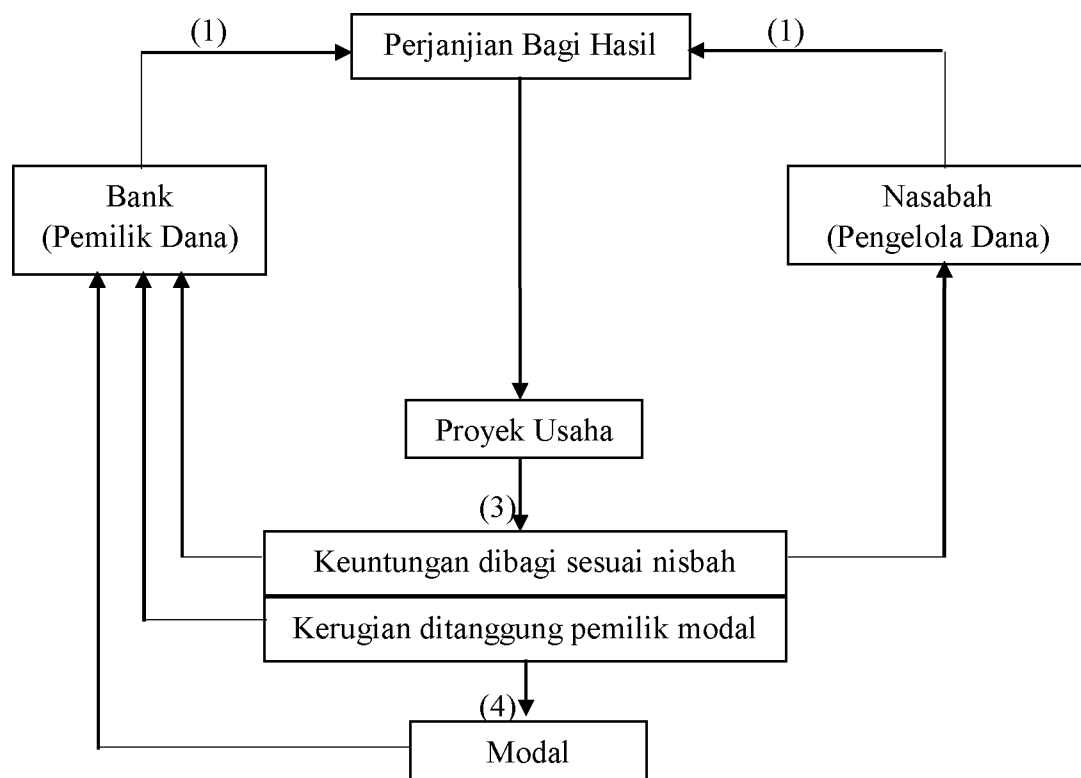
- a. Bank Muamalat-Makassar Sam Ratulangi, Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 72, Makassar. telepon: (0411) 8327777 muamalatbank.com
- b. Bank Muamalat-Makassar Pettarani, JL. AP. Pettarani Ruko No. 10 D, Makassar, SU Kota Makassar, Sulawesi Selatan – 90222, telepon: (0411) 432422.
- c. Bank Muamalat-Makassar Pengayoman, JL. Pengayoman, Komplek Mirah F8, Makassar, telepon: (0411) 433755 muamalatbank.com.
- d. Bank Muamalat-Makassar Daya, JL. Perintis Kemerdekaan, Komplek Bukit Katulistiwa Ruko Blok A No. 7, Makassar, 1346 muamalatbank.com
- e. Bank Muamalat-Makassar Gowa, JL. K. H. Wahid Hasyim Komp. Ruko Balla Lompoe Plaza C/2 Sungguminasa Kab. Gowa, muamalatbank.com

B. Skema Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Ijarah

1. Pembiayaan Mudharabah

Gambar 4.2

Skema Pembiayaan Mudharabah



Adapun yang disepakati dalam sebuah akad pembiayaan mudharabah:

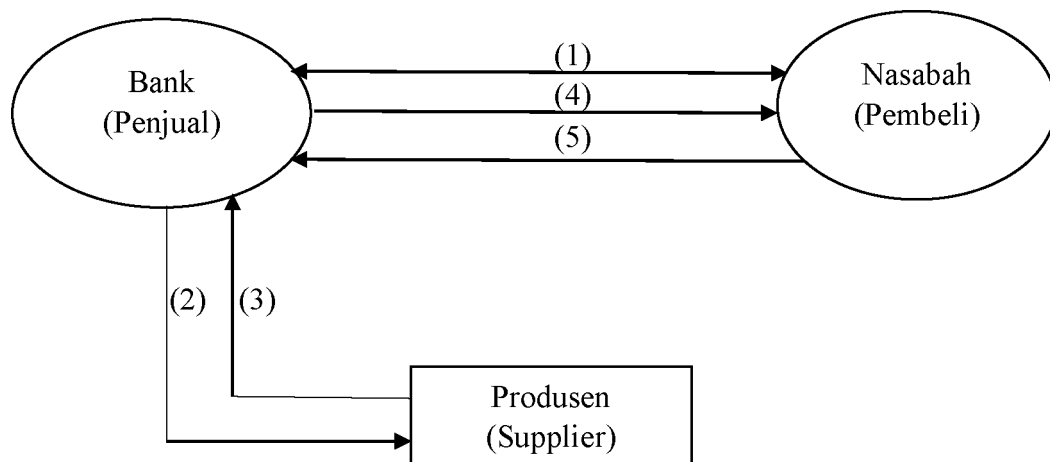
- Melakukan perjanjian antara nasabah dan Bank.
- Perjanjian yang disepakati dalam bentuk proyek atau usaha yang akan dikelola oleh nasabah dengan modal dari Bank.

- c. Dan menentukan kesepakatan nisbah/ pembagian keuntungan antara nasabah dan Bank sesuai yang disepakati dalam akad. Kecuali terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal yaitu Bank.
- d. Pengembalian modal pokok pada bank.

2. Skema Pembiayaan Murabahah

Gambar 4.3

Skema Pembiayaan Murabahah



Adapun yang disepakati dalam sebuah akad pembiayaan murabahah:

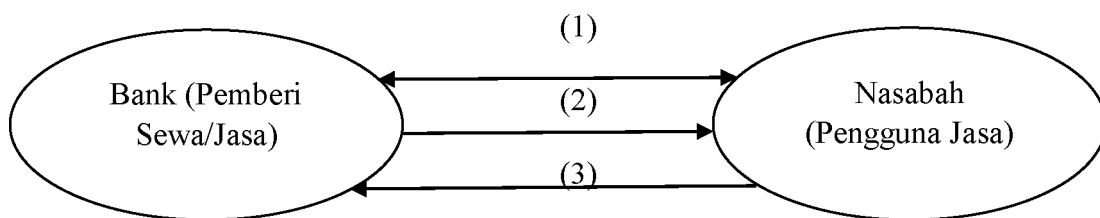
- a. Melakukan perjanjian (akad) antara nasabah (pembeli) dan Bank (penjual).
- b. Bank (penjual) membeli barang pada supplier atau produsen sesuai dengan yang diinginkan oleh nasabah (pembeli).
- c. Barang diserahkan dari produsen.
- d. Barang diserahkan kepada pembeli.

e. Pembayaran dilakukan oleh pembeli.

3. Skema Pembiayaan Ijarah

Gambar 4.4

Skema Pembiayaan Ijarah



Adapun yang disepakati dalam sebuah akad pembiayaan ijarah:

- Penyewa (nasabah) dan pemberi sew (bank) melakukan kesepakatan ijarah.
- Pemberi sewa (bank) menyerahkan objek sewa pada penyewa.
- Penyewa melakukan pembayaran.

Dalam pembiayaan Bank Muamalat Cabang Makassar baik itu mudharabah, murabahah maupun ijarah memiliki proses yang sama, yang membedakan hanya dari peruntukan. Adanya perbedaan peruntukan akan menghasilkan akad yang berbeda.

Adapun alur dari pembiayaan Bank Muamalat, yaitu

- Permohonan pembiayaan

Dalam permohonan pembiayaan berisi kejelasan mengenai jumlah, kegunaan dan berapa lama waktu pembayaran.

- Kelengkapan berkas

Nasabah sebagai pihak yang bermohon harus melengkapi berkas yang dibuat oleh bank, dimana berkas tersebut kemudian akan dianalisis oleh pihak bank. Analisis atau penyelidikan yang dilakukan oleh pihak bank dilakukan dengan dua tahap, yaitu analisis terhadap nasabah dan analisis terhadap dokumen.

1. Analisis nasabah

Analisis nasabah dilakukan oleh bank dimaksudkan untuk mengetahui kualitas nasabah. Analisis nasabah dilakukan melalui tiga kategori, yaitu analisis karakter, sumber pendapatan dan jaminan.

2. Analisis dokumen

Analisis dokumen yaitu analisis kelayakan. Dalam hal menilai kelayakan suatu kredit maka bank melihat dari dua hal, yaitu siklus produksi jika kredit berupa modal kerja dan laporan keuangan jika kredit berupa investasi.

- c. Memorandum pembiayaan

Memorandum pembiayaan berupa proposal pembiayaan yang berisi informasi tentang nasabah. Memorandum pembiayaan juga berisi seberapa besar risiko dari pembiayaan yang akan dilakukan.

- d. Pengambilan keputusan pembiayaan

Keputusan mengenai layak atau tidaknya pembiayaan dilakukan dikeluarkan oleh komite pembiayaan dari FRO. Adanya surat keputusan tersebut menandakan bahwa nasabah bersedia melakukan persyaratan pembiayaan yang termuat dalam Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3).

e. Pengikatan notaris

Pengikatan notaris dilakukan dengan pembuatan akad kredit dan akad jaminan. Pengikatan notaris ditandai dengan diterbitkannya cover note yang menyatakan bahwa notaris memberikan jaminan untuk pembiayaan tersebut dan jaminan dari pembiayaan tersebut.

f. Pencairan pembiayaan

Bank memberikan dana kepada nasabah sesuai dengan jumlah dalam permohonan yang telah disepakati sebelumnya dalam akad.

g. Monitoring

Bank melakukan pengawasan dari pengguna dana tersebut. Bank harus memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan akad.

C. Penerapan Prinsip Syariah Pada Bank Muamalat Cabang Makassar Terkait Penyusunan Laporan Keuangan

1. Prinsip Ukhuwah dalam Pendapatan dari Aktivitas Pembiayaan

Prinsip ukhuwah menjelaskan bahwa transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat sehingga keuntungan tidak diperoleh di atas kerugian orang lain. Prinsip ini tentunya dijalankan atas dasar prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*). Prinsip ini ditunjukkan melalui penentuan margin keuntungan, penentuan nisbah bagi hasil dan waktu pembayaran pada pembiayaan yang dilakukan secara kredit yaitu murabahah dan mudharabah. Pada dasarnya pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Cabang Makassar harus dalam keadaan antara bank

dan nasabah saling mengenal satu sama lain sehingga bank dapat menentukan kelayakan dari nasabah dalam memenuhi kewajiban, bank memahami kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran dan begitu juga nasabah memahami bahwa bank membutuhkan pengembalian atas modal yang digunakan nasabah, hal itu karena dana/modal tersebut berasal dari pihak lain (pemegang saham). Untuk memberikan keyakinan kepada bank maka nasabah memberikan jaminan kepada bank untuk memenuhi kewajiban. Dimana jaminan tersebut menjadi dasar dari penentuan jumlah yang akan dikeluarkan oleh bank sebagai pembiayaan kepada nasabah baik itu murabahah maupun mudharabah.

Dalam penelitian ini diperoleh bahwa Bank Muamalat dalam menentukan margin keuntungan pada produk murabahah, nisbah bagi hasil pada produk mudharabah berdasarkan tawar-menawar antara pihak bank dan nasabah dan menentukan periode pembayaran sesuai dengan kemampuan nasabah. Sebagaimana pernyataan dari Bapak Ridwan Umar mengenai margin keuntungan, pembayaran tangguhan dan nisbah bagi hasil beserta kerugian yang terjadi pada pembiayaan mudharabah,

“Harga yang diperhitungkan bank yaitu harga yang ditawarkan ketika nasabah menyetujui maka terjadilah kesepakatan. Dan nisbah bagi hasil itu sendiri berdasarkan penawaran bank, jika nasabah menyanggupi maka terjadi kesepakatan dengan nasabah. Kecuali terjadi kerugian bank lah yang menanggung. Dimana lamanya periode pembayaran sesuai dengan kemampuan nasabah”.

Dan pernyataan dari Ibu Nur Qalbi,

“Harga itu ditentukan dari penawaran bank kepada nasabah. Bagi hasil sesuai dengan penawaran bank, jika bank menyetujui barulah terjadi akad”. Jangka

waktu pembayaran sudah ditentukan pada akad sesuai dengan kesepakatan dengan nasabah”.

Dari jawaban kedua informan tersebut menunjukkan bahwa prinsip ukhuwah telah diterapkan pada Bank Muamalat Cabang Makassar karena pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak bank dan nasabah. Dan hasil penelitian tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. al-Maidah/5:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ١)

Terjemahan:

“Hai orang- orang yang beriman, penuhilah akad- akad itu”.¹

Artinya kesepakatan di dalam akad harus dijalankan karena kesepakatan tersebut merupakan persetujuan antara bank dan nasabah yang didasarkan pada nilai-nilai persaudaraan. Sehingga akad yang telah dibuat antara bank dan nasabah harus dijalankan.

Adanya kesepakatan dalam melakukan pembayaran kepada bank mengindikasikan bahwa bank menjunjung tinggi nilai kebersamaan karena pembayaran tangguhan menunjukkan bank mau dan mampu membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan baik itu dari pembelian barang kepada bank maupun bantuan dana dalam permodalan usaha yang dijalankan oleh nasabah yang pembayarannya dilakukan sesuai dengan kemampuan nasabah. Artinya keputusan yang ditetapkan dalam akad tidak berlaku secara sepihak melainkan bank menetapkan

¹ *Loc.Cit.*, h. 106.

keputusan berdasarkan pertimbangan kemampuan nasabah atau dalam hal ini ada kesepakatan antara bank dan nasabah.

Margin keuntungan yang ditetapkan oleh Bank Muamalat Cabang Makassar merupakan persentase keuntungan yang didasarkan pada tawaran dari pihak bank kepada nasabah, sehingga keuntungan yang ditetapkan adalah ketentuan yang berdasarkan pada kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Artinya bank memperoleh keuntungan atas dasar kebersamaan dalam memperoleh manfaat berupa keuntungan dari penjualan produk murabahah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menentukan margin keuntungan pada produk pembiayaan murabahah bank menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan yaitu untuk membantu memenuhi kebutuhan nasabah dengan melakukan penjualan yang tidak memberatkan nasabah.

Begitu juga dalam penentuan nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah. Bank Muamalat dalam menentukan nisbah bagi hasil sesuai dengan tawaran bank kepada nasabah yang jika disetujui maka nasabah dan bank melakukan akad mudharabah. Hal itu berarti adanya kesepakatan yang dibuat antara pihak bank dan nasabah. Nisbah bagi hasil yang ditetapkan oleh bank dan nasabah hanya berlaku ketika usaha yang dijalankan oleh nasabah memperoleh keuntungan. Dan jika terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal atau dalam hal ini bank. Hal ini menunjukkan bahwa Bank muamalat Cabang Makassar menjunjung tinggi prinsip ukhuwah dengan tidak mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain dalam hal ini nasabah.

Margin keuntungan dan nisbah bagi hasil yang ditetapkan tentunya berdampak pada penyajian pendapatan pada laporan keuangan Bank Muamalat. Ketika margin keuntungan dan nisbah bagi hasil telah ditetapkan berdasarkan prinsip ukhuwah berarti penyajian laporan keuangan Bank Muamalat Cabang Makassar telah menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al-Hujurat/49:10, “orang-orang mukmin itu bersaudara” dalam hal ini nasabah dan pihak bank terikat dalam ikatan persaudaraan yang mewajibkan pihak bank dan nasabah menjaga silaturahmi dalam menjalin hubungan kerjasama ekonomi. Sehingga dengan adanya prinsip ukhuwah mencerminkan besarnya pendapatan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan kesepakatan dan diperoleh dari manfaat yang diperoleh nasabah bukan dari kerugian mitra ataupun nasabah.

Adanya kegiatan tawar-menawar yang menghasilkan kesepakatan dalam penentuan margin keuntungan dalam pembiayaan murabahah, nisbah bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah, ketetapan mengenai kerugian dalam pembiayaan bagi hasil dan termasuk adanya kesempatan yang diberikan pihak bank kepada nasabah untuk melakukan pembayaran mencerminkan bahwa aktivitas pembiayaan bank didasarkan pada prinsip ukhuwah yang berarti segala hal yang disajikan dalam laporan keuangan bank tidak hanya bersifat materil tetapi juga bersifat spritual sehingga sangat tepat jika dikatakan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh Bank Muamalat Cabang Makassar tidak hanya berfokus pada tujuan hidup yang berupa keuntungan di dunia saja tetapi hal lain yang tidak kalah pentingnya bahwa bank juga berfokus pada pencapaian tujuan hidup yang berupa keuntungan di akhirat karena

semuanya didasari dengan keridhaan antara kedua pihak yang bertransaksi. Karena tujuan hidup di akhirat adalah tujuan hidup yang hakiki.

2. Prinsip *Tawazun*, *Universalisme* dan *Maslahah* Untuk Akuntansi Syariah

Prinsip *tawazun*, *universalisme* dan *maslahah* merupakan prinsip yang harus dijalankan oleh perbankan syariah yaitu Bank Muamalat Cabang Makassar. Adanya prinsip ini mengarahkan pengelolaan bank syariah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip ini juga membentuk akuntansi yang bernilai Islam atau yang dikenal dengan akuntansi syariah. Prinsip *tawazun* mengarahkan Bank Muamalat untuk tidak berfokus pada maksimalisasi keuntungan untuk kepentingan pemilik modal saja atau *shareholder*, tetapi manfaat juga harus difokuskan pada pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi (masyarakat umum dan lingkungan masyarakat). Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al-Qasas/28: 77 “carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik kepadamu”. Hal tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada manusia dalam hal ini Bank Muamalat untuk mencari keuntungan hidup di akhirat (bersifat spriritual) dan tidak melupakan keuntungan hidup di dunia (bersifat materil) yang telah Allah SWT tetapkan. Untuk mencapai keuntungan tersebut maka Bank Muamalat diwajibkan untuk berbuat kebaikan dalam aktivitas operasionalnya.

Prinsip *universalisme* mengarahkan Bank Muamalat menjalankan operasi untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Anbiya'/21: 107 yang menjelaskan bahwa Allah SWT tidak menciptakan manusia melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. Dari penjelasan tersebut diperoleh bahwa Bank Muamalat menjalankan operasionalnya harus dilandaskan dengan sifat netral, artinya tidak membedakan antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan Bank Muamalat dalam hal ini yang berdampak pada informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Sedangkan prinsip masalah mengarahkan Bank Muamalat untuk memberikan manfaat atau kebaikan untuk semua pihak (*stakeholder* termasuk lingkungan masyarakat) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah/2:195 “janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah”. Dimana hal ini menegaskan bahwa Bank Muamalat sebagai bank yang berdasarkan pada prinsip masalah harus melakukan kebaikan-kebaikan baik itu yang berhubungan dengan proses pengelolaannya maupun hasil pengelolaannya yang tentunya akan memberikan manfaat kepada semua stakeholdernya. Dari ketiga prinsip tersebut sangat jelas bahwa Bank Muamalat sebagai bank yang berbasis syariah harus menyeimbangkan tujuan hidup dunia dan tujuan hidup akhirat.

Bank Muamalat sebagai bank yang berbasis syariah mewujudkan ketiga prinsip tersebut melalui zakat yang dibuktikan adanya laporan zakat untuk keseluruhan bank. Untuk mewujudkan laporan zakat tersebut maka Bank Muamalat membentuk suatu badan untuk mengelola penggunaan dana zakat yaitu Baitulmaal

Muamalat. Dana-dana untuk kegiatan sosial tersebut berasal dari dana CSR dan zakat. Meskipun kedua dana tersebut berbeda namun pengelolaannya tetap dilakukan oleh Baitulmaal Muamalat. Dalam hal ini dana-dana tersebut disalurkan oleh Baitulmaal Muamalat, sedangkan Bank Muamalat sendiri merupakan sumber dari dana-dana tersebut. Dan laporan zakat yang disusun pun mewakili seluruh Bank Muamalat yang ada. Karena Baitulmaal Muamalat hanya ada satu. Penggunaan dana CSR dan zakat memang diperuntukan untuk masyarakat umum dan lingkungan sekitar, seperti dalam kegiatan produktif Bank Muamalat membantu permodalan para petani maupun pengusaha kecil dan kegiatan non-produktif seperti bantuan untuk bencana alam, pembangunan rumah sakit dan bantuan yang ditujukan kepada anak yatim dan dhuafa. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibu Nur Qalbi dalam penelitian ini,

“Bank tentunya melakukan kegiatan sosial yang berasal dari dana zakat. Karena zakat merupakan kewajiban”.

Dan pernyataan ini didukung oleh Bapak Muhidin, dengan mengatakan,

“Zakat yang dikeluarkan oleh bank sendiri dikelola oleh Baitulmaal Muamalat. Zakat digunakan untuk tujuan kegiatan sosial bank. Zakat tersebut ditujukan kepada masyarakat umum”.

Kedua jawaban dari informan ini tentunya memberikan kejelasan betapa pentingnya kehadiran zakat di tengah-tengah kegiatan operasional yang dijalankan oleh Bank Muamalat Cabang Makassar. Karena zakat dapat mengindikasikan bahwa Bank Muamalat Cabang Makassar menerapkan prinsip *tawazun*, *universalisme* dan *maslahah*. Dan zakat menjadi kewajiban tersendiri yang harus dijalankan oleh Bank Muamalat Cabang Makassar sebagai bank yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

Sebagaimana zakat yang dianggap sebagai kewajiban oleh bank sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS at-Taubah/9:60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Terjemahan:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat merupakan kewajiban dari Allah SWT yang harus dijalankan oleh Bank Muamalat Cabang Makassar. Adanya zakat sebagai kewajiban, hal tersebut berarti zakat merupakan suatu amanah dari Allah SWT yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Dan inilah yang direalisasikan oleh Bank Muamalat Cabang Makassar dengan melakukan pengelolaan dana zakat melalui Baitulmaal Muamalat. Kemudian dipertanggungjawabkan melalui laporan zakat Bank Muamalat Cabang Makassar. Zakat yang dibayarkan oleh bank tidak hanya berpegang pada kepentingan pemegang saham saja, tetapi zakat juga berfokus pada kepentingan masyarakat umum termasuk lingkungan masyarakat. Hal itu berarti laporan zakat pada Bank Muamalat Cabang Makassar sebagai pertanggungjawaban kepada *shareholder* selaku pemilik modal/pemegang saham dan sebagai pertanggungjawaban kepada Allah SWT sebagai pemilik utama dan hakiki sumber

² *Ibid.*, h. 196.

daya yang digunakan oleh bank melalui pertanggungjawaban kepada masyarakat umum dan lingkungan masyarakat (*stakeholder*).

Prinsip *tawazun, universalisme dan maslahah* membentuk akuntansi yang bernilai Islam/syariah melalui pengelolaan zakat. Hal itu karena zakat yang dikelola oleh Bank Muamalat merupakan wujud penerapan ketiga prinsip tersebut. Implikasi dari penerapan prinsip-prinsip tersebut bahwa tujuan dari Bank Muamalat bukan lagi *profit-oriented* tetapi *zakat-oriented*. Karena Bank Muamalat berpegang pada zakat-oriented maka ukuran kinerja tidak lagi dilihat dari pencapaian laba bersihnya (*net profit*) tetapi kriteria ukuran kinerja dilihat dari pembayaran zakat yang optimum oleh Bank Muamalat Cabang Makassar.

Hal yang sama dari pengertian metafora zakat bahwa secara ideal akuntansi syariah harus dibangun berdasarkan pada “konsep nilai zakat”.³ Dengan adanya penerapan zakat berarti Bank Muamalat telah menjaga keseimbangan antara sifat materialistik dengan sifat spriritualistik. Karena fokus bukan hanya pencapaian keuntungan yang bermfaat bagi kehidupan dunia tetapi juga kegiatan sosial yang bermanfaat bagi kehidupan di akhirat. Zakat juga menunjukkan bahwa Bank Muamalat tidak hanya berfokus pada satu kepentingan yaitu pemilik saham tetapi Bank Muamalat juga mementingkan kepentingan masyarakat umum dan lingkungan masyarakat sebagai pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Selain itu zakat juga memiliki nilai bahwa Bank Muamalat menciptakan manfaat bagi pihak-pihak yang

³ Iwan Triyuwono, *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, (2009), h. 348.

memang seharusnya menerima manfaat dari aktivitas ekonomi Bank Muamalat yaitu semua *stakeholder* (pemegang saham, masyarakat dan lingkungan masyarakat). Karena zakat menunjukkan pertanggungjawaban kepada Allah SWT.

Zakat-oriented memberikan nilai kepada Bank Muamalat bahwa pencapaian laba bukan merupakan tujuan akhir tetapi yang menjadi tujuan akhir adalah zakat. Untuk itu Bank Muamalat harus hadir dengan menunjukkan pembayaran zakat yang optimal untuk memberikan kejelasan bahwa Bank Muamalat telah melakukan kinerja yang baik utamanya dengan menunjukkan laporan zakat. Makna zakat bukan hanya sekedar sumbangan tetapi juga memiliki nilai pembersihan serta merupakan hal yang wajib bagi muslim. Bahkan dengan adanya *zakat-oriented*, memberikan makna bahwa unsur terpenting dalam akuntansi syariah bukanlah kinerja operasional (laba bersih), tetapi kinerja dari pandangan semua *stakeholder* dan nilai sosial yang didistribusikan secara adil kepada para *stakeholder*. Dengan tercapainya tujuan tersebut maka Bank Muamalat telah menciptakan nilai tambah bagi seluruh *stakeholder*. Bahkan untuk mewujudkan nilai tambah tersebut maka laporan nilai tambah diusulkan oleh pemikir akuntansi Islam.⁴

⁴ Mulawarman et. al, (2006) dalam Sri Nurhayati dan Wasilah, “*Akuntansi Syariah di Indonesia (Edisi 2)*”, Salemba Empat, (2009), h. 107.

Tabel 4.1
Laporan Nilai Tambah (*Value Added Statement*)

Value Added Statement For the period ended		
Sources:		
- Revenues		XXXX
- Bought in items	XXXX	
- Revaluation		XXXX
Gross Value Added		
Zakat:		
- Tazkiah to 8 Asnaf		XXXX
Net value added	XXXX	
Distributions:		
- Government		XXXX
- Employees		XXXX
- Owners	XXXX	
- Infak Shadaqah	XXXX	
- Reinveste Fund	XXXX	
- Profit Retained	XXXX	
- Revaluation		XXXX
Sub Total Distributions		

Value added statement menekankan pada distribusi nilai tambah yang diciptakan kepada mereka yang berhak menerimanya, seperti beneficiaries (dalam bentuk zakat, infak dan sadaqah), pemerintah (pajak), pegawai (gaji), pemilik (dividen) dan dana yang ditanamkan kembali. Informasi-informasi inilah yang membedakan dengan laporan laba rugi pada akuntansi konvensional yang hanya menekankan pada pencapaian laba bersih. Jadi, *value added statement* dalam hal ini merupakan bentuk kasih sayang yang wajib didistribusikan kepada seluruh stakeholdernya.

Laporan nilai tambah (*value added statement*) tersebut menegaskan bahwa betapa pentingnya pengelolaan zakat pada lembaga syariah khususnya Bank

Muamalat sebagai bank yang berbasis syariah. Dimana laporan nilai tambah syariah lebih sesuai dengan tujuan akuntabilitas dari akuntansi syariah.⁵ Hal ini pertanggungjawaban akuntansi syariah ditujukan kepada semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan.

Dengan adanya prinsip *tawazun*, *universalisme* dan *maslahah* maka memberikan implikasi bagi perangkat khususnya Bank Muamalat Cabang Makassar untuk merefleksikan zakat sebagai tujuan dan menjadi ukuran kinerja bagi seluruh stakeholdernya dan bagi nilai sosial Bank Muamalat Cabang Makassar. Zakat memberikan keseimbangan terhadap laporan keuangan akuntansi syariah, seperti yang dijelaskan bahwa tujuan dasar dari laporan keuangan akuntansi syariah yaitu menjadi bingkai yang akan menentukan bentuk dan elemen dari laporan keuangannya. Keseimbangan yang dimaksud adalah perpaduan antara karakter *egoistik* dan *altruistik* yang sejalan dengan prinsip *universalisme*, perpaduan antara karakter *materialistik* dan *spiritualistik* yang sejalan dengan prinsip *tawazun* dan perpaduan antara karakter *kuantitatif* dan *kualitatif* sejalan dengan prinsip *maslahah*.

Perpaduan antara karakter egoistik dan altruistik memberikan indikasi bahwa laporan keuangan Bank Muamalat Cabang Makassar tidak hanya berfokus pada pencapaian laba untuk *shareholder* (pemegang saham) tetapi Bank Muamalat Cabang Makassar juga harus berfokus pada kepentingan stakeholder lainnya yaitu melalui penyajian laporan zakat. Perpaduan antara karakter materialistik dan spiritualistik

⁵ *Ibid.*

memberikan indikasi bahwa laporan keuangan Bank Muamalat Cabang Makassar tidak hanya menunjukkan kinerja untuk pencapaian laba tetapi Bank Muamalat Cabang Makassar juga harus menunjukkan kinerja yang bernilai sosial sebagai pertanggungjaawaban kepada Allah SWT. Dan perpaduan antara karakter kuantitatif dan kualitatif memberikan indikasi bahwa laporan keuangan harus menyajikan informasi yang tidak hanya menyajikan informasi kuantitatif saja atau yang sifatnya keuangan/materi saja, tetapi laporan keuangan juga harus menyajikan informasi kualitatif yang berhubungan dengan realitas spiritual yang sifatnya tidak bisa diukur. Dengan adanya kedua karakter tersebut maka menciptakan kebermanfaatan nilai informasi yang disajikan oleh Bank Muamalat Cabang Makassar karena informasi tersebut memenuhi pertanggungjawaban kepada Allah SWT yang ditunjukkan dengan pemenuhan kepentingan semua stakeholder (pemegang saham (shareholder), masyarakat dan lingkungan masyarakat).

3. Prinsip *Adl* (Keadilan) Terkait Konsep Dasar Akuntansi

Keadilan ('adalah) berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya atau posisinya. Prinsip keadilan pada aturan muamalah yaitu melarang adanya unsur riba, kezaliman, *maysir* dan *gharar*. Bank Muamalat sebagai bank yang berbasis syariah harus menjalankan prinsip keadilan dengan menjauhi unsur-unsur tersebut. Prinsip keadilan dalam penyajian laporan keuangan mendukung kebutuhan informasi semua *stakeholder*, artinya tidak ada kebohongan dan hal yang disembunyikan. Sebagaimana hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS an-Nahl/16:105.

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ (٣٥)

Terjemahan:

“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong”.⁶

Hal itu berarti laporan keuangan harus menyajikan informasi yang benar-benar terjadi bukan suatu kebohongan atau rekayasa. Dengan mewujudkan hal tersebut maka laporan keuangan akan menciptakan nilai keadilan karena laporan keuangan yang disajikan memberikan informasi yang sebenarnya. Dan hal tersebut mewujudkan keseimbangan informasi untuk seluruh stakeholdernya yang berarti laporan keuangan tidak menyesatkan dan menjadi informasi terpenting dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang menegakkan nilai keadilan akan mencerminkan bahwa laporan keuangan tidak hanya berfokus pada tujuan dunia saja (pencapaian laba) tetapi tujuan akhirat juga diutamakan. Dan dengan terhindarnya laporan keuangan berarti Bank Muamalat Cabang Makassar telah berusaha beriman kepada ayat-ayat Allah SWT. Dan hal ini diwujudkan dengan menghindari unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Riba dalam Pembayaran Tangguhan Pembiayaan Murabahah

Riba atau bunga diartikan sebagai tambahan pada pokok piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam meminjam. Riba yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tambahan pembayaran atas transaksi murabahah yang tidak secara tunai, selain keuntungan akibat adanya penangguhan waktu. Hal ini dilakukan dengan

⁶ *Loc.Cit.*, h. 279.

melihat jumlah pembayaran transaksi murabahah secara tunai dan secara tangguhan dalam akad yang sama.

Pembayaran tangguhan yang dijalankan oleh Bank Muamalat Cabang Makassar terjadi dalam produk pembiayaan. Dalam penelitian ini pembayaran tangguhan difokuskan pada produk pembiayaan murabahah. Hal ini karena pembayaran murabahah pada bank syariah diberlakukan secara konsisten antara pembayaran tunai dengan pembayaran tangguhan. Sebagaimana contoh yang diberikan oleh Bapak Ridwan Umar mengenai perhitungan jumlah pembayaran tangguhan,

“Misalnya murabahah, nasabah memesan barang pada bank dengan harga Rp 1.000.000.000,-, dengan margin keuntungan Rp 300.000.000,-. Maka secara tunai maupun angsuran jumlah pembayarannya tetap sama Rp 1.300.000.000,-. Maka Rp 1.300.000.000,- adalah jumlah yang harus dibayar sampai selesainya waktu pembayaran”.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Ibu Nur Qalbi,

“Jumlah pembayaran sesuai dengan jumlah pada awal akad, yaitu harga pembelian barang ditambah keuntungan yang diharapkan”.

Hal itu berarti Bank Muamalat Cabang Makassar dalam menetapkan jumlah pembayaran pada pembiayaan dilakukan secara konsisten. Dan margin keuntungan hanya ditetapkan satu kali diawal akad. Misalnya:

Barang dijual kepada pembeli dengan harga perolehan sebesar Rp 100.000.000,-, sedangkan margin keuntungan Rp 16.367.790,-. Maka jumlah yang harus dibayarkan baik secara tunai maupun tangguhan adalah sebesar Rp 116.367.790,- (Rp 100.000.000,- + Rp 16.367.790,-). Jika pembayaran secara tangguhan maka margin keuntungan dibayarkan sesuai dengan persentase

pembayaran pokok pinjaman setiap periode pembayaran. (Semua persyaratan pembayaran harus jelas dalam akad). Untuk memperoleh harga jual pada produk murabahah maka persamaannya sebagai berikut:

$$\text{Harga Perolehan} + \text{Margin Keuntungan} = \text{Harga Jual}$$

Perhitungan pembayaran tangguhan:

Jadwal angsuran

Harga Beli : Rp 100.000.000,-

Margin : Rp 16.367.970,-

Harga jual : Rp 116.367.970,-

Jangka waktu : 24 bulan

Tabel 4.2

Angsuran Pembayaran Tangguhan Pembiayaan Murabahah

Bulan	Angsuran Harga Jual	Sisa Angsuran	Tanggal Angsuran
1	Rp 4.848.660,-	Rp 111.519.310,-	4 – Juni-2015
2	Rp 4.848.660,-	Rp 106.670.650,-	4 – Juli-2015
3	Rp 4.848.660,-	Rp 101.821.990,-	4 – Agustus-2015
4	Rp 4.848.660,-	Rp 96.973.330,-	4 – September-2015
5	Rp 4.848.660,-	Rp 92.124.670,-	4 – Oktober-2015
6	Rp 4.848.660,-	Rp 87.276.010,-	4 – November-2015

7	Rp 4.848.660,-	Rp 82.427.350,-	4 – Desember-2015
8	Rp 4.848.660,-	Rp 77.578.690,-	4 – Januari-2016
9	Rp 4.848.660,-	Rp 72.730.030,-	4 – Februari-2016
10	Rp 4.848.660,-	Rp 67.881.370,-	4 – Maret-2016
11	Rp 4.848.660,-	Rp 63.032.710,-	4 – April-2016
12	Rp 4.848.660,-	Rp 58.184.050,-	4 – Mei-2016
13	Rp 4.848.660,-	Rp 53.335.390,-	4 – Juni-2016
14	Rp 4.848.660,-	Rp 48.486.730,-	4 – Juli-2016
15	Rp 4.848.660,-	Rp 43.638.070,-	4 – Agustus-2016
16	Rp 4.848.660,-	Rp 38.789.410,-	4 – September-2016
17	Rp 4.848.660,-	Rp 33.940.750,-	4 – Oktober-2016
18	Rp 4.848.660,-	Rp 29.092.090,-	4 – November-2016
19	Rp 4.848.660,-	Rp 24.243.430,-	4 – Desember-2016
20	Rp 4.848.660,-	Rp 19.394.770,-	4 – Januari-2017
21	Rp 4.848.660,-	Rp 14.546.110,-	4 – Februari -2017
22	Rp 4.848.660,-	Rp 9.697.450,-	4 – Maret-2017
23	Rp 4.848.660,-	Rp 4.848.790,-	4 – April-2017
24	Rp 4.848.660,-	-	4 – Mei-2017
Total	Rp 116.367.970,-	-	

Contoh di atas membuktikan bahwa pembayaran tangguhan yang dilakukan pada produk pembiayaan murabahah tidak mengandung nilai waktu dari uang artinya tidak ada bunga akibat ditagguhkannya waktu pembayaran. Karena jumlah pembayaran tunai dan pembayaran tangguhan tetap sama. Artinya jika dalam akad jumlah pembayarannya Rp 116.367.970,- berarti sampai selesainya jangka waktu pembayaran bank hanya menerima sebesar jumlah pembayaran tersebut yaitu Rp 116.367.970,-. Dengan melihat tabel di atas maka menunjukkan bahwa mark-up/margin yang ditetapkan hanya satu kali untuk satu kali transaksi, artinya nasabah tidak diperkenankan untuk membayar mark-up/margin tersebut setiap jangka waktu tertentu.

Namun yang menjadi masalah ketika harga barang yang dijual (harga beli) sama dalam akad yang berbeda (jangka waktu pembayarannya berbeda). Adanya jangka waktu yang berbeda tersebut menyebabkan persentase margin keuntungan juga berbeda. Sebagaimana contoh yang diberikan oleh Ibu Nur Qalbi mengenai penetapan margin keuntungan,

“Harga standar ditambah dengan keuntungan efektif. Misalnya harga jangka waktu pembayaran 5 tahun ditentukan keuntungan efektif 15% dari harga standar”.

Hal ini mengindikasikan bahwa bank menentukan besarnya margin keuntungan masih berpatokan dari jangka waktu pembayaran atau dalam hal nilai dari waktu pembayaran untuk menentukan margin keuntungan.

Pada hakekatnya pembayaran tangguhan yang bebas dari unsur riba hanya berdasarkan pokok pinjaman dan margin keuntungan yang telah ditentukan

sebelumnya pada produk pembiayaan murabahah dan mudharabah Bank Muamalat. Tidak ada unsur penambahan pembayaran akibat penambahan waktu pembayaran, karena pada dasarnya semua tambahan kecuali pokok pembayaran dan keuntungan yang telah disepakati merupakan bentuk riba terlebih penerapan nilai waktu dari uang. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS ar-Rum/30: 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ
(٣٩)

Terjemahan:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah maka itulah orang-orang yang melipatandakan (pahalanya)”.⁷

Salah satu bentuk dari praktek riba adalah adanya pertambahan nilai dari uang yang harus dibayarkan ketika terjadi pembayaran tangguhan. Hal tersebut didasarkan nilai uang di masa sekarang tidak sama dengan nilai uang di masa yang akan datang, artinya konsep ini mengacu pada *time value of money*. Nilai waktu dari uang mengacu pada konsep dasar penyusunan laporan keuangan yaitu *historical cost*. *Historical cost* memaknai bahwa nilai uang sekarang lebih tinggi dibandingkan nilai uang di masa yang akan datang. Konsep laba dalam pendekatan historical cost secara implisit mengakui adanya *time value of money*.⁸ Adanya nilai waktu dari uang (*time*

⁷ *Loc. Cit.*, h. 408.

⁸ Ery Wibowo, “Dimensi Keadilan Dalam Epistemologi Akuntansi Syariah”, *Value Added*, Vol.3, No.2, (2007), h. 18

value of money) karena uang sendiri dijadikan sebagai satuan ukur. Hal itu menjadi salah satu konsekuensi dari penggunaan konsep satuan mata uang (unit moneter). Padahal dalam ajaran Islam menyatakan bahwa waktulah yang memiliki nilai ekonomi bukan uang yang memiliki nilai waktu “*economic value of time*”. Hal ini berarti bahwa faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu. Semakin efektif dan efisien maka akan semakin tinggi nilai waktunya (mendapatkan keuntungan). Adanya nilai waktu dari uang akibat riba memang akan memperlihatkan bahwa pendapatan yang diperoleh bank namun pendapat yang demikian tersebut tidak akan membawa kebaikan karena hanya menguntungkan dari pihak bank saja.

Riba (tambahan) yang diberlakukan untuk menambah harta manusia tidaklah menambah balasan di sisi Allah SWT. Begitu juga dari segi pembayaran tangguhan, tambahan atas pembayaran selain pembayaran pokok dan margin keuntungan yang telah ditentukan tidak akan menambah pahala di sisi Allah SWT karena adanya penambahan keuntungan dari ketidakikhlasan atas pinjaman tersebut. Hal ini mendasari bahwa konsep dasar *historical cost* dan unit moneter (uang) yang mengandung *prinsip time value of money* tidaklah sesuai dengan nilai-nilai syariah karena masih mengandung unsur riba. Hal itu karena *time value of money* memberikan indikasi bahwa pembayaran yang dilakukan secara tangguh akan menambah jumlah pembayaran karena nilai uang dari waktu ke waktu mengalami penurunan.

b. Unsur *Gharar* dalam Pengakuan Pendapatan Pembiayaan Mudharabah

Gharar diartikan sebagai ketidakjelasan atau eksploitasi informasi. Gharar dalam penelitian ini yaitu adanya ketidakpastian informasi dalam laporan keuangan berupa pendapatan yang sesungguhnya diterima oleh bank. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi waktu terjadinya bagi hasil antara bank sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola dana.

Hal yang sangat krusial dalam produk pembiayaan bagi hasil adalah pengakuan pendapatan. Produk pembiayaan yang menjadi fokus pada bagian ini yaitu mudharabah. Bank Muamalat Cabang Makassar melakukan bagi hasil dan mengakui pendapatan ketika keuntungan usaha yang dijalankan telah diterima dalam bentuk kas oleh nasabah. Sebagaimana pernyataan dari Bapak Ridwan Umar,

“Bagi hasil dilakukan ketika akhir bulan setiap periode pembayaran setelah keuntungan dapat direalisasi.

Pernyataan lain dari Bapak Ridwan Umar mengenai jumlah pembayaran tidak dapat ditentukan dengan pasti karena pendapatan tidak dapat diketahui secara langsung, yaitu

“Dan jumlah pembayaran pun tidak tetap karena keuntungan dari koperasi belum dapat diketahui secara langsung”.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan Ibu Nur Qalbi,

“Setelah pendapatan atau keuntungan terealisasi”.

Dalam hal ini berarti bank menerapkan konsep *cash basic*. Dan hal tersebut menegaskan, walaupun transaksi telah terjadi namun pendapatan atau keuntungan dari usaha yang dijalankan tidak dapat langsung diakui. Artinya pendapatan hanya

dapat diakui pada saat angsuran diterima secara tunai.⁹ Dan hal tersebut bertolak belakang dengan konsep *accrual basic*.

Dari pernyataan tersebut sangatlah jelas bahwa *accrual basic* sebagai konsep dasar dalam pengakuan pendapatan tidak tepat untuk diterapkan pada produk bagi hasil mudharabah. *Accrual basic* merupakan metode pengakuan pendapatan ketika transaksi telah terjadi walaupun pendapatan belum diperoleh dalam bentuk kas. Penggunaan *accrual basic* pada pengakuan pendapatan produk bagi hasil akan menghasilkan ketidakjelasan. Artinya pendapatan yang akan dilaporkan bukan merupakan jumlah pasti yang diterima oleh pemilik dana dan pengelola dana karena pengakuan pendapatan bukan atas dasar kas yang benar-benar ada atau diterima oleh pengelola dana. Sehingga adanya ketidakpastian tersebut memunculkan risiko bagi pemilik modal. Karena keuntungan yang akan diperoleh dari pengelolaan dana pemilik dalam hal ini bank tidak dapat diketahui secara pasti. Sehingga pengembalian dari modal memiliki risiko. Sedangkan bagi hasil yang dilakukan antara pihak pemilik dana dan pengelola dana harus dari jumlah kas yang benar-benar dapat didistribusikan langsung. Dan hal tersebut tidak dapat dilakukan dengan menerapkan konsep *accrual basic*. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Q.S. Luqman/31:34, memberikan indikasi bahwa *accrual basic* (khususnya pendapatan) tidak diperkenankan "Dan tidaklah seorangpun tahu apa yang akan diusahakannya besok". Dari hal inilah sangat jelas bahwa pengakuan pendapatan dengan *accrual basic* atau

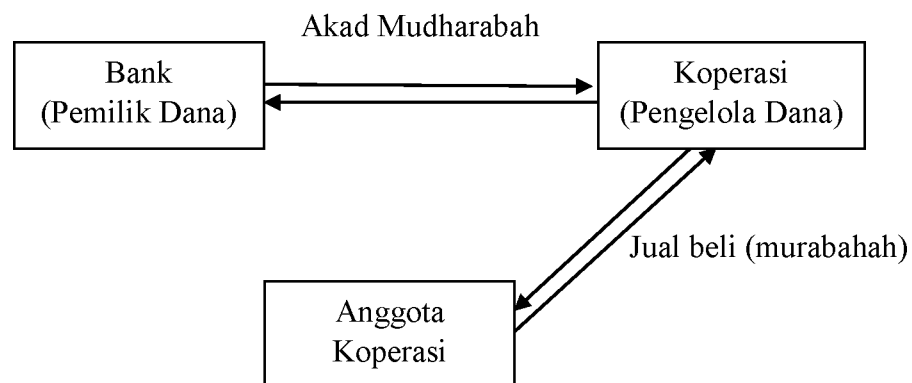
⁹ *Loc. Cit.*, h. 40.

mengakui pendapatan sebelum adanya kas diterima tidak diperbolehkan karena mengandung ketidakjelasan apakah kas tersebut bisa diterima dikemudian hari atau akan menjadi risiko tidak tertagihnya hak dari bank itu sendiri. *Accrual basic* mengandung ketidakjelasan, hal itu karena masih ada piutang yang belum tertagih yang berasal dari pendapatan. Sementara ketika pendapatan tersebut diakui sebelum menjadi kas atau dalam hal ini piutang, berarti masih ada kemungkinan bahwa pendapatan tersebut belum jelas apakah dapat diterima dikemudian hari atau akan menjadi pendapat yang tidak bisa direalisasikan karena munculnya piutang tak tertagih. Hal itu berarti *accrual basic* tidak bisa memberikan gambaran pasti mengenai pendapatan yang *real* dimiliki oleh bank.

Salah satu produk pembiayaan mudharabah yang dikeluarkan Bank Muamalat Cabang Makassar yaitu untuk pengembangan koperasi.

Gambar 4.5

Skema Mudharabah (Antara Bank dan Koperasi)



Adapun persamaan dari jumlah pembayaran mudharabah, yaitu

$$\text{Pinjaman Pokok} + \text{Nisbah} = \text{Pembayaran Mudharabah}$$

Gambar di atas menunjukkan bahwa antara bank dan koperasi (nasabah) melakukan akad mudharabah. Koperasi sebagai pengelola, menggunakan dana dari bank dalam kegiatan jual beli murabahah. Keuntungan dari usaha koperasi dalam hal jual beli murabahah akan dibayarkan setiap akhir bulan kepada bank sebesar pinjaman pokok dan nisbah bagi hasil dari keuntungan. Bank tidak memperbolehkan koperasi untuk menjalankan usaha dalam akad mudharabah. Bank ingin memperoleh kejelasan mengenai kepastian keuntungan yang akan diterima pada akhir bulan. Hal ini karena dana yang digunakan dalam produk pembiayaan mudharabah merupakan dana dari pihak lain yang tentunya mengharapkan pengembalian dari bank atas pembiayaan tersebut. Hal tersebut tentunya memberikan kejelasan bahwa bank menghindari risiko kerugian dan ketidakpastian dari penerimaan keuntungan.

Pembayaran tangguhan pada produk pembiayaan mudharabah tidak dapat ditentukan secara pasti dalam akad dan jumlah pembayaran setiap periode juga tidak selalu sama. Hal itu menegaskan jumlah yang akan dibayarkan secara keseluruhan belum bisa ditentukan secara pasti, karena jumlah pembayaran ditentukan oleh pembayaran pokok dan jumlah keuntungan yang diperoleh. Sementara, keuntungan secara pasti dapat diketahui pada akhir periode pembayaran (akhir bulan). Hal ini berarti ketidakkonsistenan pembayaran setiap periode bukan karena adanya nilai waktu dari uang, tetapi karena besarnya jumlah keuntungan dari pengelolaan tersebut tidak dapat ditentukan secara langsung pada akad melainkan melalui nisbah bagi hasil. Selain itu hal ini juga menegaskan bahwa ketika jumlah pembayaran dalam

produk mudharabah ditetapkan pada akad maka hal tersebut mengandung ketidakjelasan.

c. Unsur *Maysir* dalam Penilaian Aset Tetap Untuk Pembayaran Zakat

Maysir diartikan sebagai sikap spekulatif dan tidak berhubungan dengan produktivitas. Maysir dalam penelitian ini yaitu adanya sikap spekulatif dalam penilaian aset dengan tujuan untuk menekan pembayaran zakat. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi metode penilaian aset nonkas yang diperoleh untuk diperdagangkan (tanah dan bangunan). Bank Muamalat sebagai bank yang berbasis syariah menerapkan zakat, yang tentunya jumlah dari pembayaran zakat setiap tahunnya berbeda karena didasarkan atas aset yang dimiliki. Tinggi atau rendahnya jumlah zakat yang dikeluarkan oleh bank sangat tergantung dasar penilaian atas aset yang menjadi objek zakat.

Dari penelitian yang dilakukan pada Bank Muamalat, diperoleh bahwa untuk menilai aset tetap maka bank berpegang pada nilai pasar yang dapat direalisasikan. Hal itu juga sejalan dengan penilaian jaminan oleh bank yang menggunakan nilai pasar. Diidentifikasi bahwa Bank Muamalat melakukan penilaian aset nonkas (tanah dan bangunan) dengan menggunakan metode *net realizable value*. Sebagaimana pernyataan dari Ibu Nur Qalbi,

“Untuk penilaian terhadap aset tidak bergerak bank dilakukan berdasarkan harga sekarang artinya nilai yang dapat direalisasikan”.

Net realizable value diartikan sebagai nilai bersih yang dapat direalisasikan atas aset dengan berpatokan pada nilai pasar.¹⁰ Nilai pasar dalam *net realizable value* memberikan gambaran keadaan ekonomi yang sebenarnya dibandingkan dengan *historical cost*.¹¹ *Net realizable value* merupakan metode yang tepat untuk menghitung nilai aset nonkas untuk tujuan zakat.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa penggunaan metode penilaian zakat dengan *historical cost* memberikan kesan spekulatif karena *historical cost* tidak memberikan gambaran sekarang nilai zakat. Sedangkan zakat yang dibayarkan harus mencerminkan nilai dari kekayaan sekarang yang dimiliki oleh bank. Adanya penggunaan *historical cost* pada penilaian zakat berarti nilai aset yang dijadikan objek zakat berpatokan pada nilai kas yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut. Padahal aset tersebut nilainya tidak selalu konsisten dari tahun ke-tahun. Hal tersebut memunculkan jumlah zakat yang dibayarkan oleh bank lebih rendah dari yang seharusnya. Contohnya tanah ataupun bangunan yang selalu mengalami renovasi atau perbaikan dari tahun ke-tahun yang memiliki nilai yang cenderung naik. Ketika aset tetap tersebut dinilai berdasarkan *historical cost* berarti jumlah zakat yang dikeluarkan lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan *net realizable value*

¹⁰ Gambling dan Karim dalam Iwan Triyuwono, *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, (2009), h. 201.

¹¹ Abu Bakar (2007) dalam Ali Farhan, “Metode Perhitungan Zakat Perusahaan Pada CV. Minakjinggo” jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/403.

atau nilai realisasi bersih, karena nilai aset nonkas seperti tanah dan bangunan cenderung mengalami kenaikan.

Penggunaan *historical cost* dalam penilaian aset tetap yang akan dijadikan objek zakat memberikan kesan spekulatif dari bank karena jumlah zakat yang dibayarkan tidak sesuai dengan nilai yang dapat direalisasikan dari aset tersebut. Dan dalam Islam sikap spekulatif tidak boleh diterapkan karena menunjukkan ketidakadilan dalam penyajian informasi. Sebagaimana dalam Al-Qur'an QS al-Maidah/5: 90 yang mengharamkan judi karena memberikan unsur spekulatif. Hal ini menegaskan bahwa penggunaan *historical cost* yang memberikan peluang bagi Bank Muamalat untuk mengeluarkan zakat yang lebih kecil dari yang seharusnya karena adanya penilaian aset tetap yang terlalu rendah seperti tanah dan bangunan padahal nilai tanah yang cenderung naik dan bangunan jika mengalami perawatan dan tempatnya strategis cenderung nilainya juga akan naik. Ini mengindikasikan bahwa hal tersebut mengandung unsur maysir atau spekulatif tidak diperbolehkan dalam Islam bahkan perbuatan tersebut haram hukumnya.

Bukan hanya khusus untuk aset tetap, nilai yang terhitung dalam neraca juga harus menggunakan nilai saat ini. Dengan menggunakan nilai sekarang maka diharapkan mampu mengatasi kelemahan dari *historical cost* yang kurang cocok dengan pola perhitungan zakat yang mengharuskan kekayaan dengan nilai sekarang. Dengan menggunakan nilai sekarang/saat ini seperti yang digunakan oleh Bank Muamalat Cabang Makassar yaitu *net realizable value* akan mempermudah pengguna

laporan keuangan untuk mengambil keputusan karena nilai yang disajikan lebih relevan dibanding dengan *historical cost*.

Historical cost memberikan kesan spekulatif dalam perhitungan zakat utamanya dalam penilaian aset tetap. *Historical cost* memberikan peluang untuk menghemat zakat yang seharusnya dibayarkan. Padahal inti dari keberhasilan bank ataupun lembaga syariah lainnya adalah seberapa besar zakat yang mampu dibayarkan. *Historical cost* tidak mengandung nilai sebenarnya dari aset, terlebih bagi aset tetap. Nilai yang seharusnya dilaporkan tinggi, namun karena menggunakan nilai perolehannya menjadi rendah karena kecenderungan aset tetap mengalami peningkatan nilai.

d. Unsur Kezaliman dalam Penanggungan Biaya Perbaikan Pembiayaan Ijarah

Kezaliman didefinisikan sebagai hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini kezaliman diartikan memperlakukan sesuatu tidak sesuai tempatnya/posisinya. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi pihak yang menanggung biaya perbaikan pada pembiayaan ijarah (sewa). Biaya perbaikan pada produk pembiayaan ijarah harus ditanggung oleh pihak yang benar-benar memiliki kewajiban menanggungnya. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa Bank Muamalat harus memperlakukan biaya perbaikan pada pembiayaan ijarah sesuai dengan posisinya.

Penelitian ini menemukan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan ijarah Bank Muamalat tidak dilakukan dengan sendirinya, artinya sebelum bank melakukan akad ijarah terlebih dahulu nasabah dan bank melakukan akad musyarakah. Akad

musyarakah yang dilakukan oleh bank dan nasabah menunjukkan kepemilikan bank dan nasabah 90:10 (bank 90 dan nasabah 10). Salah satu contoh akad ijarah yang didahului dengan akad musyarakah dilakukan oleh Bank yaitu pembangunan gedung. Gedung tersebut dibangun dengan modal bank 90% dan modal nasabah 10%. Hal itu menunjukkan adanya kemitraan dalam pembangunan gedung tersebut atau akad musyarakah. Selama pembangunan gedung tersebut biaya perbaikan ditanggung oleh bank dan nasabah berdasarkan kepemilikan modal. Sebagaimana pernyataan dari Ibu Nur Qalbi,

“Bank melakukan akad ijarah dengan didahului dengan akad musyarakah. Artinya ketika ada kerusakan selama pembangunan misalnya properti yang menjadi objek ijarah maka pihak yang menanggung biaya perbaikan adalah nasabah dan bank sesuai dengan proporsi modal misalnya 90: 10”.

Sedangkan setelah selesainya pembangunan tersebut yang ditandai dengan dimulainya akad ijarah maka yang menanggung biaya perbaikan adalah nasabah. Hal itu karena kepemilikan bank akan berubah menjadi 0% sementara kepemilikan nasabah menjadi 100%, ini karena akad ijarah didasari dengan akad musyarakah. Sebagaimana pernyataan dari Bapak Muhidin,

“Untuk biaya perbaikan tetap ditanggung oleh nasabah karena kepemilikan dari bank akan semakin berkurang sampai 0 bagian dan nasabah menjadi 100%”.

Kedadaan tersebut menunjukkan bahwa pihak bank memperoleh bagi hasil melalui penyewaan tersebut. Akad musyarakah yang dilakukan menunjukkan, pada akhir periode pembayaran, kepemilikan penuh akan diperoleh oleh nasabah, karena adanya perjanjian untuk menjual di awal akad.

Penjelasan tersebut mengidentifikasi bahwa pihak yang menanggung biaya perbaikan pada pembiayaan ijarah adalah nasabah sebagai pihak yang memiliki gedung pada akhir pembayaran akad musyarakah. Hal ini mengindikasikan bahwa pihak yang menanggung biaya perbaikan haruslah pemilik dari gedung tersebut. Dalam hal ini pembiayaan ijarah merupakan akad yang diperjanjikan oleh bank dan nasabah untuk melakukan bagi hasil, artinya adanya akad ijarah karena adanya akad musyarakah.

Sebenarnya dalam transaksi, bank dan nasabah melakukan dua akad yaitu musyarakah dan ijarah. Akad musyarakah yang dilakukan secara langsung dengan bank, dan akad ijarah secara tidak langsung telah diperjanjikan bahwa bank dan nasabah akan menyewakan gedung, artinya bagi hasil diperoleh dari penyewaan gedung tersebut. Namun yang menjadi masalah bahwa dalam akad musyarakah yang terjadi, kepemilikan bank 90% dan kepemilikan nasabah 10% dari modal pembangunan gedung. Artinya ketika terjadi perbaikan terhadap gedung tersebut dan seluruh biaya ditanggung oleh nasabah maka terjadi kezaliman. Dimana biaya yang seharusnya ditanggung berdua oleh nasabah dan bank sebagai pemilik hanya ditanggung oleh nasabah karena adanya akad musyarakah yang menandakan adanya penjualan di kemudian hari kepada nasabah. Padahal jika dilihat dari kepemilikan modal selama kepemilikan nasabah belum menjadi 100% maka biaya perbaikan tetap harus ditanggung berdua sebagai pemilik. Penanggung biaya perbaikan yang dilakukan oleh bank tidak diperlakukan sesuai dengan porsi, artinya masih ada unsur kezaliman dan Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang zalim,

sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Hud/11:18 “Ingatlah, laknat Allah (ditimpahkan) kepada orang yang zalim”. Sangat jelas dari ayat tersebut, ketika biaya perbaikan yang seharusnya ditanggung oleh bank namun pada kenyataannya nasabah yang menanggungnya, maka hal tersebut menimbulkan kezaliman kepada nasabah karena biaya perbaikan tidak diposisikan sebagaimana mestinya. Jika bank dan nasabah sebagai pemilik maka seharusnya biaya perbaikan tetap ditanggung berdua sesuai kepemilikan gedung tersebut sampai pada akhirnya kepemilikan akan menjadi 100% untuk nasabah.

Di luar dari pada itu jika melihat perlakuan biaya perbaikan tersebut maka bank sudah menghindari konsep *substance over form*. Dimana penyewa tidak lagi menanggung biaya perbaikan gedung, melainkan ditanggung oleh pemilik (bank dan nasabah). *Substance over form* yang artinya bank memperlakukan biaya perbaikan berdasarkan penggunaan manfaat ekonomis objek yang disewakan. *Substance over form* pada hakekatnya lebih mementingkan transaksi dari pada bentuk hukum transaksi itu sendiri. Konsep substance over form pada pengakuan beban bank akan menimbulkan kepercayaan bahwa pihak bank sebagai pemilik dari objek ijarah tidak perlu menanggung biaya perbaikan yang timbul dari objek ijarah karena bentuk hukum kepemilikan tersebut tidak penting lagi, karena pihak yang menikmati manfaat ekonomis objek ijarah tersebutlah yang harus menanggung biaya tersebut. Sehingga konsep ini mengakibatkan laba yang diperoleh akan lebih tinggi karena ada beban yang tidak perlu diakui oleh bank yaitu beban perbaikan yang berasal dari objek ijarah, atau dengan kata lain konsep substance over form memberikan pemahaman bahwa

ada beban yang boleh tidak diakui dan hal tersebut memunculkan kezaliman bagi nasabah atau dalam hal ini penyewa.

Ketentuan syariah tidak mengenal konsep ini karena seluruh transaksi didasarkan atas akad dan akad tersebut selalu sama antara bunyi akad (dalam bentuk hukum) dengan substansi dari akad itu sendiri.¹² Yang berarti ketika terjadi akad ijarah, yang menanggung biaya perbaikan adalah pemilik dari objek yang disewakan tersebut. Beda halnya dengan konsep *substance over form*, biaya perbaikan ditanggung oleh penyewa karena penyewa yang menikmati manfaat ekonomis dari objek yang disewakan tersebut.

Konsep *substance over form* menunjukkan adanya kezaliman, terkhusus dalam perlakuan biaya perbaikan. Adanya pemahaman bahwa pihak yang menanggung biaya adalah pihak yang menyewa karena merupakan pihak yang menikmati manfaat dari objek ijarah tersebut. Padahal dalam ketentuan syariah pihak yang memiliki objek ijarah tersebut adalah pihak yang menanggung biaya perbaikan. Alasan tersebut diperkuat karena pihak penyewa pada hakekatnya telah membayar kepada pihak yang menyewakan atas manfaat ekonomis objek ijarah yang dinikmati penyewa. Selama penyebab dari keluarnya biaya perbaikan bukan dari pihak penyewa maka biaya perbaikan masih ditanggung oleh pemilik. Begitupun dengan nasabah dan bank, ketika akad ijarah didasarkan pada akad musyarakah berarti biaya perbaikan masih harus ditanggung oleh kedua pihak sesuai dengan porsi kepemilikan, sampai

¹² *Loc. Cit.*, h. 105.

kepemilikan menjadi 100% untuk nasabah, kecuali kerusakan disebabkan oleh penyewa maka penyewalah yang harus menanggung biaya perbaikan tersebut.

Prinsip keadilan pada praktik akuntansi modern terutama yang berkaitan dengan pengelolaan bank syariah karena pengelolaan tersebut akan berdampak pada penyajian informasi dalam laporan keuangan memberikan indikasi bahwa informasi akuntansi mengandung nilai-nilai keadilan. Prinsip keadilan mengaskan bahwa praktek akuntansi modern saat ini bebas dari unsur riba, gharar, maysir dan kezaliman, sehingga laporan keuangan yang disajikan telah bebas dari unsur-unsur tersebut. Sehingga laporan keuangan menyajikan informasi yang dapat merugikan pengguna informasi itu sendiri khususnya dalam hal ini *shareholder* (pemegang saham). Dan hal itulah yang ingin diwujudkan dalam pengelolaan Bank Muamalat Cabang Makassar.

Prinsip keadilan dengan penghindaran terhadap unsur riba, yang berarti laporan keuangan yang disusun menyajikan informasi bahwa pengelolaan Bank Muamalat terkait pembayaran tangguhan bebas dari unsur riba kecuali dalam hal penentuan margin keuntungan. Sehingga informasi dalam laporan keuangan bersifat adil kepada bank dan stakeholder khususnya nasabah, karena pembayaran tangguhan bebas dari unsur riba dengan perhitungan jumlah pembayaran dalam setiap periode pembayaran sifatnya konstan. Hanya saja dalam penentuan margin pihak bank belum dapat menyajikan informasi yang adil kepada nasabah karena keuntungan ditentukan berdasarkan waktu pembayaran. Dan hal itu mengindikasikan bahwa informasi dalam laporan keuangan masih mengandung unsur riba yang artinya keuntungan yang

diperoleh masih berpihak pada bank, artinya belum mencapai keadilan kepada pihak nasabah.

Prinsip keadilan dengan penghindaran terhadap unsur *gharar*, yang berarti laporan keuangan yang disusun menyajikan informasi bahwa pengelolaan Bank Muamalat terkait dengan pengakuan pendapatan bebas dari unsur *gharar*. Sehingga informasi dalam laporan keuangan bersifat adil kepada bank dan *stakeholder* khususnya investor, karena pendapatan diakui pada saat pendapatan tersebut benar-benar dapat direalisasi dari pembagian hasil antara bank dan nasabah. Dan hal tersebut mengindikasikan bahwa laporan keuangan disajikan bebas dari unsur *gharar* dan menunjukkan bahwa laporan keuangan mencapai nilai keadilan antara bank dan investor.

Prinsip keadilan dengan penghindaran terhadap unsur *maysir*, yang berarti laporan keuangan yang disusun menyajikan informasi bahwa pengelolaan Bank Muamalat terkait penilaian aset nonkas (tanah dan bangunan) bebas dari unsur *maysir*. Sehingga informasi dalam laporan keuangan bersifat adil kepada bank dan *stakeholder* khususnya masyarakat umum, karena aset nonkas dinilai berdasarkan nilai sekarang yang dapat direalisasikan. Dan hal tersebut mengindikasikan bahwa laporan keuangan disajikan bebas dari unsur *maysir* dan menunjukkan bahwa laporan keuangan mencapai nilai keadilan antara bank dan masyarakat umum untuk pembayaran zakat.

Dan prinsip keadilan dengan penghindaran terhadap unsur kezaliman, yang berarti laporan keuangan yang disusun menyajikan informasi bahwa pengelolaan

Bank Muamalat terkait penanggungan biaya perbaikan dari objek yang disewakan bebas dari unsur kezaliman, namun pada kenyataannya unsur ini belum dapat dihindari. Sehingga informasi dalam laporan keuangan belum bersifat adil kepada *stakeholder* khususnya nasabah, karena biaya perbaikan dari objek yang disewakan hanya ditanggung oleh pihak nasabah. Dan hal tersebut mengindikasikan bahwa laporan keuangan disajikan belum bebas dari unsur *maysir* dan menunjukkan bahwa laporan keuangan belum mencapai nilai keadilan antara bank dan nasabah.

Penerapan prinsip keadilan pada Bank Muamalat Cabang Makassar yang berhubungan dengan penelitian ini menegaskan bahwa konsep dasar historical cost, accrual basic dan *substance over form* tidak sesuai karena belum mengandung prinsip keadilan. Hal itu karena penggunaan historical cost mengandung unsur riba dan *maysir*. Yang berarti *historical cost* diterapkan oleh bank untuk meningkatkan keuntungan dan menekan pembayaran zakat. Selain itu penggunaan *accrual basic* mengandung unsur *gharar*, yang berarti bank menggunakan *accrual basic* agar pendapatan dalam laporan keuangan terlihat tinggi dan hal ini menunjukkan bahwa *accrual basic* mengandung manipulasi atau spekulatif. Sedangkan penggunaan *substance over form* mengandung unsur kezaliman, yang berarti *substance over form* diterapkan oleh bank untuk menghindari tanggung jawabnya sebagai pihak pemilik dari objek ijarah. dan diantara konsep dasar tersebut, *historical cost* yang mengandung unsur riba dan *substance over form* yang mengandung unsur kezaliman belum dapat dihindari sepenuhnya oleh Bank Muamalat Cabang Makassar.

Prinsip *ukhuwah, tawazun, universalisme, maslahah* dan *adl* dalam penelitian ini yang merupakan asas transaksi bank syariah harus dijalankan oleh Bank Muamalat Cabang Makassar. Penerapan masing-masing prinsip tersebut dikaitkan dengan beberapa transaksi yang dijalankan pada bank. Dari penerapan prinsip-prinsip tersebutlah maka dapat diungkap bahwa pada realitasnya laba yang disajikan dalam laporan keuangan dari keuntungan bank atas pembiayaan yang dilakukan harus menjunjung nilai-nilai persaudaraan sehingga keuntungan tersebut tidak diperoleh dari kerugian nasabah. Realitas lain juga diungkap bahwa tujuan dari Bank Muamalat Cabang Makassar harus berorientasi pada zakat untuk menunjukkan kinerja operasional dan kinerja untuk semua stakeholder serta kinerja sosial sehingga adanya pelaporan zakat memenuhi kebutuhan informasi semua *stakeholder* bank. Dan realitas yang tidak kalah pentingnya yaitu penelitian ini mengungkap konsep dasar yang tidak sesuai untuk diterapkan dalam perlakuan beberapa transaksi dalam Bank Muamalat Cabang Makassar, sehingga ketika bank menghindari konsep dasar tersebut dalam transaksi yang dimaksud penelitian ini maka dapat dinyatakan bahwa bank berusaha menciptakan nilai keadilan dalam pengelolaan bank yang berdampak pada penyajian laporan keuangan. Dan semua prinsip-prinsip syariah tersebut harus dijalankan untuk menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Meskipun prinsip-prinsip syariah tersebut belum dapat dijalankan sepenuhnya oleh Bank Muamalat Cabang Maksassar sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini didasarkan pada pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Makassar, dimana penerapan prinsip-prinsip syariah tersebut menunjukkan tata kelola bank yang sesuai dengan nilai-nilai syariah/Islam. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam penelitian ini yaitu berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan. Prinsip-prinsip syariah pada Bank Muamalat memang menjadi hal yang wajib diterapkan, hal ini sejalan dengan teori kepatuhan dan konsep masalah. Bahwa Bank Muamalat pada hakekatnya merupakan bank yang berbasis syariah yang harus patuh terhadap prinsip-prinsip syariah sebagai wujud dari nilai-nilai Islam dalam pengelolaannya termasuk hal-hal yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Karena laporan keuangan mengandung informasi sejauh mana pengelolaan kinerja Bank Muamalat baik yang terkait dengan kinerja operasional maupun yang bernilai sosial.

Penelitian ini menunjukkan penerapan prinsip-prinsip syariah pada Bank Muamalat Cabang Makassar yang ditunjukkan dengan beberapa hal yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Dimana prinsip-prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip *ukhuwah*, prinsip *adl* (keadilan), prinsip *tawazun*, prinsip *universalisme* dan prinsip *masalah*. Penerapan prinsip *ukhuwah* pada Bank Muamalat diwujudkan melalui pembiayaan bank yang menjunjung tinggi nilai-nilai

persaudaraan, seperti dalam penetapan margin keuntungan, nisbah bagi hasil sampai kepada penentuan periode pembayaran yang didasarkan pada kesepakatan. Sehingga dalam laporan keuangan keuntungan yang disajikan dalam laporan keuangan ditetapkan sesuai dengan nilai persaudaraan tanpa merugikan pihak lain atau nasabah (mitra).

Penerapan prinsip keadilan dilihat dari unsur riba, gharar, maysir dan kezaliman. Dari penelitian ini dapat diperoleh bahwa penghindaran unsur riba pada Bank Muamalat dilakukan dengan menghindari prinsip *time value of money* dimana konsep ini merupakan turunan dari konsep dasar akuntansi *historical cost*, hal ini karena *time value of money* mengandung bunga dalam pembayaran tangguhan walaupun unsur riba belum bisa dihindari secara menyeluruh karena margin keuntungan dari pembiayaan murabahah masih didasarkan pada seberapa lama periode pembayaran dilakukan. Penghindaran unsur gharar dilakukan dengan menghindari konsep dasar akuntansi *accrual basic*, hal ini karena *accrual basic* mengandung ketidakjelasan dalam kaitannya dengan pengakuan pendapatan pada pembiayaan mudharabah, artinya pendapatan diakui ketika pendapatan telah terealisasi. Penghindaran unsur maysir dilakukan dengan menghindari konsep dasar akuntansi *historical cost* dalam penilaian aset tetap dalam kaitannya dengan pembayaran zakat, artinya aset tetap dinilai berdasarkan nilai sekarang (pasar) yang dapat direalisasikan. Penghindaran unsur kezaliman dilakukan dengan menghindari konsep dasar akuntansi *substance over form* dalam kaitannya dengan penanggungan

biaya perbaikan atas objek ijarah, artinya pihak yang menanggung benar-benar pihak tepat atau sesuai dengan posisinya.

Sedangkan penerapan prinsip *tawazun*, *universalisme* dan *masalahah* dilakukan melalui kegiatan sosial dari dana CSR dan zakat. Dengan adanya penerapan zakat maka tujuan dari Bank Muamalat bukan lagi *profit-oriented* melainkan *zakat-oriented*. Yang berarti ukuran kinerja dari Bank Muamalat dilihat dari pembayaran zakat yang dilakukan secara optimum. Karena kinerja operasional bukan lagi menjadi ukuran kinerja utama melainkan kinerja untuk semua stakeholder dan nilai sosial Bank Muamalat Cabang Makassar. Dengan penerapan ketiga prinsip tersebut melalui zakat maka Bank Muamalat Cabang Makassar dapat menyeimbangkan karakter laporan keuangan yaitu antara egoistik dan altruistik, materialistik dan spriritualistik dan kuantitatif dan kualitatif. Dimana keseimbangan tersebut akan menghasilkan akuntansi yang menjunjung nilai-nilai Islam atau dengan kata lain akuntansi syariah. Sehingga dalam penelitian ini mengungkap bahwa pengelolaan produk-produk Bank Muamalat Cabang Makassar belum sepenuhnya menerapkan *syariah compliance* yang merupakan prinsip utama *syariah governance*.

B. Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian yang diajukan oleh peneliti berupa saran-saran atas keterbatasan yang ada untuk perbaikan pada masa mendatang, diantaranya :

1. Perbedaan tingkat pemahaman mengenai aplikasi prinsip syariah pada menggambarkan adanya perbedaan kesadaran dalam menjalankan praktik *Syariah Governance*. Dalam penelitian Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang

Makassar telah berusaha menerapkan prinsip syariah meskipun dalam penelitian ini belum sepenuhnya dapat menghindari konsep-konsep konvensional dalam pengelolaannya terutama pemilihan konsep dasar dalam memperlakukan transaksi-transaksi yang terjadi. Sehingga pada masa yang akan datang, diharapkan Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar benar-benar menerapkan nilai-nilai Islam melalui penerapan prinsip-prinsip syariah baik dari segi konsep maupun prakteknya.

2. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis syariah compliance melalui penerapan prinsip-prinsip syariah terkait penyusunan laporan keuangan. Penelitian ini juga bersifat analisa mendalam dan hanya diinterpretasikan sesuai dengan pemahaman peneliti sehingga hasil penelitian ini tidak bisa dan tidak pantas untuk digeneralisasi pada semua perbankan yang ada di Indonesia.
3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan agar data-data yang terkait dengan prinsip-prinsip syariah pada penyusunan laporan keuangan dapat dikaji lebih luas lagi untuk membuktikan bahwa keuntungan yang disajikan dalam laporan keuangan menjunjung tinggi nilai persaudaraan, zakat merupakan tujuan utama dari kinerja lembaga syariah utamanya Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Makassar dan konsep accrual basic, historical cost dan substance over form tidak sesuai dengan kinerja bank dalam pengelolaan informasi dalam laporan keuangan.
4. Informan dalam penelitian selanjutnya lebih baik jika diperbanyak dan menentukan sesuai dengan bidangnya untuk menjamin keakuratan informasi.

5. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan paradigma kritis dengan mengkritik kedua sisi baik dan buruk pengelolaan bank syariah, karena dalam penelitian ini paradigma kritis yang digunakan hanya melihat satu sisi dari permasalahan atau objek yang dibahas dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyanti, Yati, "Validitas dan Reliabilitas dalam Penelitian Kualitatif", *afidburhamuddin.files.wordpress.com*, Vol. 12, No. 2, (2008): h. 137-141.
- Alamsyah, Halim, "Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015", Ikatan Ahli Ekonomi Islam, <http://www.bi.go.id>.
- Alnasser, Sulaiman Abdullah Saif dan Jorih Muhammad, "Introduction To Corporate Governance From Islamic Perspective", *Emerald* Vol. 28 No. 3, (2012): h. 220-231.
- Andini, Rita, "Evaluasi Pengakuan Dan Pengukuran Transaksi Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Dalam Konsep Akuntansi Perbankan Syaria'ah (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Semarang)", *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, Vol 2 No. 2, (2011).
- Asrori. "Pengungkapan Syariah Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah", *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 3, No. 1, (2011).
- Azizah, Nur, "Evaluasi Penerapan Prinsip Syariah Pada Praktik Pembiayaan Mudharabah Atau Revenue Sharing (Studi Kasus Di Kjk's Bmt Nuur Ummah Surakarta)", *eprints.uns.ac.id/5757/1/106662710200908231.pdf*, (2009).
- Banindita, "Analisis Penerapan PSAK 102 Pada Produk Kepemilikan Emas dan PSAK 107 Pada Produk Gadai Emas Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank BNI Syariah Yogyakarta)", *digilib.uin-suka.ac.id*, (2013).
- Bashori, Akhmal, "Pendekatan Hermeneutika; Sebuah Paradigma Dan Kerangka Metodologi", <http://mamdoh.staff.unimus.ac.id>, (2013).
- Cahya, Bayu Tri, "Kilas Kebijakan Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. VII, No. 1, (2013): h. 15-28.
- Chapra, M. Umer dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, PT Bumi Aksara: Jakarta Timur, (2008).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Cet. II; Solo: 2011).

- Dusuki, Asyraf Wajdi, & Dar, H., "Stakeholders' perceptions of Corporate Sosial Responsibility of Islamic Banks: Evidence From Malaysian Economy", *International Conference on Islamic Economics and Finance*, <http://www.kantakji.com>, (2005).
- Dusuki, Asyraf Wajdi and Nurdianawati Irwani Abdullah, "Maqasid al-Shari`ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility", *The American Journal of Islamic Social Sciences* Vol. 24, No. 1, (07 November 2014), h. 25-45.
- Farhan, Ali, "Metode Perhitungan Zakat Perusahaan Pada CV. Minakjinggo", jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/403. (12 April 2015).
- Ghayad, Racha, "Corporate Governance and The Global Performance of Islamic Banks. *Humanomics*". Vol. 24, Iss: 3, (2012): h. 207-216.
- Hamza, Hichem, "Sharia Governance in Islamic Banks: Effectiviness And Supervision Model", *Emerald* Vol. 6 No. 3, (2013): h. 226-237.
- Haryadi, "Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 7, No. 2, (2007): h. 189-204.
- Ho, Catherine Soke Fun. "Syariah accounting And Compliant Screening Practices", *Emerald* Vol. 4 No. 2/3, (2012): h. 240-254.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Exposure Draft PSAK 101 (2008). PSAK 102 (2007). PSAK 103 (2007). PSAK 104 (2007). PSAK 105 (2007). PSAK 106 (2007). PSAK 107 (2008).
- Jamaa, La, "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syari'ah", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 45 No. II, (2011): h. 1251-1270.
- Kara, Muslimin, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah", *ASSETS*, Vol. 2, No. 2, (2012), h. 173-184.
- Mahmuzar, M.Hum, "Maslahah-Mursalah; Suatu Methode Istinbath Hukum" http://fush.uin-suska.ac.id/attachments/073_Mahmuzar.pdf, (07 November 2014).
- Maith, Hendry Andres, "Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pt. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk", *Jurnal EMBA* Vol.1 No.3, (2013): h. 619-628.

- Mulawarman, Aji Dedi, “Menggagas Laporan Arus Kas Syari’ah Berbasis Ma’isyah: Diangkat Dari Habitus Bisnis Muslim Indonesia”, *Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makassar*, (2007).
- Mulyono, Edi. “*Belajar Hermeneutika Dari Konfigurasi Filosofis Menuju Praksis Islamic Studies*”. Jogjakarta: Ircisod. (2012).
- Muchlis, Saiful. *Akuntansi Perbankan Syari’ah*, Alauddin Press: Makassar, (2011).
- Naser, Kamel, “The Influence Of Islamic On Bank Financial Reporting”, *Emerald* Vol. 7 No. 2, (1997): h. 56-83.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia (Edisi 2)*. Salemba Empat. Jakarta. (2009)
- Ousama dan Fatima, “Voluntary disclosure by Shariah approved companies: an exploratory study,” *Journal of Financial Reporting and Accounting Vol. 8 No. 1*, (2010): h. 35-49.
- Pujiastuti, Yuyun Iriani, “Analisis atas Ketaatan Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka Di Indonesia,” *Jurnal Penelitian*, (2009): h. 1-13.
- Putra, Derhichard H., “Fenomenologi dan Hermeneutika: Sebuah perbandingan”, <http://kalamenau.blogspot.com>, (2012).
- Rahma, Nadia, “ Analisis Penerapan Islamic Social Reporting Index dalam Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Indonesia”, *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, (2012).
- Ramadhani, Kiki Priscilia, “Analisis Kesyariahan Penerapan Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah xxx Di Kota Mojokerto)”, jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/957, (2014).
- Riharjo, Ikhsan Budi, “Memahami Paradigma Penelitian NOn-Positivisme Dan Implikasinya Dalam Penelitian Akuntansi”, *JAMBS Vol. 8 No. 1*, (2011): h.. 128 – 146.
- Santoso, Ery Wibowo Agung, “Faktor Relegiusitas Dalam Perbankan Syari’ah”, <http://jurnal.unimus.ac.id>. (16 Februari 2015).

- Saputro, Andik S. Dwi, "Penguatan Sharia Governance Melalui Reformasi Akuntansi", *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*, (2010): h. 1-32.
- Sepkymardian, "Studi Eksplorasi Pengungkapan Penerapan Prinsip Syariah di Bank Syariah", *SEBI Islamic Economics & Finance Journal*, Vol. 04, No.1, (2013).
- Shaharuddin, Amir. Masalah-Mafsadah Approach in Assessing the Shari'ah Compliance of Islamic Banking Products. *International Journal of Business and Social Science*. Vol. 1 No. 1, (2010): h. 129-136.
- Sjahdeini, Sutan Remy, "*Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*" Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, (2014).
- Sopannah, "Menguak Fenomena Penolakan Pembangunan Dengan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Sebuah Studi Interpretif", *SNA XIII Purwokerto*, (2010).
- Sugiyono. "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*". Alfabeta. Bandung. (2013).
- Sukardi, Budi, Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia, *Stainmetro.Ac.Id/E-Journal/Index.php*. (18 September 2014).
- Sula, Atik Emilia, "*Reformulasi Akad Pembiayaan Murābahah Dengan Sistem Musyarakah Sebagai Inovasi Produk Perbankan Syari'ah*" Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto, (2010).
- Syam, Masiyan Makmun, "Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual Terhadap Sunnah Nabi (Studi Kritis Atas Pemikiran Syaikh Muhammad Al-Gaza>Li>)", *Jurnal Al Hikmah Vol. XV No. 1*, (2014).
- Thohari, Ahmad, "Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalahah", *Az Zarqa'*, Vol. 5, No. 2, (2013).145- 161.
- Triuwono, Iwan, *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, (2009).
- Ulfa, Maria, "Analisa Perkembangan Asset, Dana Pihak Ketiga (Dpk), Dan Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia", <http://www.gunadarma.ac.id>. (22 Maret 2015).

Wahyudi, Ario, “Analisis Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Makassar”, *repository.unhas.ac.id*, (2013).

Wardayati, Siti Maria. “Implikasi Syariah Governance Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah”, *Walisongo*, Vol. 19 No. 1, (2011): h. 1-24.

Wibowo, Ery, “Dimensi Keadilan dan Epistimologi Akuntansi Syariah”, *Value Added*, Vol. 3, No. 2, (2007): h. 11-23.

Widiastuti, Eka, “Kapatuhan Syariah dalam Membangun Identifikasi Islamic Brands”, *sebi-community.blogspot.com*. (14 Desember 2015).

www.bankmuamalat.com

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Yang akan mengajukan pertanyaan kepada informan:

Nama: Angriani

Nim: 10800111020

Tujuan wawancara- untuk mengetahui penerapan Syariah Compliance sebagai prinsip Syariah Governance Pada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar terkait dengan penyusunan laporan keuangan.

Durasi waktu wawancara: \pm 1 jam untuk setiap informan

Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan untuk Inforaman	Jawaban dari Informan
1	Bagaimana proses transaksi pada produk pembiayaan mudharabah, murabahah dan ijarah?	
Prinsip Ukhuwah yang ditunjukkan dengan penetapan harga penjualan barang		
1	Bagaimana penentuan harga untuk barang yang akan dijual pada nasabah/pelanggan?	
2	Bagaimana penentuan nilai dari barang yang dijadikan jaminan dalam produk mudharabah, murabahah dan ijarah?	
Prinsip Adl yang ditunjukkan dengan melakukan transaksi yang bebas dari unsur		

riba, zalim, gharar dan maysir.		
A. Bebas dari unsur riba dilihat dari aktivitas pembiayaan yang dilakukan tidak mengandung nilai waktu dari uang (time value of money)		
1	Bagaimana proses pembayaran kredit pada produk pembiayaan mudharabah dan murabahah?	
B. Bebas dari unsur zalim dilihat dari aktivitas pembiayaan yang dilakukan tidak menganut konsep dasar substance over form.		
1	Bagaimana ketentuan mengenai biaya perbaikan pada produk ijarah?	
C. Bebas dari unsur gharar dilihat dari aktivitas pembiayaan (pengakuan pendapatan) menggunakan prinsip cash basic dan bukan accrual basic.		
1	Kapan pengakuan pendapatan dari bagi hasil dilakukan pada produk pembiayaan mudharabah dan bagaimana penentuan bagi hasil itu sendiri?	
D. Bebas dari unsur maysir dilihat dari penggunaan historical cost dan nilai wajar dalam penilaian aset utamanya dalam penentuan nilai zakat.		
1	Bagaimana bank melakukan penilaian atas aset (aset nonkas tidak lancar)?	
E. Prinsip tawazun, prinsip universalisme dan prinsip maslahah dilihat dalam satu perspektif bahwa bank tidak hanya memfokuskan pada pendapatan saja tetapi menciptakan manfaat bagi seluruh pihak (legiatan sosial).		
1	Bagaimana pengelolaan dana oleh bank yang digunakan untuk kegiatan sosial (zakat dan donan non halal)?	

LAMPIRAN 2

MANUSKRIP

Wawancara dilakukan pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Pettarani dan Bank Muamalat Cabang Pembantu Gowa. Wawancara dilakukan dengan menggunakan dua informan utama yaitu Sub Branch Manager Bank Muamalat Cabang Makassar yang bertempat di kantor cabang pembantu Pettarani dan Sub Branch Manager Bank Muamalat Cabang Makassar yang bertempat di kantor cabang pembantu Gowa. Dan informan pendukung yaitu Account Management Financing pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Pettarani. Penelitian dilakukan dengan rentang waktu 06 April 2015 sampai dengan 07 Mei 2015. Wawancara dengan informan utama yang berada pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Pettarani dilaksanakan pada tanggal 24 April 2015 dengan durasi waktu 1 jam dengan 5 pertanyaan. Wawancara dengan informan utama yang berada pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Gowa dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2015 dengan durasi waktu 1 jam 30 menit dengan 9 pertanyaan. Dan wawancara dengan informan pendukung yang berada pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Pettarani dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2015 dengan durasi waktu 30 menit dengan 3 pertanyaan.

Peneliti (Angriani)

Bagaimana proses transaksi pada produk mudharabah, murabahah dan ijarah?

Informan (Pak Ridwan Umar)

Sebenarnya semua produk pembiayaan mempunyai proses yang sama hanya yang membedakan dari segi peruntukan dan akad. Beda peruntukan maka akan beda pula akadnya. Proses dari pembiayaan dari bank ke nasabah dimulai dari permohonan pembiayaan, nah di sini harus ada kejelasan mengenai jumlah, kegunaan dan berapa lama. Selanjutnya nasabah melengkapi berkas, berkas ini akan dianalisis yang istilahnya analisa kinerja bank dalam hal ini melakukan penyelidikan. Ada dua hal yang perlu dianalisa dari nasabah yaitu analisa terhadap nasabah dan analisa dokumen. Terhadap nasabah, bank melakukan analisa atau penyelidikan yang disebut bank checking untuk mengetahui kualitas nasabah. Kualitas nasabah yang dimaksud dengan melakukan penyelidikan terhadap karakter, sumber pendapatan dan jaminan. Di sini bank menilai apakah ada risiko gagal bayar dan apakah nasabah tidak menyalahi akad. Sedangkan jaminan yang diserahkan oleh nasabah harus dinilai dengan melihat apakah jaminan tersebut dapat menanggulangi risiko jika terjadi gagal

Informan (Bu Nur Qalbi)

Untuk semua jenis pembiayaan itu yang membedakan akadnya. Untuk murabahah banyak jenis, misalnya pembelian rumah, kendaraan. jadi sepanjang ada barangnya dilakukan akad murabahah. Kemudian untuk akad mudharabah biasanya digunakan untuk sifat tidak terlihat barangnya, misalnya pemberian modal kerja, ada proyek kita join. Kemudian ijarah itu kan sewa misalnya pembelian KPR misalnya rumah atau misalnya ada nasabah mau pergi umrah itu kita pakai akad ijarah, karena tidak ada barang yang ada adalah pelayanan, pelayanan dalam bentuk umrah atau pembangunan gedung kan ada jasa di dalamnya. Kalau yang komplitnya kalau di murabahah itu ada namanya KPR murabahah, KPR pembelian namanya kita. KPR itu bukan kredit kepemilikan rumah tapi kepemilikan rumah. Tinggal kita lihat berapa harga belinya berapa keuntungan yang diharapkan oleh bank itulah harga jualnya. Bukan berdasarkan kesepakatan tetapi berdasarkan harga tawar bank muamalat, misalnya ada harga pembelian maka bank akan menjual dengan harga sekian, itu dinamakan dengan pricing adalah harga yang kita harapkan (ekspektasi margin yang kita harapkan dari transaksi jual beli). Kalau untuk mudharabah misalnya pembangunan sekolah dengan bagi hasil. Bank juga memilih pembiayaan mudharabah yang memberikan kepastian pengembalian. Sedangkan ijarah, bank paling sering menggunakan dua akad yaitu musyarakah dan ijarah. Artinya bank dan nasabah bersyirkah dulu kemudian melakukan

Peneliti (Angriani)

Bagaimana bank melakukan penilaian terhadap jaminan tersebut?

Informan (Pak Ridwan Umar)

Untuk menilai maka harus dilihat lokasi jaminan termasuk jaminan tidak termasuk dalam jaminan yang dilindungi oleh jaminan orang lain dan jaminan yang bebas banjir. Untuk nilainya sendiri maka jaminan dinilai berdasarkan nilai pasar dan nilai likuidasi. Misalnya nasabah mengajukan pembiayaan, terus nilai pasar dari agunan yang dijaminkan senilai Rp 1.000.000.000,-. Maka besarnya pembiayaan yang diberikan bank untuk nasabah sebesar nilai likuidasi dari jaminan tersebut yaitu sebesar 70% dari Rp 1.000.000.000,-. Selanjutnya bank melihat kelayakan pembiayaan. Kredit ada 2 macam, ada kredit modal kerja dan kredit investasi. Untuk kredit modal kerja dinilai dari siklus produksi atau cash flow. Sedangkan investasi dilihat dari peristiwa masa lalu yaitu dari laporan keuangan. Jadi ketika bank telah melakukan pembiayaan terhadap nasabah dan setelah beberapa periode nasabah mengajukan permohonan pembiayaan lagi maka bank harus melihat laporan keuangan nasabah. Misalnya bank mengajukan permohonan pembiayaan lagi namun setelah bank melihat laporan keuangan nasabah, ada keuntungan sebesar Rp 20.000.000,- misalnya, maka bank tidak dapat memberikan lagi karena telah terjadi keuntungan. Selanjutnya setelah melaksanakan

melakukan memorandum pembiayaan yang berisi informasi nasabah dan melakukan checking terhadap risiko yang akan muncul dan kemampuan agunan yang dijaminan tersebut untuk menanggulangi risiko pembiayaan. Setelah itu dari FRO, komite pembiayaan mengambil keputusan terhadap permohonan nasabah. Jika bank menyetujui maka terjadi keuntungan. Selanjutnya setelah melaksanakan penyelidikan maka bank melakukan memorandum pembiayaan yang berisi informasi nasabah dan melakukan checking terhadap risiko yang akan muncul dan kemampuan agunan yang dijaminan tersebut untuk menanggulangi risiko pembiayaan. Setelah itu dari FRO, komite pembiayaan mengambil keputusan terhadap permohonan nasabah. Jika bank menyetujui maka nasabah harus menyetujui persyaratan pembiayaan dalam SP3 yaitu Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan. Kemudian nasabah menandatangani dalam lampiran akad pembiayaan. Selanjutnya pengikatan notaris dengan membuat akad kredit dan akad jaminan. Pengikatan notaris disebut cover note atau jaminan notaris. Selanjutnya dropping atau pencairan pembiayaan sesuai yang disetujui dalam akad. Jika kalau pada bank konvensional tahapanya hanya sebatas ini maka tahap selanjutnya adalah tahap yang membedakan dengan bank syariah. Tahap selanjutnya adalah monitoring, jadi bank melakukan pengawasan terhadap penggunaan dari dana pembiayaan tersebut oleh nasabah apakah tidak menyalahi akad. Misalnya dalam akad jenis usaha yang disepakati berbeda dengan jenis usaha yang dijalankan oleh nasabah.

Informan (Bu Nur Qalbi)

Bank menggunakan taksasi. Jadi kita melihat jaminan tersebut. Misalnya nasabah mengajukan pembiayaan sebesar Rp 300.000.000,-- kita lihat apakah jaminan tersebut mencukupi pembiayaan tersebut. Misalnya jaminan untuk pembelian KPR maka dari jaminan tersebut hanya dinilai 90% dari nilai jaminan tersebut atau dinamakan taksasi (harga jual cepat). Kecuali renovasi gedung hanya dikenakan sebesar 70% dari nilai jaminan tersebut.

Peneliti (Angriani)

Bagaimana penentuan harga produk/barang yang akan dijual kepada pembeli (nasabah)?

Informan (Pak Ridwan Umar)

Ditentukan dari harga barang itu sendiri atau harga perolehannya dan ditambah dengan margin keuntungan. Dari harga bank yang diperhitungkan bank yaitu harga yang ditawarkan ketika nasabah menyetujui maka terjadilah kesepakatan.

Informan (Bu Nur Qalbi)

Harga itu ditentukan dari penawaran bank kepada nasabah. Harga standar ditambah dengan keuntungan efektif. Misalnya harga jangka waktu pembayaran 5 tahun ditentukan keuntungan efektif 15% dari harga standar.

Peneliti (Angriani)

Bagaimana pembayaran tanggungan pada produk pembiayaan murabahah dan mudharabah pembeli (nasabah)?

Informan (Pak Ridwan Umar)

Murabahah

Angsuran = pokok pembayaran + margin keuntungan

Mudharabah = pokok + nisbah yang disepakati

Misalnya murabahah, nasabah memesan barang pada bank dengan harga Rp 1.000.000.000,-, dengan margin keuntungan Rp 300.000.000,-. Maka secara tunai maupun angsuran jumlah pembayarannya tetap sama Rp 1.300.000.000,-.

Maka Rp 1.300.000.000,- adalah jumlah yang harus dibayar sampai selesainya waktu pembayaran.

Misalnya mudharabah, bank melakukan pembiayaan mudharabah pada koperasi. Koperasi melakukan usaha jual beli dengan para anggota koperasi. Bank tidak memperbolehkan koperasi untuk menjalankan usaha mudharabah karena dana akad mudharabah yang dijalankan oleh bank berasal dari pihak lain. Dan pembayaran harus setiap akhir bulan karena bank pun harus memberikan

pengembalian kepada pihak lain tersebut. Dimana lamanya periode pembayaran sesuai dengan kemampuan nasabah. Dan jumlah pembayaran pun tidak tetap karena keuntungan dari koperasi belum dapat diketahui secara langsung.

Informan (Bu Nur Qalbi)

Jumlah pembayaran sesuai dengan jumlah pada awal akad, yaitu harga pembelian ditambah keuntungan yang diharapkan. Misalnya nasabah meminjam Rp 100.000.000,- maka jumlah yang dibayar oleh nasabah itu tetap Rp 100.00.000,- baik secara tunai maupun kredit. Karena jangka waktu pembayaran sudah ditentukan pada akad sesuai dengan kesepakatan dengan nasabah. . Kecuali nasabah melunasi sebelum jangka waktunya maka nasabah berhak memperoleh potongan harga dari pembelian tersebut. Namun ketika nasabah terlambat dalam melakukan pembayaran maka dikenakan denda untuk memberikan efek jerah tapi denda tersebut tidak boleh digunakan dalam kegiatan

Peneliti (Angriani)

Kapan pengakuan pendapatan dari bagi hasil dilakukan pada produk pembiayaan mudharabah dan bagaimana penentuan bagi hasil itu sendiri?

Informan (Pak Ridwan Umar)

Bagi hasil dilakukan ketika akhir bulan setiap periode pembayaran setelah keuntungan dapat direalisasi. Dan nisbah bagi hasil itu sendiri berdasarkan penawaran bank, jika nasabah menyanggupi maka terjadi kesepakatan dengan nasabah. Kecuali terjadi kerugian bank lah yang menanggung.

Informan (Bu Nur Qalbi)

Setelah pendapatan atau keuntungan terealisasi. Bagi hasil sesuai dengan penawaran bank, jika bank menyetujui barulah terjadi akad.

Peneliti (Angriani)

Bagaimana ketentuan tentang biaya perbaikan pada produk ijarah?

Informan (Bu Nur Qalbi)

Bank melakukan akad ijarah dengan didahului dengan akad musyarakah. Artinya ketika ada kerusakan selama pembangunan misalnya properti yang menjadi objek ijarah maka pihak yang menanggung biaya perbaikan adalah nasabah dan bank sesuai dengan proprorsi modal misalnya 90: 10.

Informan (Pak Muhidin)

Contoh dari pada pembiayaan ijarah yaitu KPR yang diawali dengan akad musyarakah dilanjutkan dengan ijarah. Contoh lain adalah jasa di bidang pendidikan atau multi guna. Untuk biaya perbaikan tetap ditanggung oleh nasabah karena kepemilikan dari bank akan semakin berkurang sampai 0 bagian dan nasabah menjadi 100%.

Peneliti (Angriani)

Bagaimana penilaian terhadap aset tetap untuk perhitungan zakat pada bank?

Informan (Bu Nur Qalbi)

Untuk penilaian terhadap aset bank dilakukan berdasarkan harga sekarang artinya nilai yang dapat direalisasikan.

Peneliti (Angriani)

Bagaimana pengelolaan dana oleh bank yang digunakan untuk kegiatan sosial (zakat dan dana non halal)?

Informan (Bu Nur Qalbi)

Bank tentunya melakukan kegiatan sosial yang berasal dari dana zakat. Karena zakat merupakan. Sedangkan dana non halal sudah tidak ada lagi karena semua dana yang tidak berhubungan dengan produktivitas bank langsung dimasukkan dalam dana zis jadi bank tidak menggunakan lagi. Semua dana zakat dan dana non halal yang saudara katakan langsung dimasukkan dalam badan yang mengelola zakat bank. termasuk gaji karyawan dan itu langsung dipotong. Badan yang mengelola dana zakat bank yaitu badan Baitulmaal Muamalat. Yang disalurkan pada kegiatan sosial yang sifatnya produktif (biasanya kepada petani) dan yang tidak bersifat produktif (seperti bencana alam dan pembangunan

Informan (Pak Muhidin)

Zakat yang dikeluarkan oleh bank sendiri dikelola oleh Baitulmaal Muamalat. Zakat digunakan untuk tujuan kegiatan sosial bank. Zakat tersebut ditujukan kepada masyarakat umum bukan nasabah. Seperti bencana alam contohnya bencana alam di Padang yang jumlahnya lumayan besar. dana nonohalal sendiri sudah tidak diterapkan lagi oleh bank. adapun contohny seperti pembayaran denda oleh nasabah langsung ditransfer ke rekening Baitulmaal Muamalat. termasuk itu gaji karyawan untuk pembayaran zakat. Sedangkan laporan zakat sendiri tidak dikelola oleh bank melainkan disusun dan dikelola

Peneliti (Angriani)

Apakah dana CSR dan zakat berbeda?

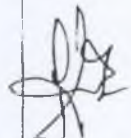
Informan (Bu Nur Qalbi)


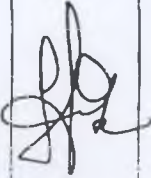
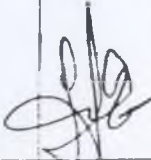
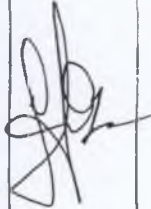
Tentunya berbeda zakat seperti yang dijelaskan tadi tapi kalau dana CSR dari keuntungan bank. Tetapi pengelolaannya semua dilakukan oleh Baitulmaal Muamalat.

Informan (Pak Muhidin)

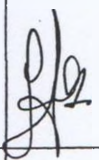
Dana zakat dan CSR berbeda namun tetap dikelola satu Badan (Baitumaal Muamalat).

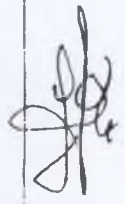
LAMPIRAN 3**UJI KEABSAHAN DATA (UJI DEPENDABILITAS)**


No	Uraian Aktivitas Selama Proses Penelitian	Telah dilaksanakan dan Diperiksa oleh Dosen Pembimbing		TTD
		Ya	Tidak	
1.	Dalam menyusun proposal penelitian, peneliti membaca jurnal-jurnal dan referensi lainnya untuk mengidentifikasi masalah yang ada pada lembaga keuangan syariah yang berhubungan dengan akuntansi. Selain itu peneliti juga mengidentifikasi masalah dari proses pembelajaran terutama dari Dosen yang membahas mengenai akuntansi syariah.	✓		
2.	Proposal penelitian disertai dengan pertanyaan untuk wawancara. Dimana penyusunan pertanyaan wawancara tersebut dibantu dengan bimbingan Dosen Pembimbing. Peneliti menyusun pertanyaan wawancara mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah. Pertanyaan tersebut dibuat berdasarkan pemikiran peneliti dengan cara memaknai prinsip syariah tersebut			

	ke dalam pengelolaan Bank Muamalat Cabang Makassar terkait produk pembiayaan bank dan kegiatan sosial bank.	✓		
2.	Melakukan bimbingan kepada kedua Dosen pembimbing yang dilakukan berkali-kali hingga tersusunlah proposal penelitian sebagaimana yang dikehendaki oleh peneliti dan Dosen Pembimbing.	✓		
3.	Setelah proposal penelitian disetujui oleh Dosen Pembimbing, peneliti mengikuti seminar proposal.	✓		
4.	Peneliti mengajukan surat penelitian pada Bank Muamalat Cabang Makassar dengan persetujuan kedua Dosen Pembimbing, yang membutuhkan waktu 2 minggu untuk memperoleh surat balasan. Namun sebelumnya peneliti telah melakukan pra penelitian untuk mengetahui bagaimana tahap dan persyaratan untuk meneliti pada Bank Muamalat Cabang Makassar .	✓		


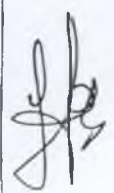
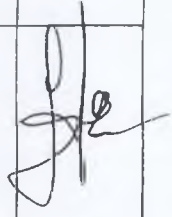
5.	<p>Setelah surat balasan telah diterima, maka peneliti melakukan persiapan wawancara, seperti menentukan waktu wawancara. Adapun waktu wawancara ditentukan dari kesediaan informan. Dimana untuk menentukan kesiapan informan, membutuhkan waktu 2 minggu. Informan yang akan diwawancara pun tidak ditentukan sendiri oleh peneliti melainkan pihak bank melihat siapakah yang berkompeten dan mengetahui materi yang akan dipertanyakan karena sebelumnya proposal telah diserahkan kepada Bank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Wawancara dengan informan pertama dilakukan dengan Bapak Ridwan Umar selaku Sub Branch Manager pada tanggal 24 April 2015 dengan durasi waktu 1 jam. Dari 8 pertanyaan hanya 5 yang dapat dijawab oleh informan karena keterbatasan waktunya, yang artinya proses wawancara ditunda.• Wawancara dengan informan kedua dilakukan dengan Ibu Nur Qalbi selaku Sub															
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


	<p>dari para informan mempunyai inti yang sama meskipun struktur kata yang digunakan berbeda, namun artinya sama. Dan jawaban dari informan tersebut saling melengkapi.</p>	✓		
6.	<p>Dari jawaban beberapa informan, maka peneliti melakukan analisis data. Dalam hal ini peneliti melakukan analisis terhadap jawaban para informan dengan memaknai kata ataupun kalimat yang dilontarkan oleh informan untuk memperoleh pemahaman atau pengetahuan baru (<i>hermeneutika-fenomenologi</i>). Tidak semua jawaban dari informan dimasukkan dalam hasil dan pembahasan, namun peneliti di sini menyaring atau memilih-milih jawaban yang dapat menunjukkan penerapan prinsip syariah pada bank, dengan cara memahami kata demi kata ataupun kalimat demi kalimat. Setelah memahami apa maksud dari pernyataan dari informan, peneliti memaknai kata-kata ataupun kalimat-kalimat dalam teks hasil wawancara yang telah ditulis ulang dari alat perekam</p>			

	<p>tersebut dengan menggunakan pemahaman atau subjektivitas peneliti. Dalam menganalisis data maka peneliti menggunakan 2 tahap dalam memaknai teks wawancara. Pertama, memaknai teks wawancara yang dapat mengungkap penerapan prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan pengelolaan bank yaitu pengelolaan yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan bank syariah. Kedua, memaknai penerapan prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan pengelolaan transaksi pembiayaan bank akuntansi utamanya yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan. Setelah tahap memaknai selesai maka peneliti menemukan pemahaman atau pengetahuan baru mengenai akuntansi.</p>	✓		
7.	<p>Setelah melakukan analisis data maka peneliti menuangkan segala hasil pemikiran dan interpretasi dari hasil proses analisis data. Dimana secara ringkas hasil dari penelitian ini, yaitu</p>			

	<ul style="list-style-type: none"> • Prinsip ukhuwah diterapkan melalui kesepakatan dalam menentukan margin keuntungan, nisbah bagi hasil dan melakukan pembayaran tangguhan. Sehingga adanya kesepakatan dalam penentuan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil memberikan implikasi bahwa pendapatan ataupun laba yang disajikan dalam laporan keuangan mencerminkan bahwa Bank Muamalat Cabang Makassar menjunjung nilai-nilai persaudaraan sehingga laporan keuangan tidak hanya mengandung hal-hal yang sifatnya spritual tetapi juga mengandung nilai spiritual karena transaksi terkait didasarkan pada keridhaan antara bank dan nasabah. • Prinsip tawazun, universalisme dan masalah diterapkan melalui pembayaran zakat. Hal ini karena zakat merupakan suatu kewajiban yang berarti bank harus melaksanakan dan 	✓		
--	--	---	--	---

	<p>mempertanggungjawabkannya. Dimana pertanggungjawabannya dilakukan dengan hadirnya laporan zakat bank. adanya laporan zakat memberikan implikasi bahwa bank tidak lagi berpegang kepada profit-oriented tetapi zakat-oriented, yang berarti ukuran kinerja perusahaan ditunjukkan dengan maksimalisasi pembayaran zakat. Adanya tujuan dari Bank Muamalat Cabang Makassar maka laporan keuangan yang disajikan pun tidak hanya menyajikan hal yang berfokus pada maksimalisasi laba melainkan maksimalisasi kegiatan sosial melalui zakat pun disajikan sehingga dengan adanya laporan zakat kepentingan semua <i>stakeholder</i> dapat terpenuhi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prinsip keadilan yang diterapkan Bank Muamlat Cabang Makassar melalui penghindaran unsur riba pada pembayaran tangguhan, penghindaran unsur gharar pada pengakuan pendapatan, penghindaran unsur 			
--	---	--	--	--

	<p>maysir pada penilaian aset tetap (tanah dan bangunan) untuk pembayaran zakat dan penghindaran unsur kezaliman pada penentuan pihak yang menanggung biaya perbaikan pada produk pembiayaan ijarah. Sehingga prinsip keadilan ini akan mengungkap konsep dasar yang sesuai dan tidak sesuai dengan penyajian laporan keuangan terkait dengan penelitian.</p>	✓		
8.	<p>Setelah hasil dan pembahasan (penyajian data) penelitian diungkap.maka peneliti melakukan verifikasi atau penarikan kesimpulan terhadap hasil dan pembahasan (penyajian data) tersebut. Selain itu pada bagian kesimpulan diungkaplah kesesuaian hasil penelitian dengan teori yang digunakan, yaitu teori kepatuhan dan konsep masalah (triangulasi teori) agar hasilnya tidak bias.</p>	✓		
9.	<p>Melakukan uji keabsahan data berupa uji dependabilitas, yaitu dengan melaporkan kembali proses penelitian tersebut.</p>	✓		

10.	Melakukan bimbingan kepada Dosen Pembimbing untuk memperoleh persetujuan skripsi diproses lebih lanjut (untuk seminar hasil dan munaqashah.	✓		
-----	---	---	--	---



JADWAL ANGSURAN

Nasabah : Agriyani
 Harga beli : Rp. 100,000,000
 Margin : Rp. 16,367,970
 Harga jual : Rp. 116,367,970

Jk. Waktu : 24 bulan

Bulan	Angsuran	Harga jual	Sisa Angsuran	Tgl Angsuran
1	4,848,660		111,519,310	4 - Jun-15
2	4,848,660		106,670,650	4 - Jul-15
3	4,848,660		101,821,990	4 - Aug-15
4	4,848,660		96,973,330	4 - Sep-15
5	4,848,660		92,124,670	4 - Oct-15
6	4,848,660		87,276,010	4 - Nov-15
7	4,848,660		82,427,350	4 - Dec-15
8	4,848,660		77,578,690	4 - Jan-16
9	4,848,660		72,730,030	4 - Feb-16
10	4,848,660		67,881,370	4 - Mar-16
11	4,848,660		63,032,710	4 - Apr-16
12	4,848,660		58,184,050	4 - May-16
13	4,848,660		53,335,390	4 - Jun-16
14	4,848,660		48,486,730	4 - Jul-16
15	4,848,660		43,638,070	4 - Aug-16
16	4,848,660		38,789,410	4 - Sep-16
17	4,848,660		33,940,750	4 - Oct-16
18	4,848,660		29,092,090	4 - Nov-16
19	4,848,660		24,243,430	4 - Dec-16
20	4,848,660		19,394,770	4 - Jan-17
21	4,848,660		14,546,110	4 - Feb-17
22	4,848,660		9,697,450	4 - Mar-17
23	4,848,660		4,848,790	4 - Apr-17
24	4,848,790			4 - May-17
Total		116,367,970		

Menyetujui,
 Agriyani

RIWAYAT HIDUP



ANGRIANI. Dilahirkan di Tellang Kec. Pitumpanua Kab. Wajo pada 05 Juli 1993. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, buah hati dari Ayahanda Jamal Kolley dan Ibunda Sahri Bunga. Penulis memulai pendidikan pada sekolah dasar di SDN 211 Bulete dan tamat pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan pada sekolah menengah di SMP Negeri 1 Pitumpanua dan setelah tamat pada tahun 2008 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Pitumpanua dan selesai pada tahun 2011. Dan kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi dan menyelesaikan studi pada tahun 2015.